

Lucitania Rizky | Ade M Wirasenjaya

# MENJINAKKAN KAPITALISME DI DUNIA KETIGA

Upaya Mohammad Yunus Membangun  
Kekuatan Ekonomi Masyarakat Miskin  
melalui *Grameen Bank* di Bangladesh



*The Printsi - Press*

MENJINAKKAN KAPITALISME DI DUNIA KETIGA  
Upaya Mohammad Yunus Membangun Kekuatan Ekonomi  
Masyarakat Miskin melalui Grameen Bank di Bangladesh

© The Phinisi Press Yogyakarta, 2022

*All rights reserved*

---

xii + 136 ukuran 145 x 205 mm

Cetakan I: Agustus 2022

ISBN:

---

Penulis: Lucitania Rizky & Ade M. Wirasenjaya

Editor:

Desain Isi: The Phinisi Team

Desain Sampul: The Phinisi Team

Penyunting: Ahmad Sahide

---

Copyright © 2022

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

---

Penerbit:

The Phinisi Press Yogyakarta

Perum Mentari Elok 2, Jl. Mojo No. B3, Gejawan Wetan

Balecatuur, Gamping, Sleman, Yogyakarta

No Telepon: 085292039650

Email: [thephinisipress@yahoo.com](mailto:thephinisipress@yahoo.com)

*"HUMAN BEINGS ARE MUCH BIGGER  
THAN JUST MAKING MONEY"*

**~MUHAMMAD YUNUS~**





## KATA PENGANTAR

BUKU INI dikembangkan dari karya akhir Lucitania Rizky di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY).

Pertimbangan kami untuk menerbitkan karya ini menjadi sebuah buku, di samping gelombang kapitalisme sudah sedemikian dahsyat, juga untuk mengingatkan dunia aktivisme sosial agar tidak terlalu mudah dikendalikan oleh prinsip-prinsip pasar bebas. Buku ini memberi gambaran bahwa ada elemen dan ruang yang bisa dinegosiasikan antara cara kerja kapitalisme dengan nilai-nilai lokal. *Grameen bank* mengombinasikannya dengan sangat cekatan dan cerdas: ia membawa infrastruktur dan cara kerja kapitalisme yang efisien dan profesional, namun ia juga menginterupsi elemen keserakahan dan mengisinya dengan elemen solidaritas yang bisa menumbuhkan berbagai kekuatan yang terlibat di dalam *Grameen Bank*.

Meskipun sudah cukup lama, rasanya apa yang dilakukan Yunus melalui *Grameen Bank*, prinsip-prinsip etik dan nilai-nilai solidaritas ekonomi yang dibawanya, terasa relevan untuk didengungkan kembali di hari-hari ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini, kami haturkan terima kasih.

Yogyakarta

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Grafik</b> .....	x
<b>Daftar Diagram</b> .....	xi
<b>Daftar Gambar</b> .....	xii
<b>BAGIAN SATU: Kapitalisme Dan Pembangunan</b>	
<b>Di Dunia Ketiga</b> .....	1
A. Problem dan Dilema Pembangunan Dunia Ketiga ..	1
B. Konteks Sosial Ekonomi Bangladesh .....	6
C. Argumen Buku ini .....	13
<b>BAGIAN DUA: Bangladesh: Upaya Keluar</b>	
<b>Dari Kapitalisme</b> .....	15
A. Menghindari Jebakan Pasar .....	16
B. <i>People Centered Development</i> .....	19
C. <i>Sustainable Development</i> .....	22
D. Membuat Kapitalisme Bekerja .....	24
E. Argumen Buku Ini .....	26

<b>BAGIAN TIGA: Tiga Wajah Pembangunan</b>	
<b>Bangladesh.....</b>	<b>27</b>
A. Politik Pembangunan Bangladesh .....	27
B. Reformasi Kebijakan Ekonomi Pembangunan Bangladesh .....	33
C. Rezim Kapitalis Dalam Demokrasi Baru Bangladesh	41
D. Masalah Sosial-Politik Dalam Pembangunan Di Bangladesh .....	47
<b>BAGIAN EMPAT: Korporasi Global Dan</b>	
<b>Pembangunan Bangladesh.....</b>	<b>55</b>
A. Korporasi di Asia: Posisi dan Peran .....	57
B. Pertumbuhan Korporasi di Bangladesh.....	63
C. Pergeseran Kekuatan Ekonomi Bangladesh.....	74
D. Keluar dari Hegemoni Kapitalisme .....	82
E. Sintesis Kapitalisme dan Gerakan Sosial .....	84
<b>BAGIAN LIMA: Bisnis Sosial: Gerakan</b>	
<b>Penjinakkan Kapitalisme .....</b>	<b>87</b>
A. Muhammad Yunus: Tokoh di Balik Bisnis Sosial .....	88
B. Kapitalisme, Yunus, dan Kaum Miskin .....	91
C. <i>Grameen Bank</i> : Pembangunan yang Berkelanjutan..	98
D. Kolaborasi <i>Grameen Bank</i> dengan Korporasi Global	112
<b>BAGIAN ENAM: Penutup.....</b>	<b>124</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>130</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Pembangunan Manusia dalam Peningkatannya sejak tahun 1990, Bangladesh and Asia Selatan .....	11
Tabel 2.1	Gagasan tentang Pemerintahan dari Dua Institusi Ekonomi Utama .....	42
Tabel 2.2	Investasi Sektor Publik, 1980–1990 (Tk 1989/1990 prices) .....	48
Tabel 2.3	Perluasan Kemiskinan di Bangladesh .....	51
Tabel 3.1	FDI Inflows (US \$ Million), 1984–2007 .....	66
Tabel 3.2	Pertumbuhan Industri Garmen di Bangladesh .....	72

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Ekspor Bangladesh dalam <i>juta Tk Bangladesh</i> (1991/1992–1996) .....	44
Grafik 2.2	Penanaman Saham Bangladesh 1991-1998	46
Grafik 4.1	Statistik Pertumbuhan Keanggotaan <i>Grameen Bank</i> , 1980-2010 .....	108

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Tiga Aspek Pembangunan Berkelanjutan .	23
Diagram 3.1 Arus Masuk Foreign Direct Investment (FDI) di Bangladesh berdasarkan Negara 1996–2010.....	69
Diagram 3.2 Arus Masuk Foreign Direct Investment (FDI) di Bangladesh berdasarkan Sektor 1996–2010.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Pergeseran Kekuatan Ekonomi .....	78
------------	--	----

# BAGIAN SATU

## KAPITALISME DAN PEMBANGUNAN DI DUNIA KETIGA

### A. Problem dan Dilema Pembangunan Dunia Ketiga

APAKAH kapitalisme merupakan jalan tunggal sejarah? Buku ini tidak terlalu meyakinkannya. Namun, di antara pilihan-pilihan yang sulit bagi negara berkembang untuk keluar dari jalan kapitalis dalam menempuh jalur pembangunan, buku ini meyakini bahwa modifikasi kapitalisme masih mungkin dilakukan. Ada banyak pustaka yang melakukan kritik terhadap kapitalisme sebagai ideologi penjebak pembangunan negara-negara berkembang pada khususnya, sebagaimana yang cukup kuat diartikulasikan pemikiran di jalur dependensia maupun marxis tentang nestapa Amerika Latin. Kalangan ini berpendapat bahwa negara-negara pinggiran yang disentuh oleh negara maju tidak akan mengalami kemajuan<sup>1</sup>. Interaksi dengan Barat adalah pangkal tragedi dan hanya melanggengkan kolonialisme dalam jubahnya yang baru.

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya Paul Baran....., juga Arief Budiman *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hal. 60.

Bagi para pengkritiknya, janji pemerataan pembangunan dari resep kapitalisme tidak juga terjadi. Sementara itu upaya alternatif untuk mencari model pembangunan non-kapitalis, juga tak kunjung sukses. Pemikiran Baran ini kemudian disimpulkan oleh Brewer “negara-negara yang terbelakang dikuasai oleh kepentingan modal asing, agen-agen negara dan oleh kepentingan kaum pedagang dan tuan tanah.”<sup>2</sup> Pemikir dependensia yang lain, Andre Gunder Frank, bahkan menyatakan tidak mungkin ada perkembangan di negara satelit ketika masih berhubungan atau menginduk kepada negara metropolis.<sup>3</sup>

Persentuhan rezim kapitalisme dengan negara berkembang memiliki histori yang cukup panjang. Bahkan, kapitalisme hadir sejak kolonialisme di negara-negara Asia. Pada dekade tahun 80-an hingga 90-an, jejak kapitalisme sudah mulai menapak dengan pelembagaan kapitalisme di negara-negara Asia. Sejarah penyesuaian kehidupan kapitalis di Asia banyak mengalami pasang surut. Pasca kolonialisme Barat, kapitalisme datang membawa tawaran kehidupan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Namun, bagi sebagian kalangan, kehadiran kapitalisme memiliki kecenderungan bersifat negatif seperti yang dikemukakan oleh Fuller dalam bukunya *Indonesia Dikhianati*. Fuller melihat keadaan di Thailand, Filipina, dan Indonesia yang telah berhasil meletakkan dasar bagi berbagai

---

<sup>2</sup> Packenham, 1974: 15–52 dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hal. 60.

<sup>3</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hal. 69

pergerakan demokrasi membawa kejatuhan rezim-rezim otoriter, namun belum berhasil melawan dominasi ekonomi pasar bebas atau pembangunan model neoliberal. Model ini telah memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin di seluruh bumi. Pemikir lain berpendapat bahwa perubahan mengharuskan kita mengakui kapitalisme neoliberal atau ekonomi “pasar bebas”, yang dipromosikan di bawah rubrik globalisasi, oleh Fuller dianggap sebagai ideologi yang utopis. Dengan kata lain bahwa, kapitalisme yang berbentuk “pasar bebas” ini tidak dapat berjalan di negara yang ingin mengalami sebuah perubahan, khususnya di negara berkembang.<sup>4</sup>

Kondisi semacam ini juga terjadi di belahan dunia lain seperti Afrika. Tujuan awal menghadirkan globalisasi sebagai agenda besar ke dalam negara-negara di Afrika guna mengurangi kemiskinan yang terjadi namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Bank Dunia (*World Bank*) telah memberikan definisi serta parameter terhadap apa yang disebut dengan kemiskinan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan berada pada pendapatan \$2 per hari, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem menempati tingkat pendapatan kurang dari \$1 per harinya.<sup>5</sup> Afrika merupakan tempat yang paling tereksplorasi oleh hadirnya globalisasi. Joseph Stiglitz memaparkan bahwa kegagalan paling buruk dari globalisasi terjadi di Afrika. Pada saat kapitalisme masuk

---

<sup>4</sup> Elizabeth Fuller Collins, *Indonesia Dikhianati* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 246.

<sup>5</sup> Joseph Stiglitz E, *Making Globalization Work* (New York: W.W. Norton & Company, 2007), Hal. 10.

di Afrika memperburuk keadaan kemiskinan. Sejak tahun 1981 persentase kemiskinan ekstrem di Afrika mengalami peningkatan dari angka 41,6% menjadi 46,9% pada tahun 2001. Angka ini juga beriringan dengan peningkatan angka populasi, yang memiliki arti bahwa kehidupan kemiskinan di Afrika hampir mengalami peningkatan dua kali lipat, dari 164 juta menjadi 316 juta.<sup>6</sup> Hal ini sama terjadi dengan kondisi Bangladesh di awal pembangunannya. Bangladesh menempati urutan negara termiskin di antara *south belt countries* setelah Afrika.

Kondisi sosial ekonomi negara-negara berkembang yang amat rapuh juga memberi jalan bagi konsolidasi kapitalisme global. Dalam sebuah kesempatan, Cristian Chua menulis dalam esainya yang berjudul *Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist* dan mengangkat kutipan mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai kehadiran kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme telah mengalami peningkatan di Indonesia, dianggap sudah tidak lagi mengandalkan kedekatan dengan pemerintah, namun hubungan langsung kepada masyarakat. Hal ini mengingatkan pada premis kapitalisme yang diajukan oleh Wallerstein bahwa “Kapitalis tidak menginginkan sebuah kompetisi, tapi monopoli karena mereka mencari keuntungan maksimal, dengan tujuan untuk mengakumulasi modal sebanyak mungkin”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Shoua Chen, 2007: 10 – 11 dalam Joseph Stiglitz E, *Making Globalization Work* (New York : W.W. Norton & Company, 2007), Hal. 10.

<sup>7</sup> Christian Chua. “*Capitalist consolidation, consolidated capitalist-Indonesia’s conglomerates between authoritarianism and democracy*”. In



Kombinasi antara kapitalisme yang ekspansif dengan kondisi internal yang berlangsung di negara-negara berkembang makin mendorong ketergantungan negara berkembang atas modal global. Fuller juga dalam bukunya menyatakan bahwa negara-negara berkembang jatuh di bawah kontrol lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan *the International Monetary Fund* (IMF), yang memaksakan kebijakan ekonomi neoliberal kepada negara-negara pengutang dalam bentuk program-program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Programs*) atau disebut dengan SAPs. Ambil contoh, Meksiko menjadi negara pertama yang gagal membayar utang pada tahun 1982, dan diikuti oleh Brazil.<sup>8</sup>

Program penyesuaian struktural sebagai bentuk nyata penetrasi kapitalisme di negara berkembang yang tidak memecahkan masalah hutang ataupun kemiskinan. Kritik juga diutarakan oleh salah satu LSM Internasional, OXFAM menganggap penetrasi kapitalisme sebagai sebuah fenomena keterpurukan ekonomi akibat kehendak negara maju. Fenomena ini sama halnya dengan apa yang melanda Bangladesh di awal pembangunan.

Bangladesh merupakan kasus yang unik antara pertemuan negara dengan penetrasi kapitalisme global. Negara Asia Selatan yang merdeka pada tahun 1917 ini sudah mengenal kapitalisme sejak masih bergabung dengan Pakistan. Dalam sistem kapitalis global, posisi Bangladesh berada pada ekonomi

---

Marco Bunte–Andreas Ufen (Ed.). *Democratization in Post-Post Suharto Indonesia* (New York: Rotledge Taylor & Francis Group, 2009), Hal. 209.

<sup>8</sup> Elizabeth Fuller Collins, *Op.cit.*, 2008, Hal. 251.

kapitalis pinggiran. Negara yang berpenduduk mayoritas Islam sebesar 80% ini melahirkan sebuah mekanisme yang menekankan pada sistem kapitalis, namun hal tersebut tidak dapat bekerja dalam memformulasikan peraturan ekonominya sendiri.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan di Bangladesh, sebagian besar diformulasikan di luar parlemen negara tersebut. Kebijakan ekonomi di Bangladesh menjadi sebuah produk sesuai persetujuan aktor-aktor ekonomi kapitalis global, sebut saja Bank Dunia, IMF, *the United State Agency for International Development* (USAID), dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keterbelakangan Bangladesh atas kemiskinan dan masalah-masalah pembangunan dapat dilihat secara historis, lebih tepatnya pada tahun 1971 hingga tiga puluh tahun setelahnya. Pada dasarnya sambutan hangat dari rezim internasional tidak menjadi sesuatu yang baru bagi Bangladesh, mengingat sistem ekonomi Bangladesh saat masih bergabung dengan Pakistan adalah sistem ekonomi yang amat tergantung kepada Amerika Serikat. Mengacu pada sejarah proses kemerdekaan Bangladesh, penetrasi kapitalisme di negara ini terjadi dengan sangat mulus. Peran sistem ekonomi global Pakistan yang masih melekat bagi orang-orang Bangladesh membawa bangsa ini ikut masuk dalam kancah kapitalis global.

## **B. Konteks Sosial Ekonomi Bangladesh**

Dalam periode tahun 1973-1974, posisi pemerintah Bangladesh masih terus mengalami perubahan dalam menentukan arah pembangunan ekonominya. Setelah tahun 1975, penetrasi

ekonomi global dari kelas elite di tingkat lokal Bangladesh dan posisi rezim militer yang semakin kuat. Dekade tahun 1980 menjadi rentang waktu yang penting dalam membentuk masa depan ekonomi Bangladesh. Selama periode tahun 1980, program neoliberal semakin mudah diterima bagi pembangunan ekonomi dan sesuai dengan skala global. Tekanan pasar Bangladesh tidak sesuai dengan sistem ekonomi tertutup. Skema ekonomi Bangladesh lebih sesuai dan mengikuti skema global. Dilihat dari kacamata politik internasional, Bangladesh saat itu berada di bawah kekuasaan militer, dikuasai rezim sayap-kanan di bawah pengaruh kekuatan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat.<sup>9</sup>

Pola penyesuaian sistem ekonomi Bangladesh terhadap struktur ekonomi internasional terjadi melalui dorongan *Structural Adjustment Programs* (SAPs). Program ini dibentuk oleh badan-badan ekonomi dunia seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF). Mereka melakukan penekanan terhadap jalanya ekonomi di negara berkembang. Korban akan terjebak dalam pusaran sistem ekonomi yang mengekang dan tidak ada celah kebebasan. Kapitalisme di awal perkembangannya merupakan bentuk kapitalis yang menjerat dan miskin harapan dalam pencapaian kesejahteraan. Keadaan dalam negeri masih sangat tergantung pada bantuan luar negeri, sehingga membawa akibat pada tunduknya negara terhadap konstruksi ekonomi internasional secara tidak langsung.

---

<sup>9</sup> Wahiduddin Mahmud, *Social Development in Bangladesh: Pathways, Surprises and Challenges*. Indian Journal of Human Development, Vol. 2, No. 1, 2008.

Resep kapitalisme dari Bank Dunia, IMF, maupun organisasi internasional lainnya merupakan wujud usaha pembangunan yang tidak menggali potensi dari Bangladesh, namun sebaliknya pembangunan yang membentuk sebuah lingkaran ketergantungan.<sup>10</sup> Pembangunan yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan IMF di Bangladesh merupakan sebuah pembangunan yang menghasilkan kesenjangan sosial-ekonomi, mencabut manusia dari akar budayanya, pembangunan yang membungkam masyarakat, dan pembangunan yang tidak punya masa depan.<sup>11</sup>

Kehadiran kapitalisme ditandai dengan privatisasi dan pembukaan lahan ekonomi Bangladesh bagi perusahaan multinasional. Agenda-agenda utama reformasi ekonomi Bangladesh di awal kemerdekaannya merupakan hasil pemikiran dan keinginan dari Bank Dunia, IMF, dan kor-porasi global untuk membangun sebuah kelompok kapital. Inilah yang menjadikan roh kapital Bangladesh pada awalnya sungguh lemah. Masyarakat negara tersebut tidak berdaya dan terjerat dalam lingkaran kemiskinan.

Keluar dari ketergantungan atas modal internasional tidak semudah resep yang ditawarkan kalangan pengkritik kapitalisme seperti kaum dependensia. Inilah yang kemudian memicu munculnya sejumlah inisiatif untuk mencari cara memodifikasi

---

<sup>10</sup> Manorajan Pegu, “*Development, capitalism, NGOs and people’s movements in Bangladesh*” an interview with Anu Muhammad. (<http://links.org.au/node/2075>, diakses 3 September 2014)

<sup>11</sup> Ade Marup Wirasenjaya. Bahan Kuliah “*Teori Pembangunan – Sustainable Development*”, 2013.

model kapitalisme dalam pembangunan di negara berkembang. Setidaknya, apa yang dilakukan Muhammad Yunus melalui *Grameen Bank* di Bangladesh menjadi salah satu bentuk modifikasi tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan Yunus tidak sepenuhnya mendorong Bangladesh menjadi negara yang benar-benar keluar dari jerat kapitalisme global. Namun setidaknya, Yunus memberi semacam resep menjinakkan kapitalisme dengan cara mengompromikannya dengan inisiatif-inisiatif lokal Bangladesh. Bahwa atas upaya-nya tersebut Yunus meraih Nobel Perdamaian yang amat prestisius, menjadi cerita lain tentang dampak nyata dari proyek yang dirintisnya lewat *Grameen Bank*.

Bagi Yunus, kapitalisme menyediakan ruang kompromi, ketika umumnya disebutkan bahwa kapitalisme hanya bersifat eksploitatif dan memiliki kecenderungan bersifat stagnasi bagi kaum miskin atas keikutsertaannya dalam kapitalisme, Yunus ingin membangun jalan tengah dengan cara memakai platform kapitalisme. Ia berupaya mentransformasikan pembangunan di Bangladesh dengan menggunakan instrumen lokalitas sebagai pijakan mekanisme pasar melalui apa yang disebut bisnis sosial.

Praxis Yunus melalui *Grameen Bank* dalam upayanya membuat kapitalisme bekerja dalam kehidupan sosial telah mendapat impresi dari berbagai kalangan. Dalam sebuah ulasan yang telah dilakukan salah satu akademisi dunia mengenai *Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor*, disebutkan bahwa Muhammad Yunus melihat kapitalisme sebagai mitra bagi kaum miskin. Modal yang terakumulasi dari kaum miskin menjadi alat yang paling ampuh untuk keluar dari kungkungan

kemiskinan. Bantuan internasional dan peran pemerintah telah gagal memerangi kemiskinan di Bangladesh.<sup>12</sup>

Hal lain yang diajukan Yunus melalui *Grameen Bank* adalah soal kolaborasi pembangunan yang melibatkan tiga kekuatan penting: negara, kekuatan modal internasional, dan NGO. Ini merupakan potret kolaborasi yang menarik, yang jarang-jarang dilakukan khususnya oleh negara di Asia. Posisi awal Bangladesh dapat digambarkan sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan *over* populasi. Mengambil salah satu indikator dari pembangunan sosial, pendapatan per kepala di Bangladesh berada pada level terendah di dunia saat itu.<sup>13</sup> Henry Kesinger, mantan menteri luar negeri Amerika Serikat dan pemenang Nobel perdamaian tepatnya pada tahun 1973, berpendapat bahwa kasus Bangladesh saat itu dijulukinya “*an international basket case*”.

Pasca tahun 1971, kemiskinan dan konflik sosial di Bangladesh memang tidak bisa dielakkan. Konflik berbasis etnis, kerusuhan, ekonomi terus mewarnai kehidupan sosial-politik di Bangladesh. Pengentasan kemiskinan yang diupayakan pemerintah Bangladesh pada saat itu pun tidak menyelesaikan masalah sosial yang ada. Peningkatan transformasi pembangunan sosial yang dialami Bangladesh dapat dilihat dari empat indikator dari *Human Development Reports* pada tahun

---

<sup>12</sup> David O. Beim, *Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor*. Chazen Web Journal of International Business, Spring 2004, Hal. 2.

<sup>13</sup> Wahiduddin Mahmud, *Social Development in Bangladesh: Pathways, Surprises and Challenges*. Indian Journal of Human Development, Vol. 2, No. 1, 2008.

2005 dan perbandingannya terhadap seluruh negara Asia Selatan. Ini merupakan salah satu fakta pembangunan sosial di Bangladesh menjulang kesuksesannya dan membawa negara ini tidak berada pada level terendah di lingkaran deretan negara miskin, khususnya Asia Selatan.

Tabel 1.1

Indikator Pembangunan Manusia dalam Peningkatannya sejak tahun 1990, Bangladesh dan Asia Selatan

<b>Indikator</b>	<b>Negara</b>	<b>1990</b>	<b>2002–2004</b>
Angka partisipasi sekolah (%)	Bangladesh	80	109
	Asia Selatan	95	103
Rasio perempuan dan laki-laki di sekolah menengah dan sekolah dasar (%)	Bangladesh	77	107
	Asia Selatan	71	89
Angka kematian di bawah 5 tahun (per 1000 kelahiran)	Bangladesh	144	69
	Asia Selatan	130	86
Tingkat populasi dengan akses sanitasi yang baik (%)	Bangladesh	23	48
	Asia Selatan	20	37

Sumber: *UNDP's Human Development Report 2005*

Periode 1990–2004 menjadi periode yang sangat penting bagi perubahan standar kehidupan di Bangladesh. Transformasi pembangunan sosial yang terjadi tidak lepas dari jerih payah mikro kredit dari Muhammad Yunus untuk mengajak dan menyadarkan bahwa pembangunan negara harus tetap berlanjut. Pembebasan kemiskinan menjadi tanggung jawab masyarakat bersama. Seperti kita tahu bahwa konflik dan

keterpurukan ekonomi menjadi wajah pembangunan sosial Bangladesh. Menariknya, Bangladesh berhasil menggeser posisinya dari negara berkembang yang sering dilanda kelaparan menjadi sebuah negara yang memiliki harapan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, peran NGO dalam pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan sangat menarik untuk diamati. NGO terlibat di setiap aktivitas pembangunan negara, seperti bantuan pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lingkungan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Meskipun peran NGO tidak memberikan dampak yang signifikan atas usahanya melakukan pembangunan di Bangladesh, namun mereka berhasil melakukan kampanye sosial secara langsung terutama di area pedesaan dan pedalaman Bangladesh.

Aktor lain yang tidak kalah penting atas partisipasinya dalam agenda pembangunan Bangladesh adalah para kaum wanita. Keterlibatan berbagai pihak (*stakeholders*) memiliki andil yang cukup besar dalam meraih kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Wanita menjadi kekuatan baru yang digunakan oleh Muhammad Yunus dalam merealisasikan bisnis sosial miliknya. Efek pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berada pada sektor ekonomi, namun juga berada pada sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan angka literasi bagi kaum muda. Hal inilah yang berpengaruh dalam peningkatan taraf pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi

---

<sup>14</sup> Wahiduddin Mahmud, *Op.cit.*, 2008, Hal. 10.



bagi Bangladesh dibandingkan dengan negara berkembang yang lain.

Improvisasi yang dijalankan oleh Bangladesh sejak kemerdekaannya tidak bisa lepas dari peran dan pengaruh Muhammad Yunus. Tokoh ini muncul dengan gagasannya pada tahun 1974 pertama kali. Pembangunan Sosial dan kemiskinan mulai mengalami titik terang setelah adanya kredit mikro. Sebelumnya, pembangunan ekonomi sangat kental dengan konflik kepentingan, yaitu pinjaman yang diberikan dengan bunga tinggi terhadap kaum miskin.

### **C. Argumen Buku ini**

Kolaborasi antara Muhammad Yunus dengan kapitalisme yang direpresentasikan melalui korporasi global dan *Grameen Bank* dilakukan dengan cara: Pertama, menggeser paradigma dalam pembangunan di Bangladesh yang awalnya bersifat *economics centris* menjadi *human centris*.

Kedua, dengan mengajukan konsep bisnis sosial, Muhammad Yunus menawarkan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di Bangladesh.



## BAGIAN DUA

### **BANGLADESH:**

### **UPAYA KELUAR DARI KAPITALISME**

PEMBANGUNAN Bangladesh cukup mendapat apresiasi dunia dalam prosesnya, meskipun menemui jebakan-jebakan kapital dalam struktur ekonomi yang diadopsi. Nafas segar pembangunan ini tumbuh sekitar tahun 1974, ditandai dengan *landing money for the poor* dari seorang profesor ekonomi, Muhammad Yunus. Dibandingkan dengan pembangunan di Pakistan, pertumbuhan yang terjadi di negara tersebut, Pakistan merupakan pertumbuhan tanpa pembangunan. Indikator perbandingan dalam melihat pembangunan sosial di Bangladesh lebih baik dari negara berkembang lain, antara lain: pertumbuhan, persentase kemiskinan yang semakin menurun, pendidikan dan tingkat melek huruf, angka kesehatan seperti gizi buruk di Bangladesh yang semakin mengecil, dan indeks pembangunan manusia Bangladesh lebih unggul.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Perbandingan Pembangunan: Pakistan dan Bangladesh oleh Cut Endang Kurniasih – dapat diakses dalam (<http://www.slideshare.net/CutEndangKurniasih/perbandingan-pembangunan-pakistan-dan-bangladesh>). Diakses pada tanggal 3 September 2014)

## A. Menghindari Jebakan Pasar

Pada kurun waktu terakhir, pembangunan sosial dan kemiskinan di Bangladesh sudah mulai teratasi sejak hadirnya Muhammad Yunus dengan bisnis sosialnya. Di awal tahun 2000, konflik sosial mulai mereda dan perbaikan kualitas pembangunan ekonomi yang berimplikasi pada pengurangan kemiskinan. Fakta ini dapat dilihat pada laporan oleh *Trading Economics* ditahun 2014. Terlihat disalah satu indikator PDB per kapita, di beberapa waktu terakhir berada pada 597.02 USD. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 625.34 USD. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa rata-rata PDB per kapita di Bangladesh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, anggap saja rata-rata PDB per kapita di Bangladesh mencapai 317.41 USD. Konsistensi peningkatan ekonomi Bangladesh merupakan pencapaian yang luar biasa sebagai negara termiskin di Asia Selatan, setelah Afrika. Persentase tingkat pengangguran juga menjadi tolak ukur bagaimana perbaikan keadaan pembangunan sosial yang terjadi, Bangladesh berada pada poin 4.5% dari 154.70 juta populasi.<sup>16</sup>

Angka yang dipaparkan di atas tidak lepas dari kesuksesan Muhammad Yunus dalam menciptakan dan membangun *Grameen Bank* sebagai bisnis sosial. Visi yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus dikonstruksikan secara nyata ke dalam *Grameen Bank*. Visi Yunus adalah bank yang akan menangani semua aspek kehidupan pedesaan dan mendukung kegiatan komersial mulai dari manufaktur ke ritel, termasuk bahkan

---

<sup>16</sup> Trading Economics (<http://id.tradingeconomics.com/bangladesh/indicators>, diakses 4 September 2014)

dari pintu ke pintu penjualan, atau disebut dengan *sales* (Penjualan).<sup>17</sup> Kinerja bank di sini sangat berbau kapitalis, diubah oleh Muhammad Yunus menjadi sistem yang lebih emansipatif.

Bermula dengan konsep yang sangat sederhana, hanya dengan meminjamkan modal pribadi kepada kaum miskin yang disebut sebagai kredit mikro (*micro finance*). Gagasan ini dikembangkan Muhammad Yunus untuk mengangkat perekonomian di Bangladesh. Yunus beranjak dari kredit mikro ke sebuah konsep yang lebih luas, secara rapi meliputi kredit mikro itu sendiri. Konsep ini akan mengantarkan per-ubahan mendasar dalam arsitektur perekonomian kapitalis kita dengan membawanya semakin dekat ke sebuah kerangka kerja yang lengkap dan memuaskan, membebaskannya dari kelemahan-kelemahan mendasar yang menjurus ke kemiskinan dan masalah-masalah sosial serta lingkungan lain.<sup>18</sup> Konsep ini yang nantinya dikenal dengan Konsep bisnis sosial.

Muhammad Yunus membangun bisnis sosial di Bangladesh didasarkan atas keprihatinannya terhadap kemiskinan dan masalah sosial yang tak kunjung usai. Kreativitas, kewira-usahaan, dan hasrat untuk menjadikan dunia menjadi sebuah tempat yang lebih baik merupakan faktor-faktor penggerak yang ada di balik penciptaan sebuah bisnis sosial.<sup>19</sup> Bisnis sosial merupakan sebuah perwujudan bahwa tidak ada-nya

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Muhammad Yunus, *Bisnis Sosial–Sistem Kapitalisme Baru yang memihak Kaum Miskin* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. xviii.

<sup>19</sup> Ibid., Hal. 65.

penolakan atas kedatangan kapitalisme di tanah Bangladesh. Hal ini menjelaskan bahwa posisi Yunus yang melihat peluang atas hadirnya korporasi-korporasi global. Sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkannya guna membantu dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi Bangladesh.

Apa yang dilakukan oleh Yunus dalam mendorong pembangunan sosial di Bangladesh dengan cara melibatkan korporasi global, menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Selama ini korporasi global cenderung dipandang secara sinis oleh berbagai kalangan, baik dari dunia akademis maupun dunia aktivis sosial. Pandangan sinis ini misalnya bisa ditemui dalam karya Paul Hirst dan Grahame Thompson yang melihat perusahaan asing atau korporasi sebagai aktor yang bersifat eksploitatif dan karenanya mengancam kedaulatan ekonomi nasional suatu negara.<sup>20</sup>

Dalam aneka pandangan kritis dan sinis di atas, apa yang berlangsung di Bangladesh dapat dianggap sebagai sebuah fenomena yang unik sekaligus amat menarik. Kedatangan korporasi di Bangladesh yang diikuti oleh komitmen mereka dalam proyek bisnis sosial yang diajukan Yunus boleh jadi merupakan suatu hal yang baru, hingga menjadi model kolaborasi antara korporasi global pada satu sisi dan agenda-agenda pembangunan yang berbasis pada agenda masyarakat lokal pada sisi yang lain.

---

<sup>20</sup> Grahame Thompson-Paul Hirst, *Globalisasi adalah Mitos* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), Hal. 112.

## B. *People Centered Development*

*People Centered Development* (PCD) merupakan salah satu teori pembangunan yang berpusat pada manusia. Pendekatan yang muncul pada tahun 80-an diakibatkan kekecewaan terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya, seperti *modernis*, *dependensia*, dan *sistem dunia*. PCD melihat pandangan sebelumnya hanya menempatkan pembangunan menjadi sebuah ideologi.

PCD memandang pembangunan di negara dunia ketiga sebagai sebuah kemiskinan yang tidak hanya berada pada kondisi penghasilan rendah, tetapi lebih jauh lagi adalah mengenai penutupan sumber-sumber kesejahteraan (*exclusion*) sehingga mengakibatkan sekelompok orang tidak mampu memperoleh hak-hak dasarnya, tidak punya harga diri, dan kepercayaan diri. Dapat dikatakan bahwa teori PCD tidak berpusat pada pemikiran, namun lebih menekankan pada gerakan sosial. Tahapan PCD dalam melihat pembangunan sudah berada di tahap akhir yaitu aksi (*action*). Sehingga PCD menganggap bahwa pembangunan hanya bisa terjadi ketika pembangunan dikembalikan pada tempatnya, yaitu manusia. Membiarkan manusia melakukan sendiri dengan memberi peluang kepada mereka maka pembangunan di sebuah negara dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks pembangunan kaum miskin di Bangladesh dan dibenturkan dengan pemikiran atas ide Muhammad Yunus, teori PCD merupakan teori yang cukup dapat menggambarkan situasi polemik bagaimana kemiskinan dapat diatasi. Merujuk pada *post-modernis* yang selalu menekankan bahwa

faktor manusia-individu-sebagai komponen penting penopang pembangunan.<sup>21</sup> Pada era globalisasi seperti sekarang, kita tidak dapat menghindari ekspansi praksis dari kapitalisme. Nilai dan praktik kapitalis akan terus menuntun jalan kita dalam melakukan kegiatan sosial-ekonomi sehari-hari. Sesuai dengan pendapat kaum transformasionalis dalam perspektifnya pada kehidupan globalisasi, bahwa kapitalisme merupakan akibat dari keberlanjutan industrialisasi yang berkembang. Kita tidak seharusnya menolak begitu saja atas ide liberal tersebut, namun bagaimana kita menghadapinya sesuai dengan kebutuhan dan komposisi yang kita miliki.

Joseph Stiglitz dalam bukunya *Making Globalization Work* mendukung teori PCD dalam perannya menjelaskan fenomena perlakuan kapitalisme baru yang hadir di tengah kemiskinan di Bangladesh. Stiglitz menyatakan bahwa pasar, pemerintah, dan individu adalah tiga pilar kesuksesan strategi pembangunan. Pilar ke empat adalah komunitas, kumpulan orang yang bekerja bersama. Di beberapa negara sedang berkembang, tindakan kolektif yang lebih penting berada di level lokal.<sup>22</sup> *Grameen Bank* menjadi sangat terkenal di dunia karena mereka merupakan hasil kerja sekelompok wanita yang mengambil tanggung jawab untuk dimensi kemiskinan masyarakat yang lain, membantu sesama dan memastikan setiap pembayaran hutang dilakukan tepat saat jatuh tempo. Hal ini menggambarkan adanya kontribusi nyata dan pengambilalihan

---

<sup>21</sup> Arief Budiman, *Op.cit.*, 1995, Hal. 34.

<sup>22</sup> Joseph Stiglitz E, *Op.cit.*, 2007, Hal. 51.



peran kepada individu dalam pembangunan kemiskinan di Bangladesh.

Seperti pembahasan teori *PCD* di awal mengenai penutupan sumber kesejahteraan pada kaum miskin yang berakibat pada buntunya proses pembangunan di Bangladesh. Hal ini dapat dipecahkan ketika adanya perubahan kekuatan struktur komunitas dengan memberi sumber atau modal ekonomi kepada kaum termiskin, khususnya perempuan, yang telah mendapatkan tekanan cukup lama sebagai masyarakat kelas kedua. Dari cikal bakal kekuatan dan keterampilan para perempuan ini, permasalahan yang terselesaikan tidak hanya pada kemiskinan, namun juga masalah sosial lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.<sup>23</sup> Menja-di pembelajaran yang cukup berarti bagi sebagian negara sedang berkembang lain, kapitalisme harus dipandang bukan sesuatu yang selamanya destruktif. Kapitalisme bisa diajak berkompromi, mengambil alih modal dari sumber dan membawa di tingkat *grass roots* dengan eksekusi penyelesaian masalah.

Mengakomodasi *Grameen Bank* sebagai sebuah bagian yang terpadu dalam struktur ekonomi di Bangladesh menjadi agenda utama bagi Yunus dalam merealisasikan pemikirannya ke dalam struktur sosial nyata. Sesuai dengan konteks teori *PCD* yang berada di tingkat akhir dalam teori pembangunan dan lebih menekankan pada aksi, maka semua hal yang dibahas dalam bisnis sosial–Muhammad Yunus bersifat praksis. Semua dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasikan. Sehingga

---

<sup>23</sup> Ibid., Hal. 53.

keberhasilan ini membawa *Grameen Bank* menjadi model “bank miskin” baru di beberapa negara dunia lain.

### C. *Sustainable Development*

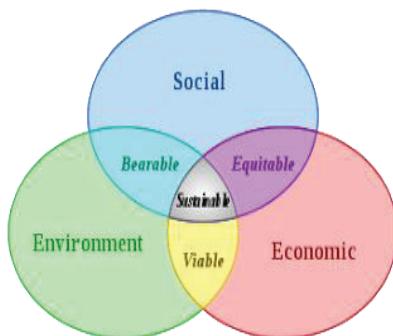
Konsep *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan) direalisasikan pada tahun 1992, dengan adanya kesepakatan global yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio de Janeiro, Brazil. KTT tersebut menghasilkan keputusan dan rekomendasi terdiri dari 39 bab yang dibagi atas 4 bagian : dimensi sosial dan ekonomi, konservasi dan pengelolaan SDA untuk pembangunan, peranan kelompok utama dan sarana pelaksana. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak, tetapi di pihak lain adalah sebuah teori normatif yang menyodorkan praksis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan *developmentalisme* (pembangunan) selama ini. Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup (lihat **Diagram 1.1**). Gagasan dibalik itu menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup

seharusnya dipandang sebagai suatu satuan yang terkait satu sama lain.<sup>24</sup>

### Diagram 1.1

Tiga Aspek Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Lingkup dan Definisi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) (<http://www.forexbroker.web.id/> diakses 5 September 2014)

Dengan integrasi ketiga aspek tersebut, kemajuan dan prestasi ekonomi yang dicapai akan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala dimensi dan sekaligus bersifat keberlanjutan. Dengan integrasi tersebut, pembangunan ekonomi diletakkan dalam kerangka lingkungan hidup dan sosial-budaya. Maka, yang ingin dicapai oleh konsep *sustainable development* adalah sebuah integrasi pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> A. Sony Kerat, *Etika Lingkungan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002), Hal.168 – 173.

<sup>25</sup> Ibid.

Gagasan penting yang disampaikan dalam teori ini, salah satunya adalah gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, yang diprioritaskan adalah kebutuhan kaum miskin. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari yang hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup.

#### **D. Membuat Kapitalisme Bekerja**

Berbagai ilmuwan sosial telah memberikan *review* (analisa kritis) terhadap kapitalisme, dengan hasil pandangan yang beragam. Kapitalisme banyak dianggap sebagai sebuah konseptualisasi yang menjadi akar terjadinya kemiskinan di dunia. Dalam pandangan kelompok lain kapitalisme dianggap sebagai suatu agenda penting dalam proses ekonomi dunia pada era globalisasi. Sehingga, kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat diselesaikan dengan sendirinya di tangan pasar.

Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan memberikan definisi atas kapitalisme secara umum lewat bukunya, *International Relations–The Key Concepts*. Kapitalisme (modern) adalah formasi sosial berbasis pasar. Pasar dianggap sebagai prinsip pengorganisasian utama. Kapitalisme merupakan seperangkat hubungan sosial yang mengatur materi kehidupan sosial. Dalam menelaah sebuah hubungan sosial yang lebih spesifik, diperlukan pandangan kapitalisme yang lebih mengerucut dan jelas.

Pandangan terhadap Kapitalisme di Asia Tenggara dapat menjadi acuan dalam melihat geliat kapitalisme di negara berkembang lain. Kapitalisme ini dikenal dengan *Ersatz Capitalism*.<sup>26</sup> Istilah tersebut merupakan sebuah asumsi baru yang diciptakan oleh Yoshihara Kunio dalam memandangi kinerja kapitalisme di negara sedang berkembang, cakupan Asia Tenggara, yang dianggapnya hanya bersifat semu. Konsep ini sesuai untuk menjadi acuan dalam melihat kinerja korporasi di berbagai negara dunia ketiga, termasuk Bangladesh. Korporasi yang datang sebagai manifestasi dari kapitalisme di Negara Dunia Ketiga hanya melakukan pembangunan yang semu. Kegiatan industrialisasi yang dilakukan secara besar-besaran tidak diikuti dengan agenda pembangunan yang seimbang.

Diungkapkan oleh Yoshihara Kunio, Kapitalisme berbentuk menjadi *ersatz capitalism* disebabkan oleh dua hal, yakni: Pertama, campur tangan pemerintah di negara dunia ketiga terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme menjadi tidak dinamis; Kedua, kapitalisme yang hadir tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai. Akibatnya, tidak terjadi industrialisasi yang mandiri. Padahal, menurut Yoshihara, industrialisasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk sebuah pembangunan ekonomi yang mandiri.<sup>27</sup> Kapitalisme di

---

<sup>26</sup> *Erzats* berasal dari Bahasa Jerman yang berarti “substitusi” atau “pengganti”. Kata ini kemudian digunakan dalam Bahasa Inggris, dalam arti yang sedikit berbeda, yakni “pengganti yang lebih inferior”

<sup>27</sup> Yoshihara Kunio, “*Kapitalisme Semu Asia Tenggara*”. Translated by A. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1990), Hal. xiv.

negara berkembang cenderung hanya bergerak di bidang jasa, walaupun bergerak di bidang industri maka hanya berperan sebagai kapitalisme komprador. Kapitalisme yang memosisikan negara (*house country*) sebagai agen industri manufaktur di negara sendiri.

Kapitalisme yang selama ini bekerja, merupakan bentuk kapitalisme yang tidak mendukung adanya pembangunan berkelanjutan. Perilaku kapitalisme di negara berkembang memiliki kecenderungan menghabiskan sumber daya, mengeksploitasi masyarakat, dan tidak mempertimbangkan nilai kehidupan setempat. Hal itu semua hanya untuk mencapai satu tujuan, yaitu keuntungan secara ekonomi yang lebih banyak bagi para pemangku modal (negara maju).

### **E. Argumen Buku Ini**

Kolaborasi antara Muhammad Yunus dengan kapitalisme yang direpresentasikan melalui korporasi global dan *Grameen Bank* dilakukan dengan cara: Pertama, menggeser paradigma dalam pembangunan di Bangladesh yang awalnya bersifat *economics centris* menjadi *human centris*.

Kedua, dengan mengajukan konsep bisnis sosial, Muhammad Yunus menawarkan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di Bangladesh.

## BAGIAN TIGA

# TIGA WAJAH PEMBANGUNAN BANGLADESH

PROSES PEMBANGUNAN Bangladesh tidak terpisahkan dari pengalaman buruk dalam menghadapi kedatangan rezim neoliberal, IMF dan Bank Dunia. Rezim global tersebut mendorong munculnya resistensi politik di beberapa negara, termasuk negara-negara berkembang lain seperti, di Amerika Latin dan Afrika Selatan.

### **A. Politik Pembangunan Bangladesh**

Proses integrasi dan penyesuaian Bangladesh terhadap struktur ekonomi internasional pada hakikatnya telah ada sejak negara ini mengalami pemisahan diri dari Pakistan. Namun, liberalisasi ekonomi Bangladesh tertutup oleh proses demokrasi politik yang mengalami pasang surut. Sehingga, kemiskinan dan pembangunan sosial menjadi permasalahan mendasar bagi terciptanya cita-cita pembangunan Bangladesh. Negara yang dulunya disebut Pakistan Timur, menarik perhatian dunia karena gagal melakukan transformasi pembangunan ekonomi maupun tatanan politik.

Di awal eksistensinya sebagai negara berkembang, Bangladesh dijuluki sebagai negara *basket case* oleh mantan perdana menteri Amerika, Henry Kesinger, karena kebijakan pemerintahnya yang mengandalkan bantuan dari luar negeri atas nama kemiskinan.<sup>28</sup> Selama, empat puluh tahun mengalami proses transformasi yang cukup panjang, Bangladesh berhasil menggeser kedudukannya dari *basket case* menjadi negara yang relatif memiliki kecukupan pangan.

Hari ini ekonomi Bangladesh merupakan salah satu ekonomi terkuat di Asia Selatan, memperlihatkan progres yang signifikan pada pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs). Keadaan ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh proses internal politik yang berlangsung, tidak terkecuali Bangladesh.

Perjalanan Bangladesh terhadap demokrasi dimulai sejak tahun 1972, setelah bangsa ini berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya di bulan Desember 1971 atas Pakistan. Demokrasi Bangladesh mengadopsi konstitusi negara dengan empat prinsip dasar yaitu nasionalisme, demokrasi, sosialisme, dan sekularisme.<sup>29</sup> Konstitusi Bangladesh mengandung unsur demokrasi yang sangat ideal, seperti bentuk pemerintahan

---

<sup>28</sup> David Lewis, *Bangladesh: Politics, Economy and Civil Society* (England: Cambridge University Press, 2012), *prolog*.

<sup>29</sup> Mohammad Tanzimuddin Khan : “*Working of Democracy in Bangladesh*”. (*Paper prepared for the project on State of Democracy in South Asia as part of Qualitative Assessment of Democracy Lokniti*, Center for Study of Developing Countries, Delhi, India), Hal. 1.



parlemen, keberagaman partai, pemilihan umum, hak-hak dasar, dan kebebasan peradilan.<sup>30</sup>

Lahir sebagai negara demokrasi nyatanya tidak membuat proses perpolitikan Bangladesh berjalan secara mulus sesuai dengan harapan. Perubahan arus politik berlangsung dalam dinamika internal negara yang membawa Bangladesh menjauh dari sistem demokrasi dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun lamanya. Dalam banyak kasus pembangunan di negara berkembang, gejolak politik seperti ini dianggap wajar. Beberapa negara dunia ketiga lain, seperti Brazil dan Venezuela mengalami gejolak politik yang jauh lebih ekstrem. Pada saat yang sama, negara-negara ini juga menghadapi dominasi pasar global yang berusaha masuk dalam rongrongan agenda pembangunan.

Sejak kemerdekaannya tahun 1971, Bangladesh telah mewarisi ekonomi yang didominasi oleh sektor swasta. Aset ekonomi dikuasai swasta sebesar 66% dari total aset tetap sektor industri.<sup>31</sup> Hal ini merupakan dampak dari ketergantungan Pakistan (dulu) terhadap ekonomi Barat yang menghasilkan sektor swasta tumbuh dengan baik. Sehingga wajar jika Bangladesh lebih mengenal atas kehidupan kapitalis dibanding negara-negara dunia ketiga yang merdeka dan belum tersentuh atas kapitalisme.

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Shahzad Udin, “Privatisasi Di Bangladesh: Munculnya ‘Kapitalisme Keluarga’” (<https://www.academia.edu>; diakses 25 September 2014). Hal. 2.

Problem dalam pembangunan nasional dimulai tepat setelah kemerdekaan (akhir tahun 1971), selain masalah ekonomi terdapat pula masalah pendalaman ideologi dan kontradiksi perbedaan agama di masyarakat yang memicu konflik *grass roots* di Bangladesh. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh sekelompok elite politik guna memperoleh kekuasaan dan menjalankan kepentingannya. Diawali dengan periode Sheikh Mujibur Rahman, seorang pemimpin Partai *Awami League*, yang mengusung kebijakan ekonomi-politik sosialis bagi Bangladesh. Mujibur Rahman memulai program nasionalisasi secara besar-besaran terhadap perusahaan besar dan menengah termasuk industri perusahaan, perdagangan, bank, dan lembaga keuangan. Jumlah keseluruhan perusahaan yang dinasionalisasi oleh negara kurang lebih berjumlah 350 perusahaan.<sup>32</sup>

Di samping itu, Mujib juga melakukan amandemen konstitusi parlemen Bangladesh untuk keempat kalinya. Hal ini berguna untuk memberikan keleluasaan bagi Mujib dalam mempertahankan kekuasaan. Hadirnya Mujib sebagai pemangku kekuasaan pemerintah di Bangladesh pada waktu itu berhasil menggeser posisi negara menjadi *autocratic ones*.<sup>33</sup> *Negara memiliki peran untuk melakukan intervensi dan mengontrol beberapa sektor; seperti perdagangan, sektor jasa, perusahaan industri, pemasokan hasil pertanian, inflasi harga, dan lain sebagainya. Intervensi negara terhadap sektor-sektor penting melahirkan sebuah budaya politik yang disebut sebagai political patronage (patronasi politik). Secara tidak langsung,*

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Mohammad Tanzimuddin Khan, *Op.cit.*, Hal.1.

budaya politik ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan pembangunan di Bangladesh. Orientasi *patron-client* dalam proses pemilihan umum menjadi refleksi senyawa politik seperti kekerasan terhadap pemilih dan menjadi faktor hambatan bagi kaum miskin untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik.<sup>34</sup>

Pada ranah ekonomi juga memunculkan kerakusan oleh kaum elite, ditunjukkan pada tahun 1974, penguasa Partai *Awami League* menunjuk beberapa aktivis politik untuk ikut serta menguasai industri nasional. Industri nasional Bangladesh tidak diolah dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan diolah guna kepentingan suatu kelompok tertentu dan memicu kemunculan penyelundupan penjualan hasil industri ke luar tanpa aliran hasil yang diketahui.

Kehidupan kemiskinan yang termarginalkan dari proses politik menjadi indikator bahwa representasi mereka dalam kancah perpolitikan sangat lemah saat itu. Hal ini membuat permasalahan kemiskinan di Bangladesh tidak terjamah oleh pemerintah dan angka kemiskinan yang semakin terpuruk. Secara umum, ekonomi-politik kemiskinan Bangladesh dapat dilihat menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, tersedianya kesempatan bagi pemilih untuk memilih representasi kaum miskin dalam pemerintahan lokal maupun nasional pada proses pemilihan anggota legislatif; Kedua, terdapat arena mobilisasi politik tingkat lokal yang bertujuan untuk berperan sebagai

---

<sup>34</sup> Asian Development Bank - M.G. Quibria. (Eds), *Rural poverty in Developing Asia Volume 1: Bangladesh, India, and Srilanka*. (Manila: Philippines: Asian Development Bank Publications, 1994), Hal. 173.

kelompok penekan pada wilayah dan sub-wilayah administratif dalam pembuatan keputusan alokatif dan eksekutifnya.<sup>35</sup>

Tidak adanya keterlibatan aktif dari kaum miskin secara langsung dalam politik mengakibatkan kemunculan isu makro ekonomi dan mikro ekonomi di Bangladesh. Makro ekonomi melahirkan sebuah ketimpangan dalam beberapa hal seperti bahan makanan, fiskal, dan standar upah yang didapat. Sedangkan isu pada taraf mikro ekonomi dapat dikarakteristikan seperti pendapatan yang rendah, penyimpanan uang yang rendah, nilai investasi merosot, dan produktivitasnya lebih memadai. Permasalahan ini tidak terlepas dari kebijakan sosialis yang diterapkan oleh pemerintahan Mujib, berakibat pada terhambatnya aliran investasi asing yang masuk ke Bangladesh. Jatuhnya Bangladesh ke dalam rezim sosialis tidak berhenti cukup di sini, keterpurukan sistem politik menjadi *core* permasalahan dan tumbuh menggerogoti hakikat kehidupan demokrasi Bengal.

Januari 1975, *Awami League* melakukan amandemen konstitusi guna membangun satu ruang politik yang hanya memperbolehkan satu bentuk partai dalam presidensial. Sejalan dengan hal tersebut, Mujib membangun partai tunggalnya yang diberi nama *Bangladesh Krishak Sharmik Awami League* (BAKSAL). Partai ini telah membubarkan semua partai yang telah mendukung pemerintahannya dan menerapkan doktrin Mujib sebagai asas tunggal. Kejadian ini merupakan permasalahan yang paling signifikan setelah kemerdekaan

---

<sup>35</sup> Ibid.

Bangladesh dalam meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Kritik dan tuntutan atas kemunduran Muhib dari kursi kekuasaan dimulai tepat saat dia mendirikan BASKAL.

## **B. Reformasi Kebijakan Ekonomi Pembangunan Bangladesh**

Periode pasca kepemimpinan Mujib, Bangladesh mengalami dua pergeseran besar pada pembangunan ekonomi-politik negara. Pada ruang politik, rezim militer pertama di bawah kepemimpinan Mayor Jendral Ziaur Rahman mengadopsi pendekatan kekuatan pergerakan anti Angkatan Laut (AL). Sedangkan pada ruang ekonomi, terjadi pergeseran fundamental pada strategi memperluas sebuah pasar dan struktur pembangunan demi kepuasan kekuatan barat.<sup>36</sup>

Pergeseran kebijakan ekonomi ini dimaksudkan untuk memberi dua tujuan utama, yaitu: Pertama, memastikan bahwa Bangladesh sudah tidak lagi menggunakan rezim ekonomi sosialis yang menutup diri dari lingkungan luar (baca: Dunia); Kedua, kebijakan ekonomi baru pada dasarnya merupakan kumpulan dari tahapan runtut rezim negara untuk memulai reformasi kebijakan ekonomi negara yang disesuaikan terhadap Bank Dunia dan IMF.

Krisis finansial dalam agenda pembangunan ekonomi sering melanda negara-negara pasca kolonial. Hadirnya rezim neoliberal mencoba membantu negara-negara tersebut untuk keluar dari krisis. Akan tetapi, nyatanya upaya penyelamatan tersebut dilanjutkan dengan proses pendalaman integrasi

---

<sup>36</sup> Mohammad Tanzimuddin Khan, *Op.cit.*, Hal. 5.

negara-negara pasca kolonial terhadap rezim ekonomi global.<sup>37</sup> Rezim neoliberal hadir diperkenalkan oleh dua institusi ekonomi besar dunia sebagai kepanjangan tangan dari Amerika, yaitu Bank Dunia dan IMF. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Bangladesh ketika menerapkan Konsensus Washington<sup>38</sup> dalam agenda pembangunan ekonomi yang semakin terbuka. Hal ini jelas dinyatakan dengan keterlibatan awal pemerintahan Bangladesh terhadap penerapan program privatisasi perusahaan di tahun 1975. Reformasi ekonomi di Bangladesh yang merangkul liberalisasi ekonomi dan privatisasi telah mempengaruhi kehidupan perekonomian secara umum.

Kemunduran atas rezim Mujib ditandai dengan pembunuhan atas dirinya pada tahun 1975. Kepemimpinannya banyak menuai protes, dirasa tidak efektif dalam menerapkan ide sosialis dalam kehidupan Bangladesh. Anggaran belanja (*Budget*) negara menjadi membengkak atas aksi nasionalisasi besar-besaran oleh Mujib. Pasca tahun 1975, pemerintah militer baru berkuasa dan membuat perubahan dramatis dalam konstitusi, politik, dan kebijakan negara. Kepemimpinan pemerintah otoriter yang baru ini sangat dipengaruhi

---

<sup>37</sup> Ade Marup Wirasenjaya, “*Strukturasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di negara Pasca-kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 15 No. 3, Maret 2012, Hal. 269-270.

<sup>38</sup> Konsensus Washington diperkenalkan oleh John Williamson pada tahun 1989 untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang yang baru didera krisis.

oleh intervensi Bank Dunia dan IMF yang menggiring pada liberalisasi pasar dan privatisasi. Lembaga donor internasional memiliki pengaruh besar pada kebijakan pemerintah setelah jatuhnya pemerintahan sosialis pertama (tahun 1975–Mujib Rezim). Krisis merupakan hasil dari ketergantungan ekonomi dan kelemahan politik Bangladesh.

Pada periode tahun 1976–1981, kedudukan pemerintahan bergeser pada kekuasaan Jenderal Zia. Keadaan politik di awal kepemimpinannya masih mengalami ketidakstabilan. Mengingat transisi pemerintahan yang bergejolak dan melibatkan banyak aktor. Demokrasi dan kebebasan yang diharapkan oleh rakyat Bangladesh pasca rezim otoriter Mujib belum sepenuhnya tercapai. Dalam perjalanannya memimpin Bangladesh, Zia juga melakukan manipulasi pemilihan umum agar kebijakan pemerintah dapat sejalan dengan kepentingannya. Kepemimpinan Zia dalam ekonomi mengadopsi strategi pembangunan sesuai dengan pemerintahan Ayub Khan saat masih bergabung dengan Pakistan.

Pada sektor kebijakan ekonomi privat, pembangunan Bangladesh lebih menekankan pada orientasi ekspor industrialisasi. Di tahun 1978, Zia membuat sebuah kebijakan baru bagi kehidupan ekonomi Bengal, Investasi Industri, kebijakan yang membawa perubahan dan struktur insentif investasi luar negeri. Dapat dikatakan bahwa ekonomi di bawah kendali Zia merupakan ekonomi yang lebih berbasis asing.<sup>39</sup> Terbukanya kesempatan yang semakin luas bagi investor asing untuk da-

---

<sup>39</sup> Mohammad Tanzimuddin Khan, *Op.cit.*, Hal. 7.

tang berbondong-bondong mengkapitalisasi tanah dan sumber daya Bangladesh.

Periode 80-90-an ini dikenal sebagai arus *Structural Adjustment Programs* (SAPs) sebagai kebijakan yang dirancang oleh Bank Dunia dan IMF terhadap negara-negara berkembang dalam rangka mengintegrasikan negara ke dalam sistem ekonomi internasional. Pada saat yang sama membawa struktur global memasuki Bangladesh. Seperti yang terjadi di Amerika Latin atau yang lebih dikenal sebagai periode “dekade yang hilang bagi Amerika Latin”.<sup>40</sup> Kebijakan neoliberal yang diadopsi oleh negara-negara di Amerika Latin diikuti secara luas oleh negara lain tahun 1980 dan menjadi *mainstream* kebijakan ekonomi-politik pada tahun 1990-an. Hal inilah yang juga diadopsi oleh Bangladesh dalam menata ekonomi-politik pembangunannya. Salah satu tujuan dipilihnya kebijakan neoliberal didasarkan pada upaya kawasan itu untuk membuka pasar internasional serta mendorong proses demokratisasi.<sup>41</sup> Wacana ini bersifat koheren ketika diterapkan pada kondisi ekonomi-politik Bangladesh saat itu. Kekuatan politik yang masih menjurus pada militer atau *autocratics one* dapat dengan segera bergeser sesuai kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Pembahasan kebijakan ekonomi pada pemerintahan Zia, muncul sebuah wacana mengenai pemberian kredit oleh Bank

---

<sup>40</sup> Hoogvelt, 2001 dalam Ade Marup Wirasenjaya, “Strukturasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di negara Pasca-kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 15 No. 3, Maret 2012, 269-270.

<sup>41</sup> Ibid.



Bangladesh yang diberikan kepada kaum miskin guna membantu percepatan pengentasan kemiskinan. Sayangnya, pemerintahan Zia tidak melakukan dukungan finansial terhadap upaya institusi tersebut. Maka, tidak jauh berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya bahwa pemerintahannya tidak melakukan usaha yang serius terkait dengan pemeliharaan dan penyaluran sumber daya domestik guna pembangunan ekonomi terhadap kaum miskin yang keberlanjutan.

Kabar baik bagi kaum miskin kembali datang ketika Zia mengimplementasikan *Two Year Plan* (1978-1980) mengenai pembangunan pada sektor pertanian. Pergerakan mandiri Zia telah direncanakan untuk diimplementasikan oleh sebuah institusi tingkat bawah atau yang disebut dengan pemerintahan daerah—*gram sokar* (dalam Bahasa Bangladesh). *Gram Sokar* diwajibkan bertanggungjawab atas jalannya misi ini dengan harapan kemunculan efek lain, seperti peningkatan produksi pangan, pengurangan tingkat buta huruf, pengurangan tingkat pertumbuhan penduduk, dan fungsi pengendalian keamanan. Kebijakan peningkatan pertanian oleh kaum miskin *grass roots*, sedikit banyak memberikan pengaruh signifikan terhadap kekuatan ekonomi Bangladesh kekinian. Harapan ini mengingatkan kita pada tujuan dari bisnis sosial Muhammad Yunus yang juga diimplementasikan langsung terhadap kaum miskin.

Namun, implementasi kebijakan pertanian menjadi sumber masalah utama dalam keberlanjutannya, karena realitas yang terjadi pertanian hanya didominasi oleh kelompok sosial kelas atas—kaum borjuis—dari pada masyarakat desa

pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa masa kejayaan Zia, liberalisasi ekonomi tidak diikuti oleh liberalisasi politik sehingga memunculkan *developmental state* pada Bangladesh. *Developmental state* diberikan kepada negara yang memiliki pembangunan dengan orientasi akumulasi kapital. Kekuatan kapital global menjadikan negara miskin sebagai mitra dengan memanfaatkan situasi negara-negara miskin. Kekuatan kapital global menjadi negara donor untuk mendorong laju pembangunan di negara-negara mitra.

Dalam bukunya “Globalisasi adalah Mitos”, Grahame Thompson dan Paul Hirst, menjelaskan kegagalan modernisasi pertanian dan pemerataan pembangunan antar daerah dan antar kelompok-kelompok sosial karena sistem liberalisasi, yang pada dasarnya membutuhkan sedikit pemerintahan yang relatif otoriter. Hal ini berguna untuk mengendalikan ketidakpuasan petani dan protes dari para migran yang menganggur saat memasuki kota yang mulai berkembang cepat. Persoalan lainnya adalah pemerintah otoriter, seperti pemerintahan Zia, biasanya tidak menjadi pemerintahan yang “baik”. Pemerintahan oleh elite yang tidak bertanggung jawab, cenderung bersifat korup, melindungi kelompok minoritas (borjuis), dan lebih condong mengeksploitasi pihak yang lemah. Kebijakan pemerintah yang tidak adil akan melanggengkan ketidaksetaraan sosial. Hal ini dapat menghalangi modernisasi dan kemajuan sosial secara luas. Kegagalan tersebut jelas menghambat pertumbuhan, membuat pendapatan penduduknya tetap rendah dan

mengarah pada tersia-sianya modal sumber daya manusia yang tidak tersalurkan.<sup>42</sup>

Di tahun 1982 adanya kudeta kekuasaan atas rezim Zia. Kemenangan selanjutnya diraih oleh Ershad, salah satu tokoh politik yang memimpin kudeta tanpa pertumpahan darah semasa itu. Strategi politik Ershad tidak jauh berbeda dengan strategi politik di masa rezim sebelumnya. Ershad dikenal sebagai pemimpin Bangladesh yang menghancurkan norma-norma demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan hanya demokrasi di ranah politik namun juga berada di seluruh sendi kehidupan. Ambil contoh, di tahun 1988, Ershad melakukan amandemen konstitusi untuk menetapkan Islam sebagai agama negara. Lain kata, membawa Bangladesh sebagai negara Islam.

Dalam kebijakan ekonomi Ershad tetap mengacu dan melanjutkan beberapa program dari pemerintahan sebelumnya. Upaya lain pada kepemimpinan Ershad adalah kemunculan dari *New Industrial Policy* (NIP) di tahun 1982. NIP berfungsi sebagai intensifikasi program privatisasi dan mendukung industrialisasi asing yang masuk ke Bangladesh. Di samping itu, kebijakan lain yang diambil adalah mengikuti bentuk impor liberalisasi dan mengubah struktur insentif terhadap investasi pribadi agar menjadikan ekonomi semakin luas. Pemerintah memberikan bantuan mikro-kredit terhadap pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi salah satu usaha pemerintah melakukan pembangunan ekonomi Bangladesh. Istilah mikro kredit sudah mulai dikenal oleh

---

<sup>42</sup> Grahame Thompson-Paul Hirst, *Globalisasi adalah Mitos* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), Hal. 154-155.

masyarakat dan pemerintah Bangladesh saat itu karena kehadiran Muhammad Yunus yang mem-perkenalkan konsep mikro kredit sudah berjalan jauh sebelum pemerintahan Ershad, tepatnya 1974, sekitar empat tahun setelah kemerdekaannya.

Kebijakan Ershad dalam bidang ekonomi lain yang pantas diberikan apresiasi adalah “*rural development policy*”. Kebijakan ini merupakan salah satu poin dari *Third Five Year Plan* (1985/1986–1989/1990) yang memiliki tujuan guna mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan kesempatan bagi pekerja di ladang maupun non-ladang untuk mengakses teknologi dengan mudah. Pada masa kepemimpin-an Ershad, ekonomi Bangladesh telah mengalami arus liberalisasi yang signifikan, berbanding terbalik dengan nasib politik yang belum mengalami proses liberalisasi.

Kejatuhan rezim Ershad juga dikarenakan adanya dominasi dari salah satu partai yang memprivatisasi kebijakan pertanian dalam sistem produksi dengan mengkapitalisasi pupuk dan pestisida ladang.<sup>43</sup> Kekuasaan Ershad berlangsung selama dua periode kekuasaan, yaitu sejak taun 1982 dan berakhir di tahun 1990.

Dengan berakhirnya rezim Ershad maka berakhir juga masa kelam Bangladesh dalam tekanan rezim politik non-demokrasi. Salah satu institusi asing yang memberikan bantuan kepada Bangladesh, USAID, berpendapat bahwa rezim-rezim sebelumnya telah meninggalkan permasalahan korupsi yang harus diselesaikan segera oleh pemerintahan baru.

---

<sup>43</sup> Mohammad Tanzimuddin Khan , *Op.cit.*, Hal. 11.

### C. Rezim Kapitalis Dalam Demokrasi Baru Bangladesh

Terlepas dari Rezim kepemimpinan Ershad, sekaligus menjadi pertanda kembalinya demokrasi utuh bagi Bangladesh. Sistem ekonomi dan politik akan mengalami perubahan baik dari aspek internal maupun eksternal. Pemilihan umum berlangsung kembali sebagai bentuk euforia masyarakat menyambut kebebasan di bawah pemerintahan sementara yang menjanjikan demokrasi utuh bagi keberlangsungan hidup Bangladesh. Nilai tertinggi dari demokrasi Bangladesh saat itu adalah keterbukaan dan keberpihakan kebijakan pembangunan bagi warga miskin.

Keikutsertaan Bangladesh dalam agenda *Washington Consensus* dapat dilihat dari tekanan IMF dan Bank Dunia yang masuk dan memberikan andil pada setiap keputusan ekonomi-politik Bangladesh. Secara global, agenda politik IMF dan Bank Dunia sekitar tahun 1990-an adalah membantu proses demokratisasi negara-negara dunia ketiga pasca rezim otoriter. Tidak dapat dibantah bahwa tujuan akhir dari agenda tersebut adalah adanya kapitalisasi dan integrasi terhadap ekonomi internasional. Bank Dunia dan IMF mengucurkan pinjaman modal kepada negara berkembang menanggulangi kemiskinan. Tapi, pinjaman tersebut memaksa negara berkembang membuka pintu investasi asing sebagai alat pendorong pembangunan sosial.

Secara umum dapat dilihat bagaimana konstruksi lembaga keuangan dunia, Bank Dunia, dan *Asian Development Bank*, terhadap penyebab kegagalan pemerintah di negara-negara penerima bantuan, termasuk salah satunya adalah Bangladesh.

Tabel 2.1

Gagasan tentang Pemerintahan dari Dua Institusi Ekonomi Utama

Variabel	Bank Dunia	<i>Asian Development Bank</i>
Penyebab kegagalan pemerintah	1. Institusi yang lemah	1. Tiadanya partisipasi, <i>Civil Society</i> , modal sosial
	2. Tiadanya <i>framework</i> legal yang akurat	2. Hukum dan pembangunan
	3. Sistem audit dan finansial yang lemah	3. <i>Corporate Governance</i> dan hubungan yang jelas sektor publik dan swasta
	4. Intervensi yang sewenang-wenang	4. Desentralisasi
	5. Ketidakpastian dalam <i>framework</i> kebijakan	5. Memusatkan fungsi pemerintah pada level nasional
	6. Pembuatan keputusan yang tertutup	

Sumber<sup>44</sup> : Bank Dunia , *Governance and Development*, 1992, dalam Ishihara, “Economic Governance and Performance in Developing Countries”, 2001. Data diolah oleh penulis

<sup>44</sup> Data ini telah diolah oleh penulis atas dasar sebuah jurnal. Baca lengkap: Ade Marup Wirasenjaya, “*Strukturasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di negara Pasca-kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 15 No. 3, Maret 2012, Hal. 277.

Gagasan pembangunan di Bangladesh tidak lepas dari konstruksi yang dibangun dan dijalankan oleh lembaga keuangan internasional. Hal ini berdampak pada penentuan kebijakan ekonomi dalam rezim yang berkuasa di Bangladesh sejak tahun 1991 hingga sekarang. Dimaksudkan khusus oleh pemerintah di tahun 1991, adanya kooptasi terhadap kapitalisme global dengan mencanangkan kebijakan industri yang bertujuan untuk privatisasi secara besar-besaran dan melakukan penghapusan subsidi di sektor *Grameen*, khususnya.

Dalam rentang waktu lima tahun setelahnya (1991–1995), pemerintahan Bangladesh dikuasi oleh rezim Bangladesh *National Party* (BNP). Kekuasaannya berada di tangan dua pemimpin, pertama adalah Zia dan berakhir pada tahun 1994 karena dirinya gagal memenuhi syarat dan kriteria perubahan pemerintah yang demokratis. Dilanjutkan oleh Shiekh Hasina sebagai kepala negara. Dimaksudkan khusus oleh pemerintah di tahun 1991, adanya kooptasi terhadap kapitalisme global dengan mencanangkan kebijakan industri yang bertujuan untuk privatisasi secara besar-besaran dan melakukan penghapusan subsidi di sektor *Grameen*.

Rezim BNP sangat ramah terhadap kapitalisme yang ditawarkan oleh Barat. Di sisi ekonomi, pemerintahan BNP menyatakan komitmen mereka untuk menjalankan program reformasi yang ditentukan oleh IDA dan IMF.<sup>45</sup> Sebagai

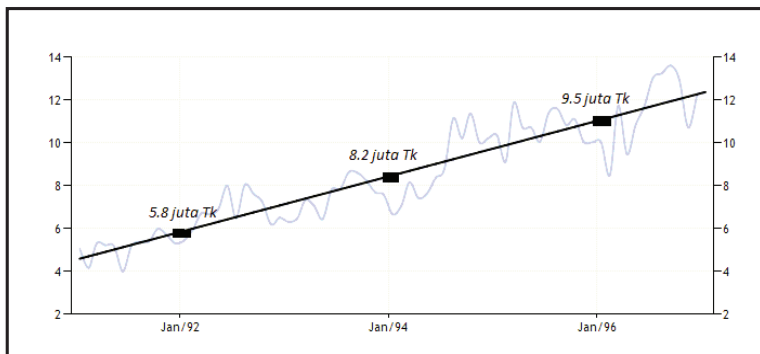
---

<sup>45</sup> Mohammad Tanzimuddin Khan, *Op.cit.*, Hal. 11.

contoh, IMF dan Bank Dunia membantu dalam sektor industri peyesuaian kredit yang menjadi komitmen dalam mitra pembangunan di tahun 1992. Pemerintah akan bergantung pada “sistem usaha bebas” guna mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi. Akibatnya, di bawah kendali negara penyumbang bantuan, Bangladesh selama lima tahun (1991/1992–1996) mengalami kemajuan pesat dalam pelaksanaan reformasi atas liberalisasi perdagangan, privatisasi, kinerja sektoral dan peningkatan efisiensi, promosi ekspor, pertumbuhan FDI, dan mobilisasi sumber daya domestik. Pada grafik 2.1 disajikan data pertumbuhan ekspor Bangladesh selama periode BNP:

Grafik 2.1

Ekspor Bangladesh dalam juta Taka *Bangladesh* (1991/1992–1996)



Sumber: *Trading economics*–*Bangladesh exports* (Taka = Rp 120,-)



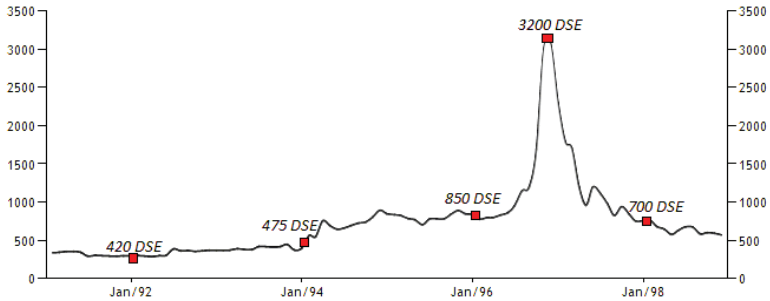
Grafik 2.1 memperlihatkan peningkatan yang cukup stabil pada nilai ekspor di Bangladesh. Pencapaian ini merupakan hasil campur tangan dari pihak negara penyumbang dalam proses percepatan pembangunan ekonomi Bangladesh.

Reformasi sistem ekonomi ini tidak hanya berinduk pada alasan tekanan dari IMF, Bank Dunia, maupun rezim WTO, namun juga karena hubungan yang tumbuh antara sektor bisnis dengan politik. Hubungan antara kedua sektor penting ini memberikan kontribusi terhadap pembukaan ekonomi yang semakin besar. Salah satu motif yang mendorong keterlibatan pengusaha ke dalam kancah perpolitikan karena lambatnya reformasi perdagangan.

Pada tahun 1991, kursi parlemen nasional diisi oleh 94 anggota parlemen berlatar belakang bisnis industri dan sisanya merupakan politisi yang ahli dalam pembuatan kebijakan politis. Konsekuensi logis dari campur tangan ini adalah kemunculan sistem politik yang korup. Dibuktikan dengan partai politik yang lebih mengandalkan kekuatan uang dan pengaruh sosial demi mendapatkan kekuasaan. Maka, ada kecenderungan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh parlemen sifatnya dependen atau keputusan yang hanya menguntungkan pengusaha secara sepihak. Fenomena ini dapat dipahami sebagai sistem ekonomi-politik korporasi di Bangladesh. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat penanaman saham yang mencolok naik pada periode ini

Grafik 2.2

Penanaman Saham Bangladesh 1991 - 1998



Dhaka Stock Exchange (DSE)

Sumber: *Trading economics–stock market* Bangladesh (<http://www.tradingeconomics.com/bangladesh/exports>, diakses 28 September 2014).

Kenaikan drastis saham di tahun 1997 adalah pengaruh dari pembentukan Dewan Privatisasi oleh parlemen Bangladesh di awal tahun 1991. Dewan privatisasi ini memiliki untuk memastikan hasil yang lebih baik dari privatisasi. Dewan ini akan mengontrol apakah perusahaan yang diprivatisasi telah menambah pertumbuhan ekonomi nasional atau hanya sebagai akomodasi kepentingan kaum elite politik.

Apa pun deklarasi kebijakan pembangunan ekonomi di Bangladesh, kinerja pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial terus mencari jalan hingga mencapai sebuah kesejahteraan, terutama dalam stabilitas makro-ekonominya. Dibuktikan dengan adanya kontinuitas kebijakan *fifth five year*

*plan*<sup>46</sup> dalam setiap periode pergantian kepemimpinan. Pada tahun 1999, Presiden Bank Dunia mendatangi Bangladesh untuk melakukan observasi secara langsung dan menilai bahwa pemerintahan Bengal perlu mengurangi permasalahan kemiskinan serta peningkatan kualitas hukum dan situasi sosial guna mencapai titik desentralisasi.

#### **D. Masalah Sosial-Politik dalam Pembangunan di Bangladesh**

Ankie Hoogvelt dalam bukunya *Globalization and The Post Colonial World*, memaparkan bahwa negara-negara pasca kolonial memiliki hubungan yang kurang harmonis antara negara, pasar, dan masyarakatnya.<sup>47</sup> Hal ini praktis menggambarkan keterkaitan hubungan ketiganya di Bangladesh yang juga mengalami ketimpangan.

Banyak masalah yang ditimbulkan atas keputusan-keputusan elite politik terhadap kehidupan rakyat miskin Bangladesh. Ketika pemerintah dan institusi ekonomi global sibuk meneriakkan “*Reformasi ekonomi mengurangi kemiskinan*” di Bangladesh, belum ada bukti yang cukup signifikan untuk setuju dan sejalan atas pernyataan tersebut. Harapan terwu-

---

<sup>46</sup> *Fifth Year Plan* merupakan sebuah rencana yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui akselerasi peningkatan ekonomi di Bangladesh

<sup>47</sup> Angkie Hoogvelt, *Globalization and the Postcolonial world* (London: Palgrave, 2001) dalam *Jurnal Strukturasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di negara Pasca-kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)* oleh Ade Marup Wirasenja.

judnya kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang adil masih jauh dari harapan.

Di sisi lain, beberapa kebijakan *five year plan* membantu Bangladesh dalam peningkatan kapasitas industri dan investasi asing. Pada program *Third Five Year Plan* di bawah kepemimpinan Zia yang menekankan pada pembukaan industri asing, memiliki akibat positif dalam perkembangannya. Namun, terdapat sektor-sektor yang tergerogoti atas berkembangnya industri di Bangladesh. Pertanian atau agrikultur misalnya, sektor ini mendapatkan dampak yang buruk atas kebijakan *second* dan *third five year plan*. Kaum miskin di Bangladesh lebih banyak menggantungkan diri pada kehidupan pertanian. Dapat dilihat pada data berikut mengenai beberapa sektor yang mengalami penurunan akibat kooptasi kebijakan politik pemerintah Bangladesh dengan ekonomi global.

**Tabel 2.2**

Investasi Sektor Publik, 1980–1990 (Tk 1989/1990 prices)

<b>Sectors</b>	<b><i>Second Five Year Plan (1980/1981–1984/1985) Share to total</i></b>	<b><i>Third Five Year Plan (1985/1986–1989/1990) Share to total</i></b>
Pembangunan desa dan pertanian	29.8	21.1
Industri	9.0	11.9
Sumber daya alam dan energi	22.0	23.2
Komunikasi dan transportasi	15.0	12.8

Sectors	<i>Second Five Year Plan (1980/1981-1984/1985) Share to total</i>	<i>Third Five Year Plan (1985/ 1986-1989/1990) Share to total</i>
Sektor perumahan	5.4	3.7
Pendidikan	4.9	3.7
Kesehatan dan kontrol pertumbuhan populasi	5.2	4.9
Infrastruktur ekonomi-sosial	1.3	1.1
Sektor lain	7.7	17.7
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Sumber<sup>48</sup>: *Calculated from Hossain (1990a), p.8*

Sektor-sektor penting mengalami penurunan drastis dalam investasi publik pada tahun-tahun kepemimpinan otoriter di Bangladesh. Adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah, pasar dan kondisi masyarakat mengakibatkan kurang efektifnya proses dan hasil pembangunan yang diharapkan.

---

<sup>48</sup> Baca lengkap di: *Asian Development Bank-M.G. Quibria. (Eds), Rural poverty in Developing Asia Volume 1: Bangladesh, India, and Srilanka. (Manila: Philippines: Asian Development Bank Publications, 1994), Hal. 159.*

Munculnya masalah sosial lain akibat kebijakan pemerintah yang tunduk kepada rezim neoliberal adalah kesetaraan gender, kesenjangan tingkat pendidikan, konflik di tingkat *grass roots*, dan kemiskinan yang semakin mendalam. Kemunculan konflik horizontal sering terjadi di tingkat level masyarakat terendah akibat kemiskinan yang akut. Tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap elite politik sering mengalami pertentangan. Hal inilah yang membuat konflik etnis dan daerah (tingkat bawah) muncul mewarnai kehidupan pembangunan di Bangladesh.

Kaum perempuan di Bangladesh yang bekerja di sektor industri maupun non-industri mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula pada sektor pendidikan, perempuan cenderung berpendidikan lebih rendah. Perempuan (kaum miskin) dianggap tidak memiliki potensi yang cukup baik dalam membantu penyelesaian masalah kemiskinan di Bangladesh. Berbeda dengan pandangan Muhammad Yunus, bahwa kaum wanita memiliki potensi besar dalam proses pengentasan masalah sosial dan kemiskinan di Bangladesh.

Upaya integrasi negara ke dalam sistem ekonomi global tidak mampu membantu mengeluarkan bangsa ini keluar dari kemiskinan selama empat puluh tahun. Dibuktikan dengan perluasan kemiskinan pada tahun-tahun kebijakan ekonomi-politik liberal dirumuskan.

Tabel 2.3  
Perluasan Kemiskinan di Bangladesh

Year	Head-count ratio (per cent)			Number of Poor (million)		
	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1983/1984	59.6	50.2	58.5	50.3	5.6	55.9
1988/1989	59.2	43.9	57.1	54.1	6.2	60.3
1991/1992	61.2	44.9	58.8	58.4	7.2	65.6
1995/1996	56.7	35.0	53.1	57.8	7.1	64.9
1997	46.8	43.4	46.0	45.3	12.9	58.2
1999	44.9	43.3	44.7	42.4	15.4	57.8

Catatan : Catatan tahun 1983/1984 hingga 1995/1996 berdasarkan *Household Expenditure Survei* dan *Poverty Monitoring Survei* pada tahun tahun 1997 dan 1999. Kemiskinan yang berdasarkan pada *Household Expenditure Survey* diperkirakan menggunakan metode biaya dasar kebutuhan (CBN) dan diambil oleh mereka yang tinggal di bawah garis kemiskinan yang sesuai dengan pendapatan 2122 kkal/orang/hari dan tidak memiliki biaya hidup di luar biaya makan. Sedangkan, garis kemiskinan dalam PMS menggunakan metode ukuran kandungan energi makanan – 2122 kkal/orang/hari di area pedesaan dan 2112 kkal/orang/ hari di area perkotaan. Angka kemiskinan telah diambil menggunakan estimasi populasi dan distribusi implisit pada desa-kota dalam perspektif survei.

Sumber<sup>49</sup>: *World Bank* 1998, BBS 1998, 2001.

<sup>49</sup> Dibaca lengkap di: Mustafa K. Mujeri, *Bangladesh: Bringing Poverty Focus in Rural Infrastructure Development*” (*Recovery and Reconstruction*

Data tersebut memperlihatkan bagaimana tingkat kemiskinan semakin meluas dari tahun ke tahun baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Adanya ketimpangan yang terjadi pada peningkatan kemiskinan di tingkat kota (*urban area*) dan desa (*rural area*), hal ini dipicu oleh beberapa faktor, yakni: Pertama, daerah perkotaan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mendapatkan pendapatan lain seperti upah gaji, pembayaran dari luar negeri, gaji sebagai pekerja non-pertanian; Kedua, di daerah pedesaan, kemiskinan ekstrem tidak mampu mendapatkan pendapatan tambahan dari pendapatan pekerja non-pertanian, upah gaji, dan pembayaran uang dari luar negeri dan nilai penyewaan rumah.<sup>50</sup> Sehingga kemiskinan pada *rural area* jauh lebih tinggi dibanding dengan *urban area*.

Pemaparan di atas dapat dijelaskan oleh kaum post-modernis atas kritiknya terhadap hasil pembangunan yang hanya menghasilkan lima bencana menurut mereka, yaitu: *jobless*, *ruthless*, *rootless*, *voiceless*, dan *futureless*.<sup>51</sup> Praktis hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam agenda pembangunan di Bangladesh. Integrasi ekonomi global tidak membawa dampak pembangunan yang diharapkan. Sektor perbankan dan keuangan nasional sebagian besar hanya melayani pengusaha

---

*Department International Labour Office*, Ganeva, November 2002), Hal. 5.

<sup>50</sup> Japan Bank for International Cooperation, “*Poverty Profile People’s Republic of Bangladesh*”. *Executive Summary*, Japan: 2007, Hal. 2.

<sup>51</sup> Diambil dari Bahan Kuliah materi *People Centered Development* pada mata kuliah ‘Teori Pembangunan’ oleh dosen pengampu Bapak Ade Marup Wirasenjaya.



besar tetapi tidak mendorong ekonomi rakyat, seperti kredit usaha kecil atau kredit mikro. Mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang kejam karena semakin menghasilkan kesenjangan yang terjadi antara kaya dan miskin. Sehingga, harapan dan pembangunan saat itu tidak memiliki masa depan yang pasti. Hingga, kemunculan Muhammad Yunus yang mulai dikenal dan dipelajari oleh masyarakat Bangladesh dan dunia mengenai konsep bisnis sosialnya, menjadi harapan cerah bagi kaum miskin di Bangladesh dalam menjalankan roda kehidupan.



## BAGIAN EMPAT

# KORPORASI GLOBAL DAN PEMBANGUNAN BANGLADESH

PASCA perang pembebasan, pada dekade 1979 hingga awal 1980-an eksistensi kapitalisme mulai hadir di Bangladesh.<sup>52</sup> Kontestasi ekonomi dunia mengalami akselerasi di tahun 1980, terlihat sejak angka investasi asing masuk secara tajam dan mempengaruhi pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) negara.<sup>53</sup> Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bank Dunia dalam laporan pertumbuhan GDP di dunia, bahwa di tahun tersebut Bangladesh terlihat mengalami grafik peningkatan yang baik dibandingkan dengan negara berkembang lain. Geo-ekonomi Bangladesh juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan peningkatan ekonomi dan industri.

Pada bab sebelumnya, telah dibahas mengenai kehidupan ekonomi-politik Bangladesh pada awal kemerdekaan hingga

---

<sup>52</sup> Jyoti Rahman, Asif Yusuf. “*Economic growth in Bangladesh: experience and policy priorities*” *Harvard – Jurnal*. (<http://www.hks.harvard.edu>, diakses pada 14 Oktober 2014)

<sup>53</sup> The World Bank. “*GDP growth (annual)*.” (<http://data.worldbank.org>, diakses pada 14 Oktober 2014)

akhir pemerintahan otoriter. Keadaan ekonomi Bangladesh sangat ditentukan oleh konstelasi politik sejak tahun 1971. Politik Bangladesh yang semakin stabil di awal tahun 1980-an menggiring kehidupan ekonomi menjadi lebih baik. Angin demokrasi dan rezim neoliberalisme mulai mewarnai kehidupan ekonomi-politik Bangladesh pada tahun 1980 hingga tahun 1990-an. Terlepas dari hal tersebut, kapitalisme masuk menjadi salah satu instrumen penting dalam agenda pembangunan ekonomi di Bangladesh. Pemerintahan menempatkan kapitalisme sebagai salah satu roda ekonomi dalam mencapai cita-cita pembangunan.

Salah satu representasi dari menguatnya kapitalisme-korporasi—di negara dunia ketiga adalah dengan munculnya *Multinational Corporation* (MNC) yang mendominasi kegiatan ekonomi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Stiglitz, bahwa MNC sebagai aktor primer dalam kegiatan ekonomi di negara berkembang.<sup>54</sup>

Pada bab ini akan berbicara mengenai penetrasi kapitalisme yang terjadi di awal pembangunan hingga terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi oleh korporasi asing. Keterlibatan korporasi asing tidak serta merta menyajikan kehidupan sosial yang timpang, hal ini dikonstruksikan ulang oleh sosok Muhammad Yunus dalam konseptualisasinya pada bisnis sosial. Menjadi barang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai konsep bisnis sosial sebagai bentuk sintesis kapitalis di era globalisasi.

---

<sup>54</sup> Joseph Stiglitz E, *Making Globalization Work* (New York: W.W. Norton & Company, 2007), Hal. 187.

## A. Korporasi di Asia: Posisi dan Peran

Meluasnya jaringan korporasi global di negara-negara berkembang banyak menyisakan cerita kemiskinan yang semakin dalam. Di tahun 1997 misalnya, mukjizat keuangan Asia yang dibanggakan oleh rezim ekonomi global dalam sekejap mengalami kehancuran.

Thailand menjadi tonggak kehancuran ekonomi Asia, kemudian diikuti oleh Malaysia, Indonesia, Korea Selatan, dan Hongkong.<sup>55</sup> Bergeser ke wilayah dunia bagian barat, Afrika. Sebuah benua dengan kekayaan alam melimpah harus menanggung beban kemiskinan mendalam bagi kehidupan rakyatnya. Tak sedikit orang menyebut negara-negara di Afrika sebagai *failed state* atau negara gagal. Kekayaan alam yang dimiliki habis mengalir ke negara-negara pusat. Pengalaman seperti ini menjadi pelajaran atas rezim liberal yang hidup subur di negara berkembang.

Globalisasi menjadi era bagi korporasi asing untuk memiliki tempat di negara berkembang dalam menjalankan misi kapitalnya. Seperti yang dialami beberapa negara berkembang di Asia pada awal pembangunan negara. Pertumbuhan korporasi hebat di tahun 1980 tidak hanya terjadi di Bangladesh, Asia Selatan, namun fenomena ini dapat ditemui di beberapa negara bagian Asia lain, seperti Thailand, Filipina, Indonesia, dan sebagainya. Formasi negara di kawasan Asia sering disebut

---

<sup>55</sup> Ibid., Hal. 65.

para pengkaji hubungan internasional dan studi pembangunan sebagai *development state* atau *state capitalism*.<sup>56</sup>

Mengkaji beberapa fenomena korporasi di Asia menjadi gambaran bagaimana hal yang sama juga terjadi di regional yang lebih sempit, contoh dalam suatu negara. Di tahun 1980, Thailand mencanangkan kebijakan *Export Oriented Industrialization* (EOI) sebagai salah satu bentuk keterlibatannya dalam perdagangan global. Thailand mengalami transformasi bentuk masyarakat agrikultur menjadi masyarakat industri yang lebih maju. Hal ini membuat Thailand memiliki ketergantungan dengan pasar global dalam sektor perdagangan.<sup>57</sup> Aktivitas ekonomi Thailand digerakkan oleh aliran investasi langsung dari fasilitas produksi korporasi-korporasi Jepang yang menggurita di Thailand untuk menghasilkan barang-barang ekspor ke Amerika Serikat. Namun, semakin kekinian kaum industrialis mengalihkan aliran uang tunai mereka dari pabrik-pabrik industri ke investasi *real estate* dan saham yang lebih menggiurkan. Akibat gencarnya investasi dalam bentuk saham dan *real-estate*, aliran investasi asing di Thailand mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak

---

<sup>56</sup> Ade Marup Wirasenjaya, “Strukturasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di negara Pasca-kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 15 No. 3, Maret 2012, Hal. 273.

<sup>57</sup> Jumbala, Prudhisana. *Nation-building and Democratization in Thailand : A Political History*. Bangkok : Chulalongkorn University, Social Research Institute, 1992.

pada kenaikan hutang Thailand, dari \$21 miliar di tahun 1998 menjadi \$89 miliar di tahun 1997.<sup>58</sup>

Pada awal tahun 1997, piramida ekonomi Thailand mulai runtuh. Rasa keprihatinan berubah menjadi rasa kepanikan. Investor asing mulai menarik sahamnya dari Thailand. Kondisi ini yang membuat keadaan ekonomi publik jatuh terpuruk dan menghasilkan ruang kemiskinan pada masyarakat Thailand.<sup>59</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Thailand, Filipina mengalami keadaan eksploitasi tanah subur oleh korporasi asing. Salah satu korporasi dari Amerika Serikat, *the Dole Fruit Company* menguasai tanah yang berkualitas hebat di pulau-pulau Selatan Filipina. Tanah berkualitas ini menghasilkan buah-buahan yang bermutu baik. Hasil dari panen buah-buahan diekspor ke luar negeri, seperti negara-negara di Eropa-Amerika. Pada saat kepemilikan tanah oleh korporasi ini semakin meluas, “mereka” yang miskin harus hidup berdempetan di atas tanah yang kurang baik.

Ironisnya keuntungan atas penjualan ekspor buah Filipina memiliki beban pajak yang sangat rendah. Buah-buahan dibawa ke luar negeri hanya demi memenuhi kantong-kantong para pemilik modal di Amerika Serikat. Di lain sisi, para buruh di pabrik-pabrik industri, sedikit demi sedikit telah tergantikan

---

<sup>58</sup> Laporan Welden Bello, “*The Rise and fall of South Asia’s Economy*,” *The Ecologist* 28 no.1, Januari/Februari 1998, hlm. 9-17; dan Welden Bello, “*The End of The Asian Miracle*,” *The Nation*, 12-19 Januari 1998, hlm. 16-12 dalam David C. Korten, “*The Post-Corporate World*”. *Translated by A. Rahman Zainuddin*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), Hal. 69.

<sup>59</sup> Ibid.

dengan mesin bertenaga bensin. Pada saat yang sama, persaingan mendapatkan pekerjaan semakin meningkat dan upah buruh tidak mengalami kenaikan di *rural area*. Hal ini membuat kemiskinan di pusat kota Manila tampak lebih dalam. Pemandangan “ekstrem” dapat dilihat pada keluarga paling miskin yang harus tinggal berdempetan dengan keluarga yang kekayaannya menonjol, fenomena ini kebanyakan dikendalikan oleh perusahaan asing.<sup>60</sup>

Awal kehadiran perusahaan-perusahaan barat di Asia telah mendahului investasi substitusi impor. Pada awal tahun 1910-an, misalnya beberapa perusahaan “ban” Barat: *Dunlop, Goodyear, United States Rubber* telah melakukan eksploitasinya terhadap bahan baku (karet) di perkebunan karet Malaysia dan Indonesia-Sumatera.<sup>61</sup>

Kemunculan korporasi di negara-negara berkembang Asia menggambarkan posisi mereka yang memang dibutuhkan dalam menopang struktur ekonomi saat itu. Namun, korporasi berkontribusi terhadap ketimpangan masyarakat Asia yang ekstrem. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh beberapa negara di atas bahwa sifat eksploitasi korporasi terhadap kehidupan ekonomi-sosial masyarakat memiliki dampak

---

<sup>60</sup> Laporan lapangan oleh David Werner, “*Newsletter from the Sierra Madre*”, #37, bulan Mei 1998 dalam *The Economist*, 20 September, 1997, hal.17 dalam David C. Korten, “*The Post-Corporate World*”. Translated by A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), Hal. 96-97.

<sup>61</sup> Yoshihara Kunio, “*Kapitalisme Semu Asia Tenggara*”. Translated by A. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1990), Hal. 10.



pembangunan yang buruk. Yoshihara Kunio memberikan gambaran korporasi sebagai reinkarnasi dari kapitalisme yang bekerja di Asia sebagai “kapitalisme komprador”. Kapitalisme palsu yang memosisikan negara (*house country*) sebagai agen industri manufaktur di negaranya sendiri.

Oktopusi korporasi di Asia menggambarkan bagaimana watak korporasi global sebagai roda pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Paul Hirst dan Grahame Thompson dalam bukunya *Globalisasi adalah Mitos* memandang perusahaan asing sebagai aktor yang bersifat eksploitatif dan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional.<sup>62</sup> Dikombinasikan dengan pendapat David C.Korten, seorang intelektual *post-modernis*, menjelaskan bahwa korporasi sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan luar biasa besarnya dan sedikit sekali pertanggung-jawabannya. Watak tatanan dan kepemilikannya terdorong untuk menyita dan melelang modal hidup, demi memperoleh keuntungan sesaat yang cepat dan memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang yang kaya. Tak heran jika di Indonesia, perusahaan pertambangan seperti *PT Barisan Tropical Mining*, *Freeport-McMoran*, dan *Newmont* memeras hasil tambang dan minyak semurah dan secepat mungkin dengan kepedulian yang minimum atas dampak operasi mereka terhadap masyarakat sekitar.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Grahame Thompson - Paul Hirst, *Globalisasi adalah Mitos* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), Hal. 112.

<sup>63</sup> Elizabeth Fuller Collins, *Indonesia Dikhianati* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 270.

Hal yang sama terjadi juga di kawasan Asia Selatan, misalnya seperti yang dapat kita lihat pada apa yang terjadi di India. Negara ini menghadapi ekspansi-ekspansi MNC asing yang luar biasa banyak, khususnya dalam hal pengembangan industri baja, pengeboran minyak, gas, dan kilang. Beberapa korporasi multinasional yang berperan di India antara lain: *British Petroleum*, *Vodafone*, *Ford Motors*, *Samsung*, *Hyundai*, *Reebok*, *General Mills*, dan *Nestle*. Korporasi multinasional ini datang untuk menciptakan pekerjaan dan membantu pertumbuhan ekonomi di India. Namun, disisi lain eksploitasi atas sumber daya yang paling berharga bagi masyarakat India (baca: air) juga dilakukan secara besar-besaran. Air telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan industri bagi para korporasi asing. Akibatnya, sungai, danau, dan perairan minum berada di bawah ancaman dari *arsen* dan racun pencemaran limbah industri. Cukup sederhana digambarkan bahwa pertumbuhan keberhasilan ekonomi India telah mengabaikan salah satu sumber daya utama bagi keberlangsungan hidup masyarakat India.<sup>64</sup>

Kehidupan korporasi asing di regional Asia Selatan yang dikonstruksikan oleh Vandana Shiva, seorang feminis dari India, sebagai sebuah “pembangunan” yang memupuk modal dan perekonomian berdasarkan perdagangan untuk mendapatkan *surplus* atau laba. Bagi Shiva, pembangunan itu hanya menciptakan kemiskinan dan kesengsaraan sebagai unsur-

---

<sup>64</sup> Jo Erickson. “India: The Exploitation Of Natural Resources For Economic Gain.” *Mint Press News*, (<http://www.mintpressnews.com/india>, diakses pada 15 Oktober 2014).

unsur yang harus ada di negara berkembang. Lebih jauh, Shiva memandang bahwa krisis kemiskinan di Asia Selatan timbul karena kekurangan air, pangan, pakan ternak dan bahan bakar yang terus meningkat, akibatnya pembangunan yang timpang dan perusakan ekologi akan terus meningkat.<sup>65</sup> Hal ini yang nanti juga akan ditemui dalam perjalanan agenda pembangunan di Bangladesh.

Pertumbuhan korporasi di Bangladesh memiliki dua peran. Di satu sisi, korporasi sebagai sebuah kebutuhan untuk mempercepat akselerasi pembangunan. Namun, disisi lain pertumbuhan korporasi membuat semakin besarnya ekspansi dan eksploitasi dunia kapitalis di Bangladesh. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Bangladesh harus menyiapkan diri dalam menghadapi serbuan investasi asing. Dari tahun 1980–2000, misalnya, dikatakan bahwa ekonomi Bangladesh dinilai cukup baik dalam melakukan persiapan tahap awal mengundang investor asing untuk menanamkan modal. Hal ini menjadi tonggak pertumbuhan korporasi asing sebagai sokongan utama ekonomi Bangladesh.

## **B. Pertumbuhan Korporasi di Bangladesh**

Bangladesh masuk sebagai kategori negara miskin di dunia maupun regionalnya (baca: Asia Selatan). Kemiskinan di Bangladesh dipicu oleh keterbelakangan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain permasalahan

---

<sup>65</sup> Vandana Shiva, *“Bebas Dari Pembangunan–perempuan, ekologi dan perjuangan hidup di India”*. Translated by Hira Jhamtani, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), Hal. 2.

kemiskinan yang timbul, beragam konflik *grass roots* pun terjadi. Salah satu pemicunya adalah standar kelayakan hidup masyarakat Bangladesh yang masih sangat memprihatinkan. Atas dasar permasalahan ini, integrasi Bangladesh terhadap rezim kapital global menjadi pilihan terbaik bagi pemerintah.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pada tahun 1980 kebijakan ekonomi Bangladesh telah berada pada tataran *New Industry Policy*<sup>66</sup> di tengah kondisi politik yang masih konfliktual. Dibuktikan dengan adanya kebijakan *five year plan* yang terus berlanjut pada setiap periode kepemimpinan negara. Bertepatan dengan dibukanya kebijakan industri oleh pemerintah, di tahun-tahun tersebut (baca: 1980-an) perusahaan-perusahaan Barat atau korporasi-korporasi asing mulai masuk menjabani pasar domestik dan ikut andil dalam mendongkrak ekonomi Bangladesh, terutama pada sektor garmen, manufaktur, dan telekomunikasi.

Proses penetrasi kapitalisme di Bangladesh diawali dengan pembangunan industri garmen Bangladesh pada tahun 1979. Pada awalnya, pemerintah sulit untuk mengakui potensi industri garmen yang dimilikinya. Meskipun demikian, pada tahun 1982 pemerintah mulai memberikan berbagai insentif kepada industri garmen, seperti bebas bea impor mesin industri pendukung produksi garmen, fasilitas gudang, dan insentif tunai.

Sebagai salah satu bukti dukungan dari dunia luar, perusahaan tekstil dan industri garmen Korea Selatan dan negara-

---

<sup>66</sup> Lihat penjelasan lengkap pada BAB II buku ini, Hal.43.

negara industri baru di Asia Timur terlibat dalam operasi di Bangladesh mengenai pelatihan pekerja dan manajer. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, industri garmen Bangladesh telah memberikan hasil yang signifikan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Maka, industri garmen diusulkan kepada badan perlindungan sistem kuota *Ministry of Foreign Affairs* (MFA) di tahun 1986 untuk mendapat lisensi resmi sebagai produksi Bangladesh.<sup>67</sup>

Kurun waktu dekade 1980 hingga 1990-an, pusat gravitasi industri bergeser dari usaha asing kepada produsen asli atau pribumi dan pedagang, yang meningkatkan ekspor kepada pengecer berskala besar dan pasar bermerek di Eropa dan Amerika Utara. Konsumen ini membuat desain baru di markas besarnya (negara pusat) dan menjual produk di bawah *brand* perusahaannya melalui jaringan distribusi mereka di negara-negara dunia lain. Mereka melakukan subkontrak produksi kepada pemasok di negara-negara berkembang, termasuk Bangladesh. Bekerja dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pembeli global membantu beberapa pemasok lokal di Asia (baca: Bangladesh) dan Amerika Latin meningkatkan proses produksinya.<sup>68</sup> Berikut merupakan merek asing ternama yang mempercayakan jasa garmen kepada tenaga industri

---

<sup>67</sup> Khondoker Abdul Mottaleb, “*An Inquiry into the Rapid Growth of the Garment Industry in Bangladesh*”. Article DOI: 10.1086/661218, Tokyo, hal 3-4. (<http://www.jstor.org/>, diakses 15 Oktober 2014).

<sup>68</sup> Ibid.

di Bangladesh, antara lain: H&M, Tesco, Zara, Carrefour, Walmart, dan Tesco.<sup>69</sup>

Kesuksesan Bangladesh dalam mengajak korporasi global untuk masuk menanamkan modalnya terlihat signifikan di tahun 1990 hingga 2000-an. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di tahun 1990-lah, kebijakan ekonomi liberal mulai dicanangkan oleh pemerintah elite. Bangladesh keluar sebagai salah satu negara yang sukses meningkatkan FDI-nya bersama dengan India dan Pakistan di Asia Selatan (lihat **Tabel 3.1**). FDI merupakan salah satu indikator adanya aliran modal asing yang masuk ke negara berkembang berdasarkan pada pertimbangan keuntungan jangka panjang dan tingkat pengaruh yang signifikan oleh investor pada manajemen perusahaan.<sup>70</sup>

**Tabel 3.1**

*FDI Inflows (US \$ Million), 1984–2007*

	1984-1985	1989-1990	1995-1996	1999-2000	2004-2005	2006	2007
South Asia	143	326	2,383	3,968	10,115	25,780	30,620
Bangladesh	-4	2	52	444	653	793	666
India	63	244	1,563	2,877	6,689	19,662	22,950
Maldives	1	5	8	13	12	14	15

<sup>69</sup> Trully Erlynda, “*Permintaan Kenaikan Upah Minimum Buruh Bangladesh oleh H&M: Analisis Hubungan Negara dan Perusahaan*”, Hal. 2.

<sup>70</sup> Prema-chandra Athukorala, “*Trends and Patterns of Foreign Direct Investments in Asia: A Comparative Perspective*”. The Journal of Applied Economic Research. Vol. 3 No.4, 2009 : 365-408, Hal. 366.

	1984-1985	1989-1990	1995-1996	1999-2000	2004-2005	2006	2007
Nepal	1	3	0	2	1	-7	6
Pakistan	51	231	641	421	1,660	4,273	5,33
Srilanka	29	31	116	187	253	480	529

Sumber<sup>71</sup>: *Compiled from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTADT) World Investment database.*

Dalam satu dasawarsa, FDI Bangladesh mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada nilai arus masuknya. Peningkatan investasi asing ini sebagai indikator kuat bagaimana korporasi-korporasi besar dunia mulai masuk membawa seperangkat alat kapital guna melakukan ekspansi ekonomi di Bangladesh. Angka ini menunjukkan perubahan dramatis pada struktur ekonomi pasca kepemimpinan otoriter dan sebagai tanda kebangkitan industri di Bangladesh.

Mengkritisi dari sudut pandang lain, kekuatan Geoekonomi Bangladesh juga memberikan kontribusi positif bagi kemajuan investasi di negeri ini. Adanya perpindahan arus investasi dari China menuju negara-negara alternatif lain yang dinilai memiliki potensi dan peluang cukup bagus bagi korporasi asing. Beberapa negara yang dimaksud adalah: India, Pakistan, Nepal, Malaysia, dan Bangladesh.<sup>72</sup> Bangladesh menarik perhatian para investor asing karena upah buruh murah,

<sup>71</sup> Ibid., Hal. 376.

<sup>72</sup> Diambil dari sebuah laporan McKiynes & Corporate mengenai Apparel, Fashion & Luxury Practice dalam “*Bangladesh’s ready-made garments landscape: The Challenge of growth*”, Hal. 5.

biaya listrik yang sangat rendah, dan keterbukaan pasar oleh pemerintah yang longgar membuat produk manu-faktur dan garmen buatan Bangladesh sangat diminati oleh pengusaha tekstil banyak negara. Selain itu, adanya sumber daya alam (gas dan minyak) menjadi alasan lain bagi nilai jual Bangladesh. Terdapat antusiasme dari negara-negara maju dan korporasinya dalam melakukan investasi (lihat **Diagram 3.1**) baik di bidang pelayanan, perbankan, manufaktur, tekstil, dan sebagainya.

Keadaan pasar buruh yang kompetitif merupakan bentuk konsekuensi dari peralihan kekuatan geoekonomi dari Cina ke Bangladesh.<sup>73</sup> Bangladesh memiliki jaringan pasar yang potensial untuk memasarkan produk asing dengan jumlah penduduk mencapai 130 juta orang. Dalam skala regional, Bangladesh memiliki potensi tinggi dalam mengakses pasar-pasar di Asia Selatan. Bangladesh merupakan salah satu anggota yang sangat berperan dalam *South Asian Association for Regional Co-operation* (SAARC). Asosiasi ini sudah terbentuk sejak tahun 1985, Bangladesh memiliki tujuan yang sejalan dengan SAARC yaitu ingin mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pertukaran budaya di antara anggota-anggotanya.<sup>74</sup> Bangladesh menjadi negara yang paling liberal

---

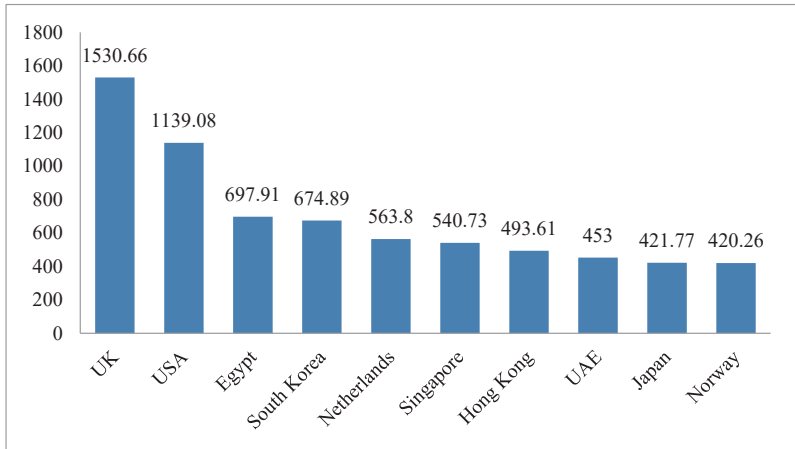
<sup>73</sup> Gosh & Chowdury dalam Trully Erlynda, “*Permintaan Kenaikan Upah Minimum Buruh Bangladesh oleh H&M: Analisis Hubungan Negara dan Perusahaan*”, Hal. 4.

<sup>74</sup> United Nations-International Chamber of Commerce, *The World Business organization “An Investment Guide To Bangladesh – Opportunities and Conditions”*, New York and Ganeva 2000, Hal. 1.



dalam hal ekonomi dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan yang lain.

Diagram 3.1  
Arus Masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Bangladesh  
berdasarkan Negara 1996–2010



■ *in million USD*

Sumber<sup>75</sup>: Board of Investment, Bangladesh

Kontribusi UK di Bangladesh memiliki angka tertinggi, hal ini disebabkan sektor bisnis UK yang masuk mencakup hampir di semua sektor.<sup>76</sup> Ambil contoh, kesehatan,

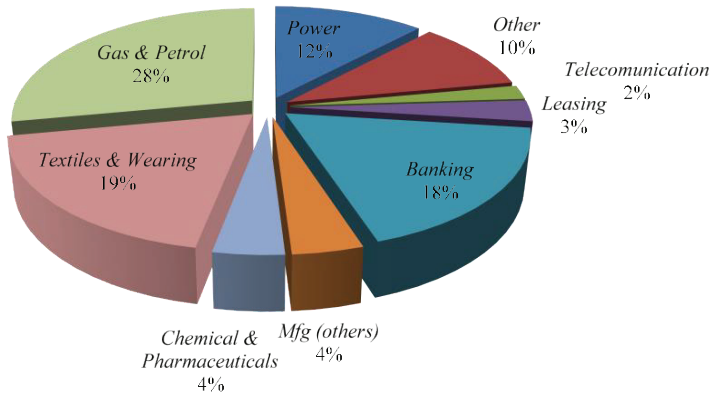
<sup>75</sup> Afsana Rahman, “*Foreign Direct Investment in Bangladesh, Prospect and Challenges, and Its Impact on Economy*”. (A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Professional Master in Banking and Finance, Thailand, 2012), Hal. 11.

<sup>76</sup> Lihat lampiran I dalam buku ini tentang *Investor Luar Negeri Utama di Bangladesh*.

manufaktur, perbankan, eksplorasi minyak-gas, *software*, dan sebagainya. Diikuti oleh USA yang juga memiliki peran besar dalam eksplorasi minyak dan gas Bangladesh. Sumber daya alam, minyak dan gas, memiliki persentase tertinggi dalam menyumbangkan nilai FDI. Contoh korporasi *oil & gas* yang beroperasi di Bangladesh adalah *Shell Bangladesh Exploration & Development B.V* (UK/Netherlands) dan *Uncoal Bangladesh Ltd.* (USA).

Konsekuensi Bangladesh sebagai aktor kapital di era globalisasi diwujudkan dengan membuka pangsa pasar yang luas dan menerima jaringan investasi asing ke dalam negeri. Ekspansi pasar internasional tidak hanya diperkuat pada bidang sumber daya alam dan garmen, melainkan ada beberapa sektor yang ikut mendorong pembangunan ekonomi di Bangladesh. Terdapat tiga sektor yang mendominasi pada dekade awal 1996 hingga 2000-an atas lahan investasi yang tersedia, seperti: *Gas & Petroleum*, Garmen atau *textile*, dan *Banking*. Grafik di bawah ini, melaporkan persentase dari sektor-sektor yang masuk di Bangladesh dalam kurun waktu tertentu.

Diagram 3.2  
 Arus Masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di Bangladesh  
 berdasarkan Sektor 1996-2010



Sumber<sup>77</sup>: *Survey Report, Statistic Department of Bangladesh Bank and Foreign Direct Investment in Bangladesh (1971–2010)*.

Sektor gas-minyak dan garmen menjadi wajar untuk menduduki persentase terbesar. Dengan alasan sumber daya yang dimiliki oleh kedua sektor ini menjadi salah satu bentuk keunggulan Bangladesh. Bergeser pada sektor perbankan yang memiliki peran dalam membantu percepatan peningkatan modal yang dibutuhkan oleh para pebisnis. Peran tersebut didukung oleh negara dalam membantu memberikan “pinjaman” modal demi perputaran uang di Bangladesh.

Awalnya pemerintah Bangladesh telah melakukan identifikasi awal terhadap proyeksi enam belas sektor prioritas. Beberapa sektor proyeksi pemerintah, antara lain: pertanian berbasis industri, elektronik, infrastruktur, minyak dan gas,

<sup>77</sup> Afsana Rahman, *Op.cit.*, 2012, Hal. 10.

software, garmen atau tekstil dan sektor pariwisata.<sup>78</sup> Garmen merupakan sektor paling berpengaruh dalam “ekspor” di Bangladesh.<sup>79</sup> Hal ini dibuktikan dengan laporan dari Kantor Kerja sama Luar Negeri–Ekspor Bangladesh mengenai kontribusi sektor industri garmen terhadap pendapatan ekspor yang semakin meningkat.

**Tabel 3.2**

Pertumbuhan Industri Garmen di Bangladesh

<i>Fiscal Year</i>	<i>Number of Garment Factories</i>	<i>Employment (Million Workers)</i>	<i>Export Value (Billion US \$)</i>	<i>% of Garments in the Country’s Export Earnings</i>
1983 – 1984	134	0,04	0,03	3,9
1987 – 1988	685	0,28	0,43	35,2
1991 – 1992	1,163	0,58	1,18	59,3
1995 – 1996	2,353	1,29	2,55	65,6
1999 – 2000	3,200	1,6	4,35	75,6
2004 – 2005	4,107	2,1	5,17	74,2
2007 – 2008	4,704	2,5	10,7	75,8

Sumber: *Bangladesh Export Promotion Bureau* (2005)

— Sama seperti pemaparan data sebelumnya mengenai arus masuk FDI di Bangladesh yang meningkat mulai tahun 1980-an hingga tahun 2000. Namun, di sini menggambarkan bahwa persentase ekspor Bangladesh didominasi oleh sektor garmen. Tepat pada tahun 1991 angka persentase ekspor garmen minimum di Bangladesh oleh *The M.I Analisis Pembangunan Negara dan Perusahaan*, Hal. 2.

menguasai lebih dari setengah keseluruhan pendapatan ekspor Bangladesh. Korporasi asing yang ikut andil dalam mengolah industri garmen di Bangladesh antara lain *Masse Manufacturing Ltd.* dan *Pfeiffer Apparels (Pvt) Ltd.* berasal dari Hong Kong, China dan *Youngone (CEPZ)Ltd.* berasal dari Republik Korea.<sup>80</sup> Pertumbuhan pabrik garmen bertumbuh signifikansinya dari waktu ke waktu.

Secara statistik berdasarkan indikator pada tabel 3.1 disimpulkan bahwa ekonomi Bangladesh secara makro berhasil ke luar dari keterpurukan. Pembangunan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah melalui *five year plan* menghasilkan angka yang tidak sia-sia. Namun, ironisnya angka ini tidak merepresentasikan keadaan rakyat di pedesaan Bangladesh.

Masyarakat Pedesaan di Bangladesh masih terjerat pada pusaran kemiskinan. Masyarakat Pedesaan masih mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih dan masalah sanitasi. Kedua hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus didapat dilindungi oleh negara. Jeratan kemiskinan tersebut, dapat dilihat pada dekade 1990–2000, ketersediaan air bersih bagi kaum miskin mengalami kenaikan sebesar 1% hingga 2%. Sedangkan masalah sanitasi, hampir tidak terjadi penurunan selama satu dasawarsa (1990–2000), yaitu tetap berada pada angka 67.5 juta rakyat Bangladesh.<sup>81</sup> Miris ketika

---

<sup>80</sup> Lihat lampiran I dalam buku ini tentang *Investor Luar Negeri Utama di Bangladesh*.

<sup>81</sup> *Statistic year book for Asia and the Pasific*; Bangladesh 2012–ESCAP *Statistic Division*. Dipublikasikan oleh Universitas ESCAP, Hal. 6-7.

fakta yang ada berbicara lain dengan suara tuntutan dari kaum kapitalis. Kemiskinan diharuskan untuk tunduk kepada norma yang berlaku pada rezim kapitalis. Sebagai konsekuensi nyata keterlibatan Bangladesh ke dalam percaturan ekonomi global.

Dengan populasi yang setengahnya masih dalam keadaan sangat miskin, pengurangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Dalam menyukseskan pencapaian cita-cita pengentasan masalah sosial-ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sektor privat yang tumbuh pesat di Bangladesh memiliki peran krusial. Bagaimana peran korporasi dituntut untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan malah mengambil alih sumber kekayaan Bangladesh demi memenuhi isi kantong para elite di negara pusat.

### **C. Pergeseran Kekuatan Ekonomi Bangladesh**

Usaha pemerintah Bangladesh dalam “mengundang” investor asing untuk terlibat dalam agenda pembangunan bukanlah suatu tindakan yang dapat disalahkan. Terdapat konsekuensi-konsekuensi logis yang harus di tanggung oleh Bangladesh dalam mengikuti arus liberalisasi. Dikemukakan jelas oleh Vandana Shiva bahwa “pembangunan” dalam arti memupuk modal dan menempatkan perekonomian berdasarkan perdagangan demi menghasilkan “surplus” dan laba, tidak saja menuntut untuk menciptakan kekayaan, tetapi juga untuk menciptakan kemiskinan dan kesengsaraan sebagai unsur-unsur yang harus ada dalam “pembangunan”.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Vandana Shiva, *Op.cit.*, 1997, Hal. 2.

Pembangunan yang diinginkan oleh para elite Bangladesh saat itu membentuk pola pembangunan *economics centris*. Maksudnya, pembangunan dengan ekonomi global yang direncanakan secara terpusat oleh korporasi-korporasi dan melangkah ke depan dengan irama para spekulator uang. Hal ini menjadi tanda kemenangan kapitalisme terhadap pasar.

Masyarakat *rural area* mengalami masalah keuangan yang tak kunjung putus. Kehidupan urban yang semakin hari semakin maju, tidak menyisakan kesejahteraan bagi mereka yang hidup di desa. Meskipun, banyak sumber yang menyatakan bahwa pendapatan per-kapita di Bangladesh meningkat. Di saat yang sama, tingkat keparahan kemiskinan semakin mendalam. Pada dekade 1970, sekitar 70% penerimaan Bangladesh berasal dari ekspor agrikultur yang dikelola sendiri oleh masyarakat pedesaan. Barang produksi tertinggi saat itu adalah yute, selebihnya Bangladesh juga memproduksi padi, teh, dan sawi dalam jumlah signifikan.

Sektor pendapatan terbesar bergeser di tahun 1980, ketika pemerintah mulai membuka pintu pasar bagi investasi asing. Adanya pergeseran dominasi sumber penerimaan bagi GDP Bangladesh. Pergeseran ini terjadi baik dalam sektor industri maupun pelayanan. Sekitar 1,8 juta rakyat Bangladesh berbondong-bondong pindah haluan, dari yang awalnya bertani menjadi buruh di pabrik-pabrik garmen.<sup>83</sup> Berdasarkan jumlah tersebut, 90% adalah wanita dan sisanya kaum laki-

---

<sup>83</sup> Ronald Buerk. “*Bangladesh Garments Aim to Compete*” *BBC NEWS-South Asia-Bangladesh*, (<http://news.bbc.co.uk>, diakses 12 Oktober 2014)

laki. Penguasaan ekspor garmen bisa mencapai tiga seperempat dari total penghasilan ekspor negara (lihat kembali tabel 3.2).

Terlepas dari semakin banyaknya industri manufaktur, layanan, dan pertambangan di Bangladesh, ternyata pendapatan yang diterima per kapita tergolong sangat rendah dan tidak dapat mendongkrak permasalahan kemiskinan yang menggurita. Meskipun pertumbuhan industri Bangladesh memberikan angka kontribusi yang baik bagi peningkatan ekonomi negara, namun rendahnya pendapatan atau upah buruh ini mengakibatkan banyak pekerja tetap hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>84</sup>

Eksplotasi dari para pemilik korporasi terhadap buruh di Bangladesh dan kaum miskin terus terjadi. Bentuk eksploitasi yang terjadi selain upah buruh yang sangat rendah, yaitu jam kerja yang tinggi dan tuntutan atas hasil kerja yang baik walau dalam jumlah banyak. Sedangkan pada kaum miskin di area pedesaan, eksploitasi terjadi dengan tingginya bunga pinjaman dan rumitnya hukum-aturan yang mengatur ketika nasabah ingin meminjam sejumlah uang untuk modal usaha. Hal inilah yang menghambat kesejahteraan kaum miskin di *rural area* Bangladesh.

Mentalitas kapitalisme seperti itu sama halnya dengan kapitalisme yang tumbuh di Asia Tenggara, *ersatz*. Sebuah pertumbuhan kapitalisme yang tidak didasarkan pada perkembangan teknologi memadai, akibatnya tidak terjadi

---

<sup>84</sup> Trully Erlynda, “Permintaan Kenaikan Upah Minimum Buruh Bangladesh oleh H&M: Analisis Hubungan Negara dan Perusahaan”, Hal. 10.



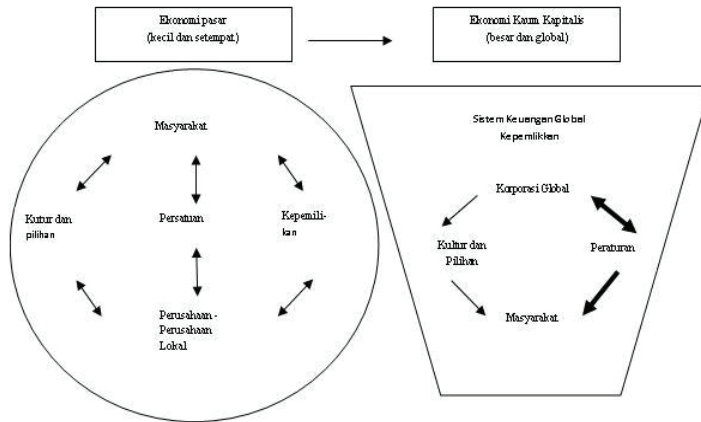
industrialisasi yang mandiri.<sup>85</sup> Ketergantungan dan jerat kemiskinan menjadi jawaban atas pertumbuhan kapitalisme tipe ini. Bencana ekonomi yang dirasakan oleh setiap individu miskin di Bangladesh dimulai saat pindahnya kekuatan ekonomi ke “tangan” asing. Fenomena pergeseran kekuatan ekonomi dapat dipetakan secara kasar menurut David C.Korten, pada gambar 3.1:

---

<sup>85</sup> Amirudin, “*Fundamental Ekonomi Indonesia ‘Ersatz’?*” (Paper presented at Simposium Nasional Mahasiswa Pasca Sarjana Tahun 2008,” 100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Prespektif”, Klaster Ekonomi-politik dan Sosial-Humaniora, Yogyakarta, 16-17 Mei 2008), Hal. 2-3.

Gambar 3.1

Peta Pergeseran Kekuatan Ekonomi



Sumber<sup>86</sup>: David C. Korten dalam bukunya *The Post-Corporate World* (hal 72)

Lingkarannya menggambarkan bagaimana kekuatan ekonomi Bangladesh masih dalam konsolidasi yang sejajar antara masyarakat dengan unsur perekonomian lain. Konteks ini terjadi pada dekade 1940–1970<sup>87</sup>, ketika agrikultur masih memegang peranan penting dalam peningkatan pendapatan ekspor negara. Kekuasaan ekonomi dari gambar tersebut bersifat menyebar secara luas dan melibatkan masyarakat pada setiap aspek ekonomi.

<sup>86</sup> *The Economist*, 20 September, 1997, hal.17 dalam David C. Korten, "The Post-Corporate World". Translated by A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), Hal. 71-73.

<sup>87</sup> Di tahun 1940–1970, Bangladesh masih menjadi salah satu bagian dari Pakistan dan saat itu wilayah Bangladesh dikenal sebagai Pakistan Timur.

Ilustrasi sketsa kanan memperlihatkan kedatangan korporasi global di Bangladesh pada tahun 1980 dan memberikan pengaruh terhadap tatanan kekuatan ekonomi yang berpindah. Masyarakat Bangladesh dituntut untuk tunduk di bawah peraturan, kultur, dan pilihan yang telah disediakan oleh korporasi global. Hadirnya keuangan global dengan mem-bawa modal besar, tidak berarti bahwa hal ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan pendapatan per kapita di Bangladesh.

Pergeseran kekuatan ekonomi ini yang nantinya diten-tang oleh Muhammad Yunus. Bagi Yunus, pembangunan se-layaknya dikembalikan kepada manusia sebagai aktor utama pembangunan. Sehingga, masyarakat desa memiliki keterli-batan langsung dalam proses pembangunan di Bangladesh. Ketika pola ekonomi suatu negara seperti ini maka investasi asing yang terjadi akan bersifat “*gain*”. Jika aliran uang yang masuk ke Bangladesh bersifat *gain*, maka akan sulit berubah menjadi modal permanen yang tumbuh bagi kesejahteraan rakyat Bangladesh.

Pertumbuhan ekonomi di Bangladesh saat investasi asing masuk, tidak menyebabkan kesejahteraan masyarakat me-ningkat secara merata. Terbukti pada perluasan kemiskinan di Bangladesh dalam satu dasawarsa, 1980 hingga 1990, ketika kran kapitalisme mulai dibuka.<sup>88</sup> Pembangunan yang diupaya-kan dengan jalan seperti ini malah melahirkan “bencana pembangunan” yang semakin dalam. Menurut kaum *post-*

---

<sup>88</sup> Lihat penjelasan lengkap pada **Tabel 2.3**, “Perluasan Kemiskinan di Bangladesh” pada BAB II buku ini, Hal. 23.

*modernis*, model pembangunan dengan campur tangan asing hanya menganggap pembangunan sebagai ideologi bu-kan sebuah aksi (*act*).

Peran pembangunan di Bangladesh adalah sebagai *planned social change* dan berakibat pada konsekuensi-konsekuensi berupa teknokratis, efisiensi, dan kesenjangan ekonomi-sosial yang merajalela.<sup>89</sup> Rencana perubahan sosial ini telah dirumuskan oleh pemerintah dan melibatkan peran korpo-rasi asing di dalam prosesnya. Namun, kekuatan ekonomi yang dikendalikan oleh MNC dan perusahaan asing hanya menghasilkan sebuah ketimpangan. Pembangunan timpang berarti melanggar integrasi sistem-sistem organik yang saling berkaitan dan saling bergantung.<sup>90</sup> Dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah kolonialisme baru, yang merampas sumber daya dari tangan mereka yang paling memerlukannya. PBB memaparkan mengenai lima hasil pembangunan dari kaum modernis dalam mengampanyekan keterlibatan asing dalam pembangunan di negara dunia ketiga adalah : *jobless, ruthless, rootless, voiceless, dan futureless*.

Mengkaji beberapa hasil pembangunan sebagai konsekuensi alami dari pergeseran kekuatan ekonomi yang terjadi di Bangladesh, *rootless* dan *futureless*. Pembangunan dianggap gagal dalam menyejahterakan masyarakat miskin di pedesaan Bangladesh. Masih banyak ditemui kemiskinan ekstrem dan kelaparan di berbagai sudut desa. Nilai kehidupan dan

---

<sup>89</sup> Ade Marup Wirasenjaya. Bahan Kuliah “*Teori Pembangunan–Sustainable Development*”, 2013.

<sup>90</sup> Vandana Shiva, *Op.cit.*, 1997, Hal. 7.

kebudayaan masyarakat Bangladesh terampas oleh ketamakan kapitalisme. Desa Jobra menjadi contoh daerah terparah, banyak rakyat yang mati akibat tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya.

Dalam konteks permasalahan *futureless*, masyarakat pedesaan yang terjerat hutang “lintah darat” dan bank-bank konvensional disinyalir tidak akan dapat memberikan posisi kemakmuran bagi mereka. Aturan yang rigid dimainkan oleh perbankan konvensional menutup masa depan si miskin dalam mengembangkan usahanya. Tidak adanya kesempatan yang diberikan kepada kaum miskin dalam mengolah sumber daya alam dan menginvestasikannya demi masa depan.

Keadaan seperti ini banyak dialami oleh kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki di Bangladesh. Perempuan lebih merasakan ketertindasan dan diskriminasi atas hadirnya sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme yang direpresentasikan oleh korporasi dan MNC menuntut mereka untuk kerja lebih keras tanpa imbalan yang sesuai.

Vandana Shiva dalam bukunya *Bebas Dari Pembangunan* memaparkan bahwa kaum perempuan di Asia Selatan paling terpukul oleh adanya krisis kemiskinan, pertama karena mereka yang paling miskin di antara yang termiskin, dan kedua karena bersama alam, mereka berperan selaku penopang utama masyarakat. Menurutnya, yang dinamakan dengan “pembangunan” sekarang ini merupakan sebuah pembangunan yang timpang, yang didasarkan pada penerapan atau

peningkatan dominasi laki-laki atas alam dan perempuan.<sup>91</sup> Hal inilah yang masih melanda perempuan di area pedesaan Bangladesh. Pembangunan semestinya tidak diizinkan untuk menghasilkan sebuah ketimpangan bagi sebagian kelompok atau kalangan. Tidak mengorbankan dan mendiskriminasi satu dengan yang lain.

Konsep penawaran dari Muhammad Yunus atas konsekuensi pembangunan dan perampasan sumber daya alam akan dapat ditangani tanpa merusak hubungan negara dengan para korporasi global.

#### **D. Keluar dari Hegemoni Kapitalisme**

Muncul dengan keprihatinan atas kemiskinan dan permasalahan sosial yang melanda tanah kelahirannya, membuat Bapak mikro-ekonomi dunia ini tergugah untuk berkontribusi dalam pengentasan masalah ekonomi-sosial. Terlahir sebagai seorang profesor ekonomi dari universitas Amerika tidak menghalangi pemikiran liarnya atas kritik kehidupan kapitalis di negara dunia ketiga.

Merujuk pada struktur ekonomi Bangladesh yang berpusat pada kekuatan korporasi seperti pemaparan sebelumnya, Yunus mulai angkat bicara bahwa pembangunan di Bangladesh akan terus bersifat semu, ketika tidak mengalami perubahan. Fenomena kemiskinan di Bangladesh bukan merupakan suatu yang datang dari masyarakat sendiri, melainkan kemiskinan yang diciptakan oleh sebuah sistem yang dibangun.

---

<sup>91</sup> Ibid.

Konsep-konsep ekonomi kerakyatan muncul begitu saja secara spontan ketika mata dan raga menyaksikan langsung atas bencana kemiskinan dan sosial<sup>92</sup> di buminya sendiri. Rasanya teori-teori ekonomi hebat di kalangan akademis sangat sulit diterapkan pada kondisi yang sangat berkecamuk di luar sana (baca: Bangladesh di tahun 1970-an). Keputusan untuk melepas gelar profesor ekonomi dan memilih mendedikasikan dirinya bagi kaum miskin merupakan pilihan yang diambil bagi seorang Muhammad Yunus.

Pada akhir tahun 1970-an, tidak lama setelah Bangladesh mendapatkan kemerdekaannya, Muhammad Yunus tampil pada tingkat *grass roots* untuk membantu penduduk miskin, khususnya di *rural area* (Desa Jobra). Yunus menemukan kehidupan perempuan di Desa Jobra yang sangat menyakitkan. Kehidupan perekonomian mereka berada di tangan para rentenir dengan bunga selangit.<sup>93</sup> Para perempuan sibuk membuat hasil produksi manual, contoh: kursi dari rotan, guna dijual kembali kepada para rentenir dengan harga yang telah ditentukan. Dapat disadari bahwa ini menghasilkan sebuah lingkaran setan yang tak berujung.

Yunus berpikir keras, mengeluarkan segala kemampuannya guna mencari jalan keluar atas kondisi buruk ini. Hingga akhirnya, Yunus merogoh koceknya sendiri dan memberikannya kepada para perempuan rumah tangga untuk

---

<sup>92</sup> Bencana kemiskinan dan sosial yang dimaksudkan adalah bencana kelaparan yang terjadi sangat hebat di Bangladesh pada tahun 1974. Baca *Bisnis Sosial*—Muhammad Yunus dalam bagian pendahuluan.

<sup>93</sup> Lihat Pembahasan selengkapnya pada Bab IV-A dalam buku ini, Hal. 85.

menyelesaikan hutangnya terhadap rentenir. Dengan sedikit uang yang diberikan, kebahagiaan tumbuh di antara kehidupan mereka.

Apa yang dilakukan Yunus di Bangladesh membawa kesimpulan awal atas kemandirian kaum miskin di Desa Jobra, mereka diberi peluang untuk mengelola sumber dana guna mengembangkan keterampilannya. Yunus percaya bahwa setiap orang yang lahir itu memiliki kemampuan berwirausaha, tinggal bagaimana merebut kesempatan dalam mendapatkan sumber kesejahteraan. Namun, keadaan ini kontras dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Justru, pemerintah telah mendatangkan korporasi besar yang disebut-sebut membawa sumber kesejahteraan. Ironisnya, hal tersebut tidak membawa sumber-sumber kesejahteraan bagi kaum miskin, seperti yang didengungkan oleh teori-teori ekonomi dunia. Kaum miskin mengalami diskriminasi atas posisi dan status mereka, sehingga menjadi hal yang mustahil bagi kaum miskin untuk mendapatkan sumber kesejahteraan.

### **E. Sintesis Kapitalisme dan Gerakan Sosial**

Pada akhir perjalanannya, Yunus melahirkan bentuk baru dari kapitalisme. Yunus melakukan sintesis kapitalisme dengan membentuk badan usaha yang diabdikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa-desa Bangladesh. Kapitalisme ditawarkan dalam bentuk baru. Yunus meletakkan manusia untuk menjalankan perannya secara langsung sebagai aktor ekonomi. Konseptualisasi ini kemudian



diwujudkan oleh Yunus dalam berbagai macam bentuk badan usaha, yang secara kompleks dan dikenal dengan bisnis sosial.

Sebuah konseptualisasi bisnis yang mengantarkan pada perubahan mendasar dalam arsitektur perekonomian kapitalis. Sehingga, membawa kapitalisme semakin dekat ke sebuah kerangka kerja yang lengkap dan memuaskan. Adapun tujuh prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad Yunus sebagai inti bisnis sosial, antara lain: Pertama, tujuan bisnis adalah untuk mengatasi kemiskinan atau masalah lain yang mengancam manusia; Kedua, perusahaan berjalan secara berkelanjutan dalam hal finansial dan ekonomi; Ketiga, investor mendapatkan uang kembali sesuai dengan yang diinvestasikannya; Empat, ketika dana yang diinvestasikan dibayarkan kembali, laba tetap diambil oleh perusahaan untuk perluasan dan perbaikan; Lima, perusahaan akan bersikap ramah terhadap lingkungan; Enam, angkatan kerja mendapat upah sesuai pasaran tetapi dengan kondisi kerja di atas standar. Dan yang paling penting adalah kerja dengan senang hati.

Prinsip-prinsip ini menjawab kekhawatiran David Korten yang menyatakan bahwa, “dunia saat ini sedang mengidap tiga krisis mendasar, yaitu: kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan tindakan kekerasan”. Muhammad Yunus berharap agar bisnis sosial ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang dibangun dan mengeluarkan Bangladesh dari jeratan kemiskinan, masalah sosial, dan ketimpangan lainnya.



## BAGIAN LIMA

# **BISNIS SOSIAL: GERAKAN PENJINAKKAN KAPITALISME**

MUHAMMAD YUNUS merasa telah terjadi kekosongan atas nilai-nilai teori ekonomi hebat dunia sejak tahun 1972. Hal ini berdasar pada kondisi rakyat miskin Bangladesh yang sudah tidak pantas untuk dikaji sesuai teori ekonomi Barat. Kehadiran bisnis sosial di tengah hiruk pikuk kemiskinan membawa nafas kehidupan baru bagi rakyat kecil Bangladesh. Telah sedikit disinggung dalam pemaparan sebelumnya, bahwa kehadiran bisnis sosial sebagai tawaran baru di tengah eksistensi kapitalisme yang melakukan eksploitasi terhadap sumber kesejahteraan rakyat.

Pada bab berikut akan dipaparkan mengenai bentuk nyata atas sintesis kapitalisme dan integrasi terhadap aspek-aspek utama pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan oleh Yunus akan berupaya untuk menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberikan bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya,

dan aspek lingkungan hidup.<sup>94</sup> Yunus ingin mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan, maksudnya menggeser titik berat pembangunan dari yang awalnya pembangunan hanya dalam aspek ekonomi menjadi memiliki cakupan pembangunan pada aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup. Kerangka ini akan mewujudkan bentuk baru atas kinerja kapitalisme bagi kaum miskin dan melahirkan pembangunan yang berkelanjutan di Bangladesh.

### **A. Muhammad Yunus: Tokoh di Balik Bisnis Sosial**

Sosok ini mulai dikenal oleh dunia sejak dirinya mendapatkan *Nobel Peace Prize* pada tahun 2006 atas keberhasilannya mengentaskan kemiskinan di Bangladesh. Muhammad Yunus adalah seorang akademisi, profesor lulusan Amerika Serikat dan menjadi dosen ekonomi di Universitas Chittagong, Bangladesh. Yunus tumbuh di tengah didikan orang tua yang keras dan tegas. Yunus mengakui bahwa ibunyalah yang memberikan pengaruh kuat terhadap dirinya dalam menjalankan konsep bisnis sosial. Penuh rasa iba dan baik hati, ibu selalu memberi uang pada setiap kerabat miskin, perhatiannya kepada kaum miskin menjadi salah satu jalan Yunus menemukan minat pada ilmu ekonomi dan perubahan sosial.<sup>95</sup> Yunus adalah seorang Dekan Fakultas Ekonomi yang sangat terbuka dengan siapa pun, tidak ada kelas yang dia bangun dengan sesama pengajar ataupun mahasiswa. Muhammad

---

<sup>94</sup> A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002), Hal. 168.

<sup>95</sup> Muhammad Yunus, “*Bank Kaum Miskin*”, Marjin Kiri, 2007, hal.7.

Yunus dikenal sebagai seorang dosen yang tegas, disiplin, dan sangat kritis dalam menghadapi berbagai isu sosial.

Yunus menjadi pengajar di sebuah universitas ternama di Bangladesh. Sebagai intelektual yang pernah mengenyam pendidikan di negara Barat, Yunus sangat akrab dengan teori-teori besar tentang ekonomi dan pembangunan dunia ketiga. Akan tetapi, Yunus menemukan sebuah paradigma ketika apa yang ia dapat secara teoritis tidak menemukan korespondensinya dengan kegiatan sosial yang ia temui sehari-hari di Bangladesh. Ada semacam “Menara Gading” yang dirasakan oleh Yunus ketika melihat kontradiksi tersebut. Ditahun 1974, terjadi bencana kelaparan yang hebat dan berkepanjangan, banyaknya korban yang mati secara perlahan di sudut tepian jalan setiap harinya. Banyak orang terdiam dan terkesan tutup mata atas kejadian ini. Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Muhammad Yunus untuk keluar dari dunia akademisnya dan mendedikasikan diri menjadi seorang aktivis sosial, tepat pada tahun 1974 ketika keresahan Muhammad Yunus semakin memuncak.

Fenomena jeratan atas lingkaran kemiskinan juga menjadi alasan kegeraman Yunus atas sistem ekonomi yang bekerja di luar sana. Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang mengenai nasib para wanita miskin di Desa Jobra, mereka harus meminjam modal sebesar 5 Taka dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Hal ini membuat Muhammad Yunus memandang bahwa hidup mati seseorang hanya ditentukan oleh sejumlah “recehan”, sekeras apa pun dia bekerja, sampai kapan pun tidak pernah keluar dari kemiskinan. Pasca hengkangnya

dari dunia akademis, Yunus mulai merintis pendirian bank-bank untuk kaum miskin di Bangladesh. Bank yang lahir dari sebuah gagasan bentuk baru kapitalisme dan sebuah bentuk badan usaha baru yang didasarkan pada kepedulian terhadap sesama.

Gebrakan atas apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus tidak lepas dari pandangan dunia terhadap dirinya. Terlebih ketika Yunus berhasil mendapatkan Nobel *Prize* di tahun 2006, lahirnya pro-kontra atau kontroversi atas pemikirannya masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Salah satu NGO yang berasal dari Norwegia membuat sebuah cuplikan film pendek mengenai kritikan atas *Grameen Bank* kepada kaum miskin di Bangladesh dengan judul “*Grameen Voices*”. Zobeda Begum, salah seorang aplikator *Grameen Bank* dalam film tersebut menyuarakan bahwa “Kaum miskin tidak mendapat manfaat apa pun dari *Grameen Bank*, karena keuntungan dari uang pinjaman tersebut harus kami bayarkan kembali sebagai cicilan kepada *Grameen Bank*. Berbeda dengan NGO yang hadir, mereka akan memberikan fasilitas yang lebih banyak. Sudah jelas, *Grameen Bank* tidak menyediakan layanan apa pun kecuali pinjaman.”<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> “*Grameen Voices*” (<https://www.youtube.com> , diakses 22 Desember, 2014)  
“*Grameen Voice*”, A film by Shahjahan Siraj. In the beginning of 2011, a Norwegian documentary called *The Micro Devt* spread around the world. The Film was one of the first who took a critical look at Micro Credit. According to Muhammad Yunus, it was the film that led to his fall.

Di tengah kecaman dan tekanan atas aksinya, Muhammad Yunus tetap percaya atas apa yang dilakukannya adalah benar. Diakui oleh Koran Tempo dalam kutipannya pada buku Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, yang menyatakan bahwa keberanian Yunus mengatasi kemiskinan lewat *micro-credit* membongkar sekian banyak kepalsuan yang puluhan tahun tersembunyi di balik berbagai institusi yang menjadi biang kemiskinan. Karena keberhasilan dari *Grameen Bank* ini dapat mengantarkan Yunus membangun bisnis sosial dan dirasakan manfaatnya oleh banyak kalangan.

## **B. Kapitalisme, Yunus, dan Kaum Miskin**

Proteksionisme ekonomi, subsidi, dan tunjangan kesejahteraan dilembagakan oleh orang-orang yang bermaksud untuk melunakkan sisi keras kapitalisme.<sup>97</sup> Inilah yang biasa dilakukan oleh negara berkembang di dunia, berbeda dengan langkah Muhammad Yunus dalam melunakkan sisi keras kapitalisme. Yunus mencoba untuk mengolaborasikannya dengan sistem ekonomi dan nilai-nilai kehidupan setempat. Hakikatnya, Yunus memandang kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang tidak salah dan tidak buruk (seutuhnya). Filantropi, pasar bebas, kegiatan ekonomi secara privat, dan mencari keuntungan secara maksimal, merupakan macam kegiatan kapitalisme dan masih dianggap wajar sebagai rutinitas kegiatan ekonomi.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2007, Hal. 199.

<sup>98</sup> Muhammad Yunus *on Capitalism* (<http://www.youtube.com/watch?v=3YTNRYR10YPw>, diakses pada Oktober, 2014)

Bagi Muhammad Yunus, globalisasi yang digadagadag sebagai media penyebaran kapitalis, merupakan jalan untuk mendapatkan banyak keuntungan dari proses penetrasi itu sendiri. Seperti mobilisasi MNC, korporasi atau perusahaan asing ke negara-negara berkembang. Namun, globalisasi dalam beberapa kasus berperan sebagai *imperealisme finansial*, maksudnya sebuah tindakan yang hanya masuk dan menjajah secara finansial tanpa adanya proses pembangunan yang berkelanjutan.

Yunus bukanlah seorang kapitalis dalam pengertian simplikasi seperti yang dipahami kaum kiri dan kaum kanan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial lain, Yunus menentang atas tunjangan yang diberikan oleh korporasi asing atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai jawaban terhadap masalah kemiskinan. Kaum miskin yang secara fisik sehat tidak membutuhkan tunjangan “sesaat”, melainkan mereka lebih membutuhkan modal untuk mengakses sumber kesejahteraan. Konsep ini hanya akan tetap melanggengkan sifat kapitalisme yang eksploitatif, merampas insentif kaum miskin atas kekayaan alam dan membatasi mereka dalam mengembangkan kemampuan diri.<sup>99</sup>

Konsep bisnis sosial yang ditawarkan oleh Yunus bersifat *hibrida*. Maksudnya, sebagian mengambil sisi baik dari kapitalisme dan sebagian lain tetap melestarikan sistem sosial-ekonomi sesuai budaya pada masyarakat setempat, Bangladesh. Yunus percaya bahwa dalam menganut kapitalisme secara utuh

---

<sup>99</sup> “*Micro credit and Grameen Bank*” *New Internationalist People, Ideas, and Action for Global Justice*, (<http://newint.org/>, diakses 30 Oktober 2014)



tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar hanya akan menghasilkan sebuah sistem yang pincang.

Tubuh kapitalisme menurut Yunus terdapat bagian yang hilang. Hal ini yang menjadi momok kerusakan kinerja kapitalisme dalam menghadapi berbagai macam situasi kehidupan di setiap tingkatan masyarakat. Muhammad Yunus menyebutnya sebagai *incomplete capitalism*. Produk-produk bisnis sosial yang ditawarkan menjadi barang nyata atas bentuk pergeseran dari *incomplete capitalism* menjadi *complete capitalism*.<sup>100</sup> Kapitalisme yang “cacat” dapat diperbaiki dan dikembangkan kembali, sehingga kapitalisme dapat berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan.

Ciri kapitalisme yang digambarkan pada buku *Bank Kaum Miskin* oleh Muhammad Yunus adalah memaksimalkan laba dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang langka secara optimal. Inilah ciri kapitalisme yang menggiring konstruksi pikiran kita terhadap sesuatu yang tamak dalam upayanya mendapatkan laba. Akibatnya, muncul pandangan dari masyarakat miskin bahwa orang yang berorientasi laba tidak memiliki kepentingan dalam pencapaian tujuan-tujuan sosial.

Hal ini membuat eksistensi kapitalisme di Bangladesh diragukan oleh Yunus dalam menyelesaikan masalah kemiskinan maupun sosial. Kelemahan mendasar dari teori kapitalisme menurut Yunus terletak dalam penjabarannya mengenai ciri dasar manusia. Kapitalisme menjabarkan

---

<sup>100</sup> “Muhammad Yunus on Capitalism” (<http://www.youtube.com/>, diakses pada 26 Oktober, 2014)

manusia sebagai makhluk satu dimensi dengan tujuan tunggal, yaitu memaksimalkan keuntungan. Manusia dianggap oleh kaum kapitalis, sebagai individu yang hanya mengejar ekonomi dan kesejahteraan materi. Yunus berpendapat bahwa manusia bukanlah robot pencetak uang. Akan tetapi, manusia merupakan makhluk yang berdimensi banyak. Kebahagiaan manusia dan masyarakat secara umum tidak hanya datang dari orientasi uang.<sup>101</sup> Masyarakat miskin di desa-desa Bangladesh, misalnya, Yunus menempatkan mereka sebagai agen bisnis sosial yang memiliki peran ganda. Mencari keuntungan sekaligus menjalankan peran bisnis sebagai makhluk sosial.

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi semua negara berkembang adalah kemiskinan dari sebagian besar rakyatnya, tidak terkecuali Bangladesh. Untuk mengatasi masalah besar ini, menjalankan pembangunan ekonomi menjadi sebuah keharusan. Namun, pemahaman atas kemiskinan yang cenderung memfokuskan pada material-ekonomi harus dihilangkan. Kemiskinan itu mempunyai dimensi yang lebih luas. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehidupan yang memiliki banyak wajah. Bencana ini harus didekati dari berbagai sudut, dan tidak ada pendekatan yang dapat dianggap lebih penting dari pendekatan yang lain.<sup>102</sup> Kemampuan manusia harus dapat dikembangkan dan

---

<sup>101</sup> Muhammad Yunus, *“Bisnis Sosial–Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin”*. Translated by Alex Tri Kantjono, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. xix.

<sup>102</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2007, Hal. 57.

ditingkatkan agar tekanan kepada sumber daya alam dalam mengatasi kemiskinan dapat diperkecil.

Konsep *sustainable development* hadir dan menawarkan penjelasan yang sesuai dan tepat terhadap penjabaran kondisi di atas. Konsep ini, menunjukkan adanya kekeliruan dalam memosisikan manusia dan pola pembangunannya. Pembangunan ekonomi kapitalis hanya berorientasi pada perbaikan standar kehidupan, khususnya standar material. Tercapainya kesejahteraan material seakan menjadi hal utama bagi hidup manusia. Aspek-aspek lain dari kesejahteraan manusia, seperti kemajuan budaya, spiritual, dan estetika, tidak diperhitungkan sama sekali, hanya uang, materi, dan kemewahan sebagai orientasi utama. Padahal, jalan untuk mendapatkannya adalah dengan menguras habis kekayaan alam yang ada dan mereduksinya semata-mata sebagai nilai ekonomis.<sup>103</sup> Hal ini menjadi suatu kekeroposan dalam tubuh kapitalis yang diamati oleh Yunus di Bangladesh.

Tidak menjadi sebuah masalah ketika sistem kapitalis menuntut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pengolahan sumber daya alam. Ambil contoh, korporasi asing seperti *Shell Bangladesh Exploration & Development B.V* yang melakukan eksploitasi terhadap tambang minyak dan gas di Bangladesh, kemudian dijual kembali di pasar global. Namun, tindakan ini harus diperhitungkan nilai-nilai ekologisnya. Yunus sepakat dengan konsep *sustainable development*, bahwa dalam melakukan pengolahan sumber

---

<sup>103</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal. 171-172.

daya demi memenuhi kesejahteraan sekelompok orang jangan sampai malah mengorbankan nilai-nilai yang lebih mahal.

Berangkat dari pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, Yunus mencetuskan bisnis sosial sebagai bentuk nyata atas pemikirannya mengenai sintesis kapitalisme. Bisnis sosial membuka diri atas kedatangan modal-modal dari perusahaan asing yang masuk ke Bangladesh dan memberikan kesempatan kepada kaum miskin sebagai aktor utama penggiat pembangunan di Bangladesh untuk mengelolanya. Dalam menjalankan agenda pembangunan, Muhammad Yunus memberikan jangkauan tegas atas pelaksanaan pembangunan yang bersifat berkelanjutan dan tidak eksploitatif. Ini menjadi agenda besar dalam revolusi pembangunan di Bangladesh yang dicetuskan oleh Yunus.

Dalam *World Summit 2005* menyebutkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan. Ketiga dimensi ini saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.<sup>104</sup>

Di lain sisi, Muhammad Yunus percaya pada tesis pokok kapitalisme, menyatakan bahwa sistem ekonomi yang berlangsung diharuskan bersifat kompetitif. Kapitalisme yang kompetitif melahirkan sebuah persaingan, yang diartikan

---

<sup>104</sup> Lingkup dan Definisi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) (<http://www.forexbroker.web.id/>, diakses 30 Oktober 2014)

sebagai kekuatan penggerak seluruh inovasi, perubahan teknologi, dan perbaikan manajemen. Tesis pokok kapitalisme ini akan digunakan oleh Yunus dalam menggerakkan semangat kewirausahaan bagi kaum miskin di Bangladesh.

Muhammad Yunus kemudian mengajukan dua perubahan terhadap ciri mendasar kapitalisme, yakni: Pertama, terkait dengan gambaran masyarakat terhadap seorang pengusaha kapitalis. Bagi Yunus, seorang pengusaha bukanlah seseorang yang memiliki bakat khusus. Rumusan Yunus adalah semua orang–manusia–adalah pengusaha potensial; Kedua, keharusan bagi seorang pengusaha untuk mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan sekitar sebelum melakukan investasi di sebuah tempat. Diharapkan agar nilai investasi dari perusahaan mereka akan memiliki sifat kontinuitas.

Integrasi ekonomi Bangladesh terhadap ekonomi global tidak disalahkan oleh Yunus seutuhnya. Hal tersebut dianggap wajar sebagai salah satu bentuk perilaku negara dalam kehidupan global. Namun, sangat disayangkan bahwa “pola” ini membawa Bangladesh semakin berada pada keadaan kemiskinan ekstrem. Agenda-agenda yang dijanjikan tidak menghasilkan mimpi-mimpi kemakmuran nyata.

Yunus percaya bahwa manusia sebagai makhluk individu dapat menyelesaikan permasalahan dirinya maupun sekitar ketika mendapat porsi untuk ikut serta dalam pengolahan sumber kapital. Setiap individu di dunia memiliki potensi dan hak untuk hidup layak, bahkan bagi masyarakat termiskin

dari orang-orang miskin.<sup>105</sup> Dalam pandangannya, Yunus tidak mempersoalkan aliran modal dari para pemilik uang atau korporasi asing ke Bangladesh, namun agenda-agenda pembangunan tidak selayaknya berpusat pada aturan-hukum korporasi. Muhammad Yunus merumuskan bahwa sejatinya, kapital atau modal adalah “teman” dari kaum miskin dan akumulasi kapital yang berasal dari kaum miskin merupakan cara terbaik untuk melarikan diri dari kemiskinan.

### C. *Grameen Bank*: Pembangunan yang Berkelanjutan

Konsep pembangunan atau lebih tepatnya program pengentasan kemiskinan harus didefinisikan kembali. Pembangunan yang selama ini dipraktikkan oleh dunia kapitalis jelas tidak menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka, Yunus melakukan redefinisi terhadap pembangunan yang dimanifestasikan dalam bentuk *Grameen Bank*. Pembangunan dalam konteks *Grameen Bank* adalah sebuah proses perubahan sosial-politik-ekonomi yang kompleks, bagian yang satu tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain.<sup>106</sup>

*Grameen Bank* didirikan sebagai perwujudan nyata atas konseptualisasi bisnis sosial. Pada awalnya, *Grameen Bank* terbentuk dari sebuah langkah sederhana Muhammad Yunus dalam membebaskan kaum miskin–perempuan–atas lilitan hutang kepada lintah darat di Desa Jobra. Yunus dikejutkan

---

<sup>105</sup> “The Nobel Prize for 2006 to Muhammad Yunus and Grameen Bank–Press Release”. *Nobelprize.org*. Nobel Media AB 2014. (<http://www.nobelprize.org>, diakses 24 Oktober 2014)

<sup>106</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2007, Hal xiv.

dengan fakta 42 perempuan rumah tangga yang meminjam modal sebesar 5 Taka (atau sekitar 7 sen Dolar Amerika) dari para lintah darat.<sup>107</sup> Mereka menggunakan uang tersebut guna membeli bambu, yang kemudian mereka anyam hingga menjadi kursi siap jual. Suku bunga atas pinjaman kecil seperti ini sangat tinggi, mencapai 10% per minggu. Keadaan yang lebih buruk terjadi ketika hasil produksi bambu tersebut harus dijual kepada lintah darat dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pembeli.<sup>108</sup>

Fenomena ini dilihat sebagai sebuah “lingkaran setan” yang memaksa kaum miskin untuk tetap berada di bawah kendali para pemilik modal. Yunus melakukan sebuah perubahan aksi kecil yang diwujudkan dengan pemberian uang kepada para peminjam modal (42 perempuan rumah tangga di Desa Jobra) untuk melunasi hutang. Kegembiraan tercipta di Desa Jobra sesaat setelah aksi kecil yang dilakukan oleh Yunus. Langkah kecil seperti ini bisa mengubah keadaan yang awalnya suram menjadi harapan. Dari sinilah, Yunus terdorong untuk melakukan suatu perubahan yang lebih banyak.

Kaum miskin, terutama perempuan di Bangladesh telah berada jauh dari sumber-sumber kesejahteraan. Akses kaum perempuan terhadap modal di negara-negara berkembang lebih sempit dibanding dengan laki-laki. Meski demikian, perempuan tetap berurusan dengan kebutuhan keluarga sehari-

---

<sup>107</sup> David O. Beim, *Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor*. Chazen Web Journal of International Buisness, Spring 2004, Hal. 2.

<sup>108</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2011, Hal. x.

hari.<sup>109</sup> Mereka bekerja sebagai budak dari para lintah darat untuk tetap bertahan hidup. Apakah ini keberhasilan sistem kapitalis yang dibanggakan? Korporasi asing – perbankan global telah menolak untuk memberikan dana suntikkan atau pinjaman modal kepada kaum miskin. Apakah hanya orang atau kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan perlakuan istimewa dari negara dalam proses pembangunan, khususnya dalam mendapatkan peluang dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi?<sup>110</sup> Di sini Yunus merumuskan jalan tengah, bisnis sosial, bagi penyelamatan para kaum miskin Bangladesh di tengah hiruk pikuk ekonomi kapitalis di tingkat nasional maupun global. Nobel *Prize* telah mengakui atas kesuksesan kredit mikro Muhammad Yunus yang menjadi kekuatan baru dalam pembebasan masyarakat, khususnya perempuan, dalam berjuang melawan kondisi sosial dan ekonomi yang represif.<sup>111</sup>

*Grameen Bank* sebagai langkah awal dari bisnis sosial dijalankan sesuai dengan tiga prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip keberlanjutan. Aspek pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup hanya mungkin dicapai jika ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik

---

<sup>109</sup> *Review by The Times*, “Credit, Shared Human Right” 27 November 1998. Hal. 5, (<http://www.grameen-info.org/index>, diakses 30 Oktober 2014.)

<sup>110</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal 178.

<sup>111</sup> “The Nobel Prize for 2006 to Muhammad Yunus and Grameen Bank—Press Release.” *Nobelprize.org*. Nobel Media AB 2014, (<http://www.nobelprize.org>, diakses 24 Oktober 2014)



pembangunan.<sup>112</sup> Pertama, prinsip demokrasi, agenda utama pembangunannya merupakan agenda rakyat demi kepentingan rakyat. Inilah yang menjadi dasar *Grameen Bank* bekerja, bahwa kepemilikan saham, peminjaman uang, dan berputarnya uang semua dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat miskin di Bangladesh. *Deviden* dari *Grameen Bank* juga akan dimanfaatkan guna pengembangan usaha *Grameen* itu untuk kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, prinsip keadilan, prinsip ini pada dasarnya ingin menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif, serta ikut dalam menikmati hasil pembangunan. Pada awalnya, masyarakat miskin di desa-desa di Bangladesh tidak memiliki akses yang baik dalam menikmati hasil pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah pusat. Mereka berada dalam posisi yang termarginalisasi terutama oleh bank-bank konvensional pemegang modal. Dalam kaitan dengan hal ini, tindakan politik afirmatif diperlukan guna membantu kelompok masyarakat yang tidak mempunyai peluang dan akses yang sama, karena terpencil, kurang prasarana, kurang pendidikan, dan sebagainya. Demikian pula, harus ada tindakan politik afirmatif bagi kelompok tertentu, khususnya kelompok perempuan yang mungkin menjadi rentan akibat dampak dari proses pembangunan, termasuk dampak lingkungan hidup.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal. 177.

<sup>113</sup> Vandana Shiva, “*Bebas Dari Pembangunan-perempuan, ekologi dan perjuangan hidup di India*”. Translated by Hira Jhamtani, (Jakarta:

*Grameen Bank* diinisiasi guna menjembatani persoalan tersebut. *Grameen* berarti desa, Yunus memberi nama bank ini sebagai “Bank Desa”. *Grameen Bank* dibentuk guna melayani masyarakat kecil, khususnya perempuan dalam mendapatkan pinjaman modal berupa mikro kredit dengan lebih mudah, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, Bank Kaum Miskin ini juga membantu masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil atau termarginalisasi oleh keberadaan perbankan asing, karena faktor kemiskinannya dalam mendapatkan pinjaman.

Cara kerja *Grameen Bank* berbeda dengan perbankan konvensional. *Grameen Bank* memberikan pinjaman tanpa beban agunan dari peminjam (kaum miskin).<sup>114</sup> Administrasi yang diisyaratkan oleh *Grameen Bank* tidak serumit seperti bank-bank biasanya. *Grameen Bank* bekerja menyesuaikan dengan keadaan kaum miskin. Mayoritas penduduk pedesaan masih mengalami tingkat kebutaan huruf yang tinggi, mereka mendapati kesulitan dalam mengisi formulir pinjaman atau penyeteroran seperti yang terjadi di bank konvensional. Di *Grameen Bank* kaum miskin tidak diharuskan mengisi administrasi secara tertulis, karena hal ini akan dilakukan oleh pekerja *Grameen Bank* dalam proses pencatatannya. Selain itu, bunga yang diberikan sangat rendah (mendekati 0%) dan dikembalikan dalam kurun waktu yang lama.

---

Yayasan Obor Indonesia, 1997), Hal. 7.

<sup>114</sup> Dwi Mudianingsih, “Pemberdayaan Masyarakat dan Wirausaha–Cara Kreatif Gali Potensi Bisnis”, *Republika*, 17 September 2014, (<http://www.republika.co.id/>, diakses 30 Oktober 2014)

Kemudahan lain dari Gramenn Bank adalah jasa bank yang datang kepada setiap nasabah, bukan nasabah yang datang ke Bank. Hal ini berdasar pada pengamatan Yunus, bahwa masyarakat miskin lebih memilih untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti bertani dan menganyam daripada mereka harus datang ke bank dan mengantre. Kerangka kerja bank yang seperti ini dibutuhkan untuk melakukan penyeimbang-an antara aspek ekonomi dan aspek sosial.

Ketiga, prinsip keberlanjutan, prinsip yang mengharuskan kelompok masyarakat miskin dan Yunus bersinergi merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang. Prinsip ini guna mengevaluasi dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspek.<sup>115</sup> Keberlanjutan *Grameen Bank* dilakukan mengingat perannya sebagai program kredit dengan tujuan pengentasan kemiskinan, kemampuan organisasi dan penyelesaian masalah sosial lain. Dalam sebuah *review* dari *The Times*, menyatakan atas dukungannya terhadap kinerja mikro kredit, *Grameen Bank* melakukan ekspansi kerja sosial yang lebih luas, seperti: kesetaraan gender, kontrol terhadap angka kelahiran, dan lingkungan hidup. *Grameen Bank* menggunakan sumber bersubsidi untuk membiayai kegiatan produktif bagi masyarakat miskin. Sehingga, *Grameen Bank* dituntut untuk melakukan kerja sama guna mendapatkan modal secara mandiri.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal. 179–180.

<sup>116</sup> Shahidur Khandker, Bqui Khalily, Zahed Khan, “*Is The Grameen Bank Sustainable?*”. *Human Resources Development and Operations Policy*. Februari 1994, Hal. 8-9.

Demi mendukung keberlanjutan agenda, Yunus melakukan perluasan jangkauan kerja bisnis sosial. Dalam mendapatkan sumber dana dan menyelesaikan masalah sosial – lingkungan, maka Muhammad Yunus akan melakukan usaha patungan dengan beberapa korporasi asing. Korporasi yang memiliki sumber kapital dimanfaatkan oleh Yunus guna kemaslahatan masyarakat miskin dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi alam. Beberapa contoh bentuk keberlanjutan *Grameen Bank* adalah kerja samanya dengan Otto GmbH dari Jerman. Otto GmbH adalah sebuah perusahaan perdagangan dan *mail order* yang menangani tekstil serta produk-produk lain. Selain memberi dana suntikan kepada *Grameen*, perusahaan Otto ini juga melakukan kolaborasi pendirian pabrik untuk pakaian ekspor. Usaha yang dibangun, Otto *Grameen* merealisasikan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan dalam hal ekologi. Hal ini terbukti dengan pertimbangan atas fasilitas pabrik *Grameen* Otto yang diusahakan menghasilkan karbon netral.<sup>117</sup>

Ini merupakan bentuk komitmen nyata dari bisnis sosial dalam mempertimbangkan aspek orientasi pembangunan lain. *Grameen Bank* menjadi cikal bakal terbentuknya bisnis *Grameen* yang lebih banyak dan variatif di tanah kemiskinan Bangladesh. Di sisi lain, Yunus membentuk *Grameen Not for Profit* sebagai konsistensinya menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan. Berikut disampaikan sektor-sektor pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>117</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2011, Hal. 208.

Tabel 4.1

*Grameen Not for Profit*

<b>Nama Grameen Not For Profit</b>	<b>Sektor Pembangunan Berkelanjutan</b>
<i>Grameen Shakti</i>	Pembangunan Energi Matahari ( <i>solar energy</i> ) yang berkelanjutan
<i>Grameen Trust</i>	Mikro kredit–membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan.
<i>Grameen Shikkha</i>	Pendidikan bagi anak-anak dan kaum muda yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan dengan baik.
<i>Grameen Byabosha Bikash</i>	Menghubungkan para produsen desa kepada pangsa pasar tanpa perantara.
<i>Grameen Communications</i>	Penyedia produk perangkat lunak dengan kualitas terkemuka, seperti layanan internet bagi kemaslahatan kaum miskin.
<i>Grameen Healthcare Services</i>	Memberikan servis kesehatan yang lebih baik kepada kaum miskin.
<i>Grameen Kalyan</i>	Asuransi kesehatan primer bagi masyarakat miskin.
<i>Grameen Krishi Foundation</i>	Kegiatan pertanian untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan petani miskin dan marginal. Swasembada produksi pangan serta meningkatkan pemanfaatan efektif dari sumber daya pertanian.

Nama <i>Grameen Not For Profit</i>	Sektor Pembangunan Berkelanjutan
<i>Grameen Fund</i>	Strategi untuk menyediakan pembiayaan modal usaha, terutama dalam usaa berbasis teknologi.
<i>Grameen Healthcare Trust</i>	Menyediakan lahan kredit mikro bagi perawatan kesehatan.
<i>Grameen Uddog and Grameen Shamorgree</i>	Pembiayaan industri pedesaan dan memasarkan produk mereka, terutama produksi padat karya di Bangladesh dan luar negeri.

Sumber: Yunus Center - Not for Profit. Lihat lebih jelas pada (<http://www.muhammadyunus.org/>, diakses pada 30 Oktober 2014). Data sudah diolah penulis.

*Grameen Bank* tidak hanya bekerja demi mendapatkan kepuasan dalam memenuhi materi dan mengejar *dividen* atau keuntungan. Sebaliknya, *Grameen Bank* juga meletakkan perhatian terhadap aspek sosial-budaya. Hal ini diwujudkan oleh Muhammad Yunus dalam mendorong jiwa kewirausahaan bagi setiap peminjam di *Grameen Bank*. Masyarakat miskin Bangladesh harus dapat menggunakan modal dari *Grameen Bank* untuk memulai sebuah bisnis baru, keuntungan yang didapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan sisanya untuk mencicil pinjaman setiap minggunya di *Grameen Bank*.

Yunus berhasil mematahkan asumsi para perbankan konvensional mengenai kelayakan kaum miskin dalam mendapatkan sumber modal. Hal ini dibuktikan dengan kedisiplinan kaum miskin, peminjam uang di *Grameen Bank*,

yang menyetorkan uang cicilan dengan tepat waktu kepada petugas *Grameen Bank*. Peminjam *Grameen Bank* oleh perempuan mencapai 94% dari jumlah keseluruhan dan lebih dari 98% peminjaman dikembalikan dengan baik dan tertib. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa tingkat pemulihan kemiskinan oleh *Grameen Bank* lebih tinggi daripada sistem perbankan lainnya. John Elkington, seorang konsultan yang menangani strategi pembangunan berkelanjutan, berpendapat bahwa potensi kekuatan “kapitalisme baru” dalam mengubah kehidupan orang miskin menjadi lebih baik telah terbukti dengan lahirnya mikro kredit pada *Grameen Bank*.<sup>118</sup>

Dengan pinjaman modal yang diberikan oleh *Grameen Bank*, kaum miskin di desa dapat menjalankan roda perekonomian mandiri tanpa harus bergantung kepada para lintah darat. Anggota-anggotanya memperoleh kesejahteraan perorangan, mereka dapat memiliki rumah, kakus, pompa air, pendidikan akses ke layanan kesehatan, dan sebagainya. Fakta ini membuktikan bekerjanya prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan peluang dan akses yang harus terbuka secara sama bagi semua orang dan kelompok.<sup>119</sup> *Grameen* menjadi salah satu badan yang kemudian didefinisikan sebagai bank swasta swadaya.

Sesuai dengan konsep *sustainable development* bahwa pendirian *Grameen Bank* oleh Muhammad Yunus tidak hanya

---

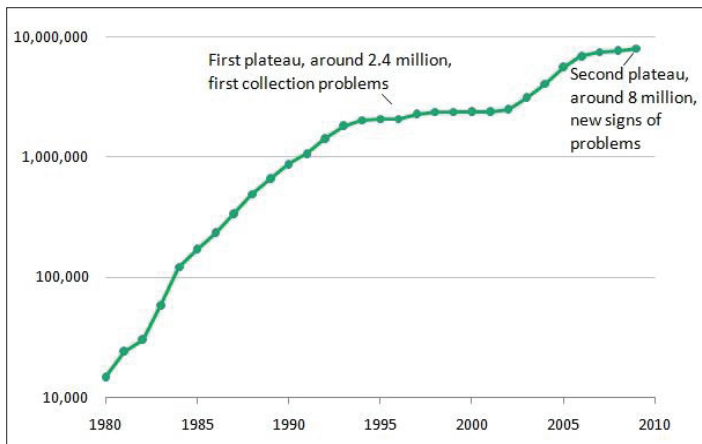
<sup>118</sup> Review by John Elkington. “*Chairmdns of strategy consultants sustain Ability by The Guardian*, 06 Desember 1998, London.” (<http://www.grameeninfo.org/>, diakses 30 Oktober 2014)

<sup>119</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal 176.

pada penyelesaian masalah ekonomi, namun juga pemberdayaan perempuan dalam pembentukan karakter, tanggung jawab, dan keaktifan dalam organisasi. Antusiasme dari para perempuan dan peminjam modal lain dalam berkontribusi pada *Grameen Bank* memiliki kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya hingga beberapa kurun waktu terakhir (lihat **Grafik 4.1**).

**Grafik 4.1**

Pertumbuhan Keanggotaan *Grameen Bank*, 1980 - 2010



Sumber<sup>120</sup>: *Grameen Bank*, Which Pioneered Loans for the Poor, Has Hit a Repayment Snag, By David Roodman, 2 September 2010.

Grafik ini menjelaskan pertumbuhan per tahun dari *Grameen Bank* sejak 1980 hingga 2010. Masyarakat miskin Bangladesh mendapat keuntungan dari keberadaan *Grameen*

<sup>120</sup> David Roodman “*Grameen Bank*, Which Pioneered Loans for the Poor, Has Hit a Repayment Snag”. (<http://www.cgdev.org/>, diakses 30 Oktober 2014)



*Bank*, sehingga hal ini menunjukkan bahwa *Grameen* memiliki keberlanjutan yang baik.

Indikator pertumbuhan *Grameen Bank* tidak lepas dari strategi kerja yang dimiliki oleh *Grameen* tersebut. Berikut disampaikan ringkasan atas strategi *Grameen Bank* dan pertumbuhannya:

Tabel 4.2  
Ringkasan Strategi & Pertumbuhan *Grameen Bank*

Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki target klien yang unik—sebagian besar adalah perempuan desa</li> <li>• Mengintegrasikan tujuan sosial dan keuangan, dan menciptakan kemitraan yang langgeng dengan komunitas mikro kredit untuk pertumbuhan basis mikro kredit dunia</li> <li>• Lobi kepada organisasi pemerintah untuk meningkatkan visibilitas inisiatif keuangan mikro</li> </ul>
Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Grameen Bank</i> sudah tidak menerima bantuan keuangan atau bersifat mandiri sejak tahun 1995.</li> <li>• 90% dana pinjaman berasal dari pendapatan dan deposito.</li> <li>• Dimulai dengan bisnis “<i>Grameen</i>” dengan risiko yang terbatas terhadap komitmen pinjaman kecil, organisasi-organisasinya berjalan dengan entitas independen.</li> </ul>

Sumber<sup>121</sup>: *Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor* by David O. Beim

<sup>121</sup> David O. Beim, *Op.cit.*, 2004, Hal. 14.

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja *Grameen Bank* mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini menjadikan *Grameen Bank* sebagai batu loncatan bagi lahirnya bisnis sosial lain yang dikembangkan bersama perusahaan asing. Keberhasilan sistem mikro kredit yang digunakan oleh *Grameen Bank* dalam penuntasan kemiskinan menjadi perbincangan para pebisnis barat. Bahwa ini merupakan langkah nyata dari Yunus atas bencana kemiskinan yang hadir di tengah agenda pembangunan besar oleh pemerintah Bangladesh.

Keberhasilan Yunus dalam membangun *micro credit* telah diapresiasi oleh sejumlah tokoh dunia. Dalam sebuah ulasan, *Hungry Mind Review*, Tom McInerney<sup>122</sup> menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu model Yunus telah terbukti sangat sukses. Sejak pinjaman awalnya di tahun 1976, peminjaman oleh bank terus tumbuh hingga saat ini. Kesuksesan terbukti dengan kemunculan proyek *Grameen* di berbagai tempat, seperti Vietnam, China, Filipina. Kegigihannya dalam menghindari keterlibatan ahli pembangunan internasional dalam penyelamatan kaum miskin juga diakui oleh Tom.<sup>123</sup>

Ditegaskan oleh Yunus dalam buku *Bank Kaum Miskin*, bahwa kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin. Kemiskinan diciptakan oleh struktur masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh masyarakat. Dengan mengubah struktur seperti yang dilakukan oleh Yunus, maka kita akan

---

<sup>122</sup> Tom McInerney adalah seorang pengacara dan penulis (*Fox News*) yang hidup di New York City.

<sup>123</sup> “Hungry Mind Review, 1999” (<http://www.grameen-info.org/index>, diakses 31 Oktober 2014).

menyaksikan bahwa kaum miskin akan mengubah nasib mereka sendiri. *Grameen* menunjukkan bahwa sekecil apa pun dukungan modal keuangan yang diberikan, kaum miskin sepenuhnya mampu meningkatkan kehidupan mereka.

#### **D. Kolaborasi *Grameen Bank* dengan Korporasi Global**

Dalam rangka mewujudkan sintesis kapitalisme, Muhammad Yunus melakukan perpaduan yang apik antara korporasi global dengan usaha *Grameennya*. Hal ini dikenal sebagai usaha patungan antara perusahaan-perusahaan *Grameen* dan multi-nasional ternama.<sup>124</sup>

Biasanya, pembangunan bersama dengan korporasi global cenderung menggunakan pola *developmentalisme*. Menurut konsep pembangunan berkelanjutan, pola ini hanya mengutamakan kemajuan ekonomi, seperti proses pembangunan yang terjadi di negara Barat. Pola *developmentalisme* harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan yang lebih holistik dan integratif dengan memberi perhatian serius kepada pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup. Kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini di negara berkembang, termasuk Bangladesh, bersifat semu sekaligus membawa kerugian yang sangat mahal di sisi sosial-budaya dan lingkungan hidup.<sup>125</sup>

Dalam menjalankan bisnis patungan dengan korporasi asing, Muhammad Yunus memberlakukan aturan-aturan yang harus diikuti dan disetujui oleh pihak korporasi sebelum

---

<sup>124</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2011, Hal. xxiii.

<sup>125</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal. 169.

bisnis berjalan. Menanggapi aturan-aturan yang ditawarkan, beberapa korporasi asing memberikan tanggapan positif. Seperti yang dinyatakan oleh *chairman Intel*, Craig Brenet, atas ketertarikannya kepada bisnis sosial dan berniat untuk meluncurkan kerja sama bisnis sosial menggunakan beberapa teknologi informasi Intel agar bermanfaat bagi warga miskin.<sup>126</sup> Intel merupakan salah satu korporasi besar dunia dalam bidang teknologi yang berasal dari Amerika Serikat.

Kerja sama Yunus dengan korporasi asing lain, juga diakui oleh Dr. Michael Otto, pemilik Otto GmbH, yang amat berminat untuk membantu meluncurkan sebuah bisnis sosial dalam kemitraan dengan *Grameen*.<sup>127</sup> Dr. Otto telah berbuat banyak untuk mendukung konsep usaha yang berkelanjutan, sehingga korporasinya di bidang tekstil akan sangat menarik jika ikut aktif berkontribusi dalam pemecahan masalah ekonomi- sosial di Bangladesh. Michael Otto yakin bahwa *Grameen Otto* akan menjadi perusahaan yang dapat menyelaraskan kriteria ekologi dan sosial dengan tujuan ekonomi.<sup>128</sup>

Hal ini merupakan upaya Yunus dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup pada proses pembangunan di tingkat *grass root*

---

<sup>126</sup> “Grameen Intel Social Business Ltd.” (<http://www.muhammadyunus.org/>, diakses 29 Oktober 2014)

<sup>127</sup> Muhammad Yunus. *Op.cit.*, 2011, Hal 206.

<sup>128</sup> Andreas Streubig. “Factory of the Future” *The Otto Grameen Textile Company*, (<https://www.csr-academy.org/en/projects/Factory-of-the-Future-The-Otto-Grameen-Textile-Company.php>, diakses 30 Oktober 2014)

Bangladesh. Dalam bukunya *Bisnis Sosial*, Muhammad Yunus menegaskan bahwa perusahaan yang ikut serta dalam bisnis sosial adalah perusahaan tanpa rugi dan tanpa deviden yang diabdikan untuk memecahkan masalah sosial. (lihat **Tabel 4.3**)

Jenis bisnis sosial lain (kedua) yang ditawarkan oleh Yunus adalah perusahaan pencari laba dengan kepemilikan oleh penduduk miskin, baik kepemilikan secara langsung maupun melalui sebuah perwalian yang secara khusus dibentuk demi satu alasan sosial. Sesuai dengan prinsip bisnis sosial bahwa tujuannya adalah mengatasi kemiskinan, atau masalah lain yang mengancam manusia dan masyarakat dan bukan untuk memaksimalkan keuntungan.<sup>129</sup>

**Tabel 4.3**

Daftar Korporasi yang Berkolaborasi dengan *Grameen Bank*

<b>Korporasi</b>	<b>Negara Asal</b>	<b>Sektor dan Area Kerjasama</b>	<b>Nama Korporasi Hasil Kolaborasi</b>
Danone	Prancis	Makanan bagi kesehatan anak-anak	<i>Grameen Danone</i>
BASF	Jerman	Lingkungan dan Kesehatan (Ke-lambu Nyamuk)	<i>BASF Grameen</i>
Veolia Water (Veolia Environment)	Perancis	Fasilitas pengolahan sumber daya air	<i>Grameen Veolia Water</i>

<sup>129</sup> Lihat penjelasan lengkap pada BAB III buku ini, Hal. 28.

Korporasi	Negara Asal	Sektor dan Area Kerjasama	Nama Korporasi Hasil Kolaborasi
Intel	Amerika Serikat	Kolaborasi antara teknologi, kesehatan, dan pertanian	<i>Grameen Intel</i>
Otto GmbH	Jerman	Tekstil dan pemberdayaan energi konservasi	Otto <i>Grameen</i>
Adidas	Jerman	Pendidikan	<i>Grameen Adidas</i>

Sumber<sup>130</sup>: Muhammad Yunus, “*Bisnis Sosial–Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*”, 2010. Data sudah diolah penulis.

Korporasi di atas memainkan peran barunya sebagai bisnis sosial yang bekerja demi masyarakat miskin dan keseimbangan lingkungan. Menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi setiap pemilik korporasi ketika masalah sosial memiliki progres penurunan yang baik di Bangladesh. Lebih jelasnya akan dibahas pada pemaparan selanjutnya.

Bisnis sosial pertama kali yang dibentuk oleh Yunus adalah *Grameen Danone* dan mulai berjalan di awal tahun 2007. *Danone* merupakan sebuah korporasi dari Prancis yang berkomitmen untuk memusatkan perhatian kepada masalah gizi di Bangladesh. *Danone* menjawab kekhawatiran atas kegagalan pembangunan berkelanjutan pada masyarakat yang semakin

---

<sup>130</sup> Hasil Tabel diambil dari berbagai sumber baik buku maupun internet sesuai dengan subjek korporasi masing-masing.

tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>131</sup> Mutu kehidupan yang semakin menurun mengakibatkan datangnya berbagai penyakit. Ini menjadi bumerang bagi kaum miskin Bangladesh. Setengah di antara anak-anak di Bang-ladesh, terutama di kawasan pedesaan, menderita kekurangan gizi sehingga kualitas hidup mereka sangat rendah. Diare, yang biasanya hanya sebagai sebuah akibat awal kekurangan gizi, di Bangladesh justru menjadi penyakit yang sering berujung pada kematian. Kehadiran *Danone* sebagai jalan keluar bagi permasalahan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup.

Kekurangan kualitas hidup–kesehatan–seperti ini menyebabkan sejumlah masalah dan efek domino. Dalam jangka panjang, masalah-masalah tersebut berimplikasi terhadap prospek pembangunan ekonomi yang akan mengalami penurunan. Disebabkan anak-anak yang tidak sehat, sehingga sulit dikembangkan menjadi orang dewasa yang berpendidikan dan produktif.

Usaha patungan antara *Grameen* dan *Danone* ini menghasilkan produk Yoghurt, dengan kandungan vitamin yang kompleks, rasa yang disukai anak-anak, dan tentunya dengan harga yang sangat rendah (dalam jangkauan penduduk miskin di Bangladesh). Mengingat bahwa Yoghurt juga merupakan makanan tradisional di Bangladesh dan dikembangkan oleh *Danone* sebagai sebuah susu dengan bahan-bahan vitamin, kalsium, dan protein, sehingga lebih mudah untuk diterima. *Grameen Danone* berhasil menurunkan jumlah kasus anak

---

<sup>131</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal 169.

sakit, meningkatkan tingkat energi anak-anak, dan menaikkan angka kesetaraan mereka dalam kegiatan yang produktif.

*Grameen Danone* memberdayakan “ibu-ibu *Grameen*” dalam membentuk sebuah jaringan penjualan bagi penduduk miskin di sekitar. Hal ini menjadi bentuk nyata atas pemberdayaan perempuan di pedesaan. Ibu-ibu tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan Yoghurt. Selain membantu dalam aspek ekonomi dan kesehatan, perempuan pedesaan juga terlatih untuk melakukan bisnis secara mandiri.<sup>132</sup>

Lebih detail, laporan *Grameen Danone Foods*, sebuah perusahaan yang didedikasikan untuk pembangunan lingkungan memiliki empat fokus kerja, yakni: Pertama, menyediakan sebuah produk dengan nilai nutrisi yang tinggi dan terjangkau untuk kaum miskin; Kedua, memperbaiki taraf kondisi kehidupan masyarakat miskin dengan menyediakan pekerjaan yang dapat meningkatkan standar hidup; Ketiga, melindungi lingkungan dan melakukan konservasi sumber daya; Keempat, memastikan adanya pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mendapat keuntungan.<sup>133</sup>

Konsep *sustainable development* mengkritisi kehadiran industri Barat, seperti pendirian pabrik, yang sedikit banyak menghasilkan masalah-masalah serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, banjir, dan lain sebagainya. Dae-

---

<sup>132</sup> ‘The Project’s History’ *Grameen Danone Food Ltd*, (<http://www.danonecommunities.com/>, diakses 30 Oktober 2014)

<sup>133</sup> Ibid.



rah pedesaan di Bangladesh terutama mengidap masalah pencemaran sungai yang berimbas pada ketersediaan air minum bersih bagi rakyat miskin. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh CEO *Grameen Shikkha*, air di sumur-sumur gali atau sumur bor dangkal di seluruh Bangladesh memiliki kadar arsenikum (racun dalam air) yang melebihi ambang batas dan dalam jangka panjang akan merusak kesehatan manusia.

*Veolia Water* hadir berperan membantu *Grameen* dan penduduk miskin di Bangladesh dalam penanganan masalah ini. *Veolia Water* adalah bagian dari sebuah perusahaan lebih besar, *Veolia Environment* di Prancis, yang mengoperasikan sistem-sistem manajemen limbah, sistem efisiensi energi, sistem transportasi umum, dan sistem-sistem air bersih. Di Bangladesh, *Veolia Water* berfokus pada layanan perancangan, pembangunan, dan pengelolaan air bak air bersih maupun air limbah untuk pemerintah dan untuk industri.<sup>134</sup> Namun, di akhir tahun 2007, *Veolia Water* bekerjasama dengan *Grameen Healthcare* guna menyediakan air minum bersih bagi penduduk miskin di Bangladesh. *Veolia Water* telah berpengalaman dalam penyediaan air minum bersih di daerah-daerah miskin lain, seperti Afrika dan India.

Yunus menargetkan harga penjualan air olahan (air bersih) dari *Grameen Veolia Water* sebesar satu Taka per sepuluh liter. Sehingga, penduduk miskin tidak merasa keberatan dalam mengonsumsi air tersebut. Harga menjadi sebuah pertimbangan matang bagi bisnis sosial dalam perkembangannya.

---

<sup>134</sup> Marlon Cesselin, “*The Grameen Veolia Water Social Business.*” *ESSEC Business School*, (<http://les.essec.edu>, diakses 30 Oktober 2014)

Muhammad Yunus juga menyediakan margin laba bagi agen-agen penjualan yang bertugas menjual air, yaitu tim perempuan setempat “ibu-ibu *Grameen*” yang saat itu berjumlah sebelas orang, menjual air kepada teman dan tetangga mereka di desa. *Grameen Veolia Water* berperan dalam peningkatan pendapatan bagi perusahaan *Veolia* sendiri dan para agen penjual air di desa-desa, selain tujuan utamanya terpenuhi yaitu mengurangi pencemaran lingkungan hidup, khususnya air.

Masih dalam konteks lingkungan dan kesehatan. Bisnis sosial melakukan usaha patungan dengan salah satu perusahaan asing yang bergelut dalam bidang teknologi dari Jerman, *Badische Anilin-und Soda Fabrik* (BASF). Korporasi ini melakukan investasi di Bangladesh dalam membuat kelambu anti nyamuk dan menjual mikro nutrisi dalam kemasan *sachet* yang diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak-anak Bangladesh. Didasarkan pada kepedulian terhadap masalah kesehatan yang vital seperti malaria dan penyakit mematikan.

Penjualan dan pengiriman produk kelambu dan mikro nutrisi di kawasan pedalaman akan ditangani oleh wirausaha-wirausaha setempat, terutama kaum perempuan, seperti yang sudah dikenal sebagai “ibu-ibu *Grameen*”. Tenaga penjual yang memerlukan modal untuk memulai operasi mereka, bisa mendapatkannya dari pinjaman mikro melalui *Grameen Bank*. Jadi, proyek ini akan menciptakan peluang-peluang bisnis bagi penduduk di pedalaman Bangladesh.<sup>135</sup> Aspek sosial-budaya

---

<sup>135</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2011, Hal. 198

juga terpenuhi sebagai penyeimbang, selain aspek ekonomi sebagai tujuan utamanya.

Pembangunan yang berkelanjutan juga dipahami sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan produktif dari ekonomi nasional di masa yang akan datang.<sup>136</sup> Konsep ini dijalankan oleh *Grameen Bank* dengan Intel, sebuah perusahaan terkemuka yang memiliki kekayaan teknologi luar biasa. Sasaran akhir *Grameen Intel* adalah sebuah perpaduan produk atau jasa berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh wirausaha setempat untuk menyediakan manfaat sosial bagi rakyat Bangladesh.

Ditekankan pada jenis bisnis sosial ini, *Grameen Intel*, untuk dapat memberi dampak pertumbuhan bisnis-bisnis kecil lebih banyak yang memungkinkan ribuan orang mencari jalan masing-masing untuk keluar dari kemiskinan. Banyak para pemuda yang selesai mengenyam pendidikan dengan bantuan pinjaman mahasiswa dari *Grameen Bank* terlatih sebagai insinyur untuk membangun, memasang, dan merawat panel-panel surya, serta sistem-sistem biogas di komunitas masing-masing di seluruh Bangladesh. Begitu program *Grameen Intel* ini lepas landas, banyak di antara pemuda desa Bangladesh menjadi wirausaha teknologi informasi. Jadi, generasi yang akan datang masih mempunyai peluang dan kemampuan ekonomi yang sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial-budaya yang sama seperti sekarang.

---

<sup>136</sup> A. Sony Keraf, *Op.cit.*, 2002, Hal. 174.

Aspek ketiga yang harus dipenuhi dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah aspek lingkungan hidup. Sebuah korporasi yang berdiri seharusnya memperhitungkan nilai ekologis dan tidak terpaku pada nilai ekonomis saja. Aspek utama dari cita-cita pembangunan berkelanjutan telah tercantum pada poin kelima dari prinsip bisnis sosial yang dirumuskan oleh Muhammad Yunus dengan Hans Reitz, direktur *Grameen Creative Lab* di Jerman, bahwa perusahaan dituntut untuk bersikap ramah kepada lingkungan.<sup>137</sup>

Sebagai contoh adalah bentuk usaha patungan *Grameen Trust* dengan *Otto GmbH*, sebuah perusahaan perdagangan dalam bidang tekstil. Bisnis sosial ini akan disebut *Otto Grameen Textile Company*, sebuah bisnis yang berorientasi laba. Meski demikian, pabrik pakaian jadi *Otto Grameen Textile Company* akan dibuat berkelanjutan secara ekologi dan secara ekonomi. Tim yang bertugas membuat rencana terperinci melakukan penelitian dalam menentukan pilihan-pilihan optimal untuk bahan bangunan, konsumsi energi, dan manajemen rantai pasokan. Panel-panel surya akan digunakan untuk menyumbang kebutuhan energi pabrik sebanyak mungkin, ditambah seperlunya menggunakan sumber konvensional.

Gaya pembangunan pabrik yang dilakukan oleh *Grameen Otto Textile* ini berusaha memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan emisi karbon. Pendingin ruangan, misalnya, menggunakan penempatan jendela yang memungkinkan terjadinya ventilasi silang sehingga dapat meminimalkan kegerahan

---

<sup>137</sup> Muhammad Yunus, *Op.cit.*, 2011, Hal. 3.

selama musim kemarau. Selanjutnya, pendirian pabrik tekstil ini juga mempertimbangkan aspek sosial-kesejahteraan buruh yang bekerja. Selain upah yang wajar dan tunjangan kerja normal, manfaat sosial lain yang ditawarkan oleh *Otto Grameen* mencakup: akses makanan yang sehat dan bergizi, pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan dan pelatihan kerja, akses ke kredit, bantuan untuk perumahan, prospek kepemilikan individual atau virtual bagi karyawan perusahaan.

Keberlanjutan *Grameen Bank* tidak hanya terjadi dan tumbuh di Bangladesh, namun banyak negara lain baik negara maju maupun negara berkembang yang mengimplementasikan konsep Yunus. *Grameen Bank* hadir di beberapa negara di dunia, seperti Amerika, Meksiko, Peru, Dominica, Mesir, Ghana, India China, Arab Saudi, Filipina, dan lain sebagainya.

Adanya sikap kehati-hatian dalam menentukan langkah pembangunan, sesungguhnya telah menjamin bahwa cita-cita pembangunan berkelanjutan dapat dicapai. Melihat kolaborasi usaha patungan antara *Grameen Bank* dengan korporasi asing, menjadikan tolak ukur keberhasilan dan kemajuan masyarakat tidak lagi hanya berdasarkan kemajuan ekonomi. Bisnis sosial mengajarkan bahwa tolak ukur keberhasilan adalah kualitas kehidupan yang dicapai dengan menjamin kehidupan ekologis, sosial-budaya, ekonomi secara proporsional. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, sistem Bisnis sosial telah bekerja dengan baik dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan peluang yang sama, dan tidak lupa memperhatikan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup dalam pencapaian aspek ekonomi.



## BAGIAN ENAM

### **PENUTUP**

BUKU ini meletakkan satu isu penting dalam pembangunan internasional yaitu aksi kolaborasi pembangunan di negara dunia ketiga, antara korporasi global dan masyarakat. Aksi kolaborasi tersebut belum menjadi perhatian dan kajian yang membahas keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam agenda pembangunan bersama perusahaan asing dan menghasilkan progres yang positif dalam pembangunan internasional. Ini mengambil tema kajian non-tradisional, maksudnya pembahasan yang lebih menitikberatkan pada permasalahan kemiskinan dan pembangunan (non-militer) dalam periode waktu tertentu. Aktor Hubungan Internasional yang paling berpengaruh pada penelitian ini adalah korporasi asing, individu, Masyarakat, dan Negara di Bangladesh. Keterkaitan antara keempat aktor ini melahirkan konsep-tualisasi baru di tengah keberlanjutan kehidupan kapitalis.

Kajian Ilmu Hubungan Internasional kontemporer sering menganggap bahwa kapitalisme di negara dunia ketiga hanya menjadi ancaman dan bencana. Hal ini terbantahkan oleh keberhasilan Muhammad Yunus di Bangladesh dalam

memperlakukan kapitalisme menjadi suatu gagasan yang memenuhi syarat (*eligible*) dan berperan mengentaskan kemiskinan. Yunus menekankan bahwa kapitalisme merupakan “teman” bagi kaum miskin.

Masih dalam studi Hubungan Internasional, korporasi dikenal sebagai aktor paling dominan pada era globalisasi. Ekspansi dan dominasi korporasi dalam pembangunan di negara sedang berkembang tak jarang diikuti oleh semacam keyakinan, bahwa pada gilirannya negara sedang berkembang hanya akan menjadi arena perluasan dan dominasi perusahaan multinasional. Namun, buku ini berhasil meyakinkan bahwa kerja sama dengan korporasi tidak hanya bersifat eksploitatif. Tapi, juga dapat menggiring pada tahap pembangunan yang lebih produktif bagi masyarakat lokal.

Dalam pandangan Muhammad Yunus, agen pembangunan atau korporasi harus berjalan sesuai dengan agenda bisnis sosial dan rakyat setempat. Bisnis sosial hadir sebagai fasilitator pembangunan (*development provider*) yang mengalirkan modal dari perusahaan multinasional asing kepada masyarakat. Rakyat diharuskan memiliki kontribusi aktif dalam melakukan pembangunannya sendiri, sehingga membentuk pembangunan yang tidak bersifat elitis.

Bagi negara berkembang, pembangunan menjadi agenda utama yang harus dilakukan setelah mengalami masa pergolakan politik untuk memulihkan keadaan ekonominya, seperti halnya di Bangladesh. Buku ini menemukan kecenderungan bahwa konstelasi politik domestik yang bersifat otoriter akan mengalami proses pembangunan yang lebih sulit, dibandingkan



dengan keadaan politik yang demokratis. Hal ini terbukti saat Bangladesh di bawah rezim non-demokratik, segala upaya pembangunan termasuk integrasi ke dalam sistem ekonomi global tidak membawa dampak yang signifikan terhadap keadaan rakyat. Sebaliknya, yang terjadi adalah perluasan kemiskinan dan timbulnya masalah sosial lain.

Seiring dengan perubahan keadaan politik yang membaik dan kontribusi masyarakat Bangladesh yang aktif, maka pembangunan ekonomi di Bangladesh mengalami kemajuan yang signifikan. Pembangunan ekonomi di Bangladesh semakin inklusif untuk mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik dan memperhatikan nasib kaum miskin di pedalaman.

Penelitian ini melihat kemandekan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang, khususnya di Bangladesh, disebabkan karena kehadiran korporasi. Korporasi dalam rezim kapitalis memaksakan norma dan aturannya untuk diikuti oleh masyarakat negara berkembang. Kekuasaan pasar yang tidak terkendali dapat mengalami krisis secara mendalam (*deepening*), yang menjadikan pembangunan gagal menyjahterakan masyarakat. Adanya pergeseran kekuatan ekonomi dari masyarakat kepada korporasi global tidak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat Bangladesh. Hal ini memerlukan kajian ulang, menurut Muhammad Yunus, masyarakat miskin di negara-negara sedang berkembang harus digiring untuk keluar dari hegemoni kapitalisme ketika ingin terbebas dari kungkungan kemiskinan.

Dengan menggunakan pandangan *People Centered Development* (PCD), gagasan mengenai “pembangunan

di negara berkembang” banyak mengundang perhatian di kalangan akademisi maupun para pelaku ekonomi global. Pandangan ini menegaskan bahwa rakyat harus diberi wewenang menguasai sumber daya sendiri, memperoleh akses, mempunyai sarana legal untuk menuntut pertanggung-jawaban. Masyarakat miskin memiliki peranan sentral dalam melakukan pembangunan. Bencana kemiskinan hanya dapat dibebaskan ketika individunya sendiri yang melakukan sebuah aksi (*act*).

Rumusan ini disimpulkan karena nyatanya kemiskinan bukan suatu yang dibentuk oleh rakyat itu sendiri, melainkan merupakan kesalahan sistem yang diadopsi. Hal tersebut menjadi penemuan baru bagi penulis dalam memandang suatu fenomena internasional. Bisnis sosial di Bangladesh merupakan konseptualisasi nyata atas upaya pembangunan internasional sesuai dengan nilai-nilai tawaran PCD.

Apa yang dilakukan oleh Yunus di Bangladesh menjadi contoh penting, betapa posisi pembangunan tidak dapat disubkontrakkan kepada pihak lain. Menurut Yunus, tidak terlalu mudah bagi negara sedang berkembang seperti Bangladesh untuk melepaskan diri dari jeratan korporasi. Di dunia internasional, Dunia Ketiga pada umumnya mengalami keteringgalan dalam bidang permodalan, teknologi, dan akses ke pasar dunia. Sehingga, hal ini membuat Yunus meyakini bahwa kehadiran korporasi di Bangladesh memiliki peranan penting, khususnya dalam penyediaan modal.

Isu utama pembangunan dalam perspektif *sustainable development*, pembangunan harus memperhatikan tidak hanya berdimensi atau berorientasi ekonomi, namun juga sosial

dan lingkungan hidup. Kajian atas peranan korporasi, studi hubungan internasional memiliki kesamaan (identik) dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan keadaan sosial dan lingkungan. Namun, buku ini berupaya membuka sisi lain dari orientasi korporasi. Terbukti bahwa korporasi tetap mendapatkan keuntungan meskipun mempertimbangkan masalah sosial dan lingkungan hidup demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

*Grameen Bank* sebagai manifestasi dari bisnis sosial bersama dengan para korporasi asing tidak menjalankan cara produksi yang sama dengan kapitalisme murni. *Sustainable Development* telah memberikan arah kompas pembangunan yang jelas dan tepat. Sudah saatnya masyarakat yang menentukan bagaimana pembangunan itu seharusnya dibawa, bukan rakyat di bawah kendali perusahaan.

Menurut penulis, akan menjadi barang tentu bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil seharusnya dikembalikan kepada rakyat yang menjadi aktor inti. Kekuatan masyarakat miskin menjadi penting dan krusial terhadap penguatan atas legitimasi kapital yang datang. Mengutip laporan Brutland (PBB, 1987) menyatakan bahwa sudah menjadi hukum alam bahwa sebuah pembangunan seharusnya dapat berjalan dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan atas riset yang dilakukan dalam buku ini. Keterbatasan ini mencakup sumber-sumber yang diperoleh oleh penulis, seperti buku, jurnal, makalah, berita, dan sebagainya. Di luar pembahasan

penulisan buku ini masih banyak kupasan mengenai bisnis sosial dari sudut pandang lain yang dapat membantu melengkapi konten informasi penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa di luar bisnis sosial masih banyak terdapat *best practice* lain yang muncul di berbagai negara. *Best Practice* lain dimungkinkan memiliki esensi keberhasilan yang sama dengan bisnis sosial. Dalam buku ini penulis tidak menyampaikan komparasi antara bisnis sosial dengan *best practice* yang lain. Diharapkan bagi para pembaca untuk memaklumi keterbatasan penulis dalam menyusun buku ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

- Asian Development Bank - M.G. Quibria. (Ed.). *Rural poverty in Developing Asia Volume 1 : Bangladesh, India, and Srilanka*. Manila : Philippines : Asian Development Bank Publications, 1994.
- Bodgan dan taylor, In J. Moloeng, Lexy (Ed.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989.
- Budiman, Arie. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Bunte, Marco – Andreas Ufen (Ed.). *Democratization in Post-Post Suharto Indonesia*. New York: Rotledge Taylor & Francis Group, 2009.
- C. Korten, David. "The Post-Corporate World". *Translated by A. Rahman Zainuddin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Fuller Collins, Elizabeth. *Indonesia Dikhianati*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Griffths, Martin – Terry O" Callaghan. *The Key Concept of International Relations*. New York: Routledge, 2002.

- Jumbala, Prudhisan. *Nation-building and Democratization in Thailand : A Political History*. Bangkok : Chulalongkorn University, Social Research Institute, 1992.
- Keraf, A. Sony. *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002.
- Kunio, Yoshihara, “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. *Translated by A. Setiawan Abadi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Natsir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Shiva, Vandana. “Bebas Dari Pembangunan – perempuan, ekologi dan perjuangan hidup di India”. *Translated by Hira Jhamtani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Stiglitz E, Joseph. *Making Globalization Work*. New York: W.W. Norton & Company, 2007.
- Thompson, Grahame - Paul Hirst. *Globalisasi adalah Mitos*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Yunus, Muhammad. “*Bank Kaum Miskin*”. *Translated by Irfan Nasution*. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2007.
- Yunus, Muhammad. “*Bisnis Sosial–Sistem Kapitalisme Baru yang memihak Kaum Miskin*”. *Translated by Alex Tri Kantjono*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

### **Daftar Jurnal dan Makalah**

- Anonim. 2007. “Poverty Profile People’s republic of Bangladesh”, Executive Summary. Japan Bank for International Cooperation.

- Anonim. 2011. "Investing in Bangladesh, A guide for New Investors." Dhaka: Embassy of the Kingdom of the Netherlands.
- Beim, David O. 2004. "Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor". *Chazen Web Journal of International Buisness*, Spring 2004. 2.
- Develtere, Patrick – An Huybrechts. 2005. "The Impact of Microcredit on the Poor in Bangladesh." *Alternatives* 30. 2005, 165-189.
- Esty, Katharine. 2011. "Lesson from Muhammad Yunus and the *Grameen Bank*." OD PRACTITIONER. Vol. 43 No. 1, 2011.
- Haque, Faizul – Thankom Arun – Colin Kirkpatrick. 2011. "The Political Economy of Corporate Governance in Developing Economies: The Case of Bangladesh." *Research in International Business and Finance* 25. 169-182.
- IFAD. 2014. "Investing in Rural People in Bangladesh." (<http://www.ruralpovertyportal.org>, diakses pada 1 Oktober 2014)
- Khandker, Shahidur - Bqui Khalily - Zahed Khan. 1994. "Is The *Grameen Bank* Sustainable?". *Human Resources Development and Operations Policy*. Februari 1994, 8-9.
- Lewis, David." *Bangladesh: Politics, Economy and Civil Society*". England : Cambridge University Press, 2012. prolog.
- Mahmud, Wahiduddin. 2008. "Social Development in Bangladesh: Pathways, Surprises and Challenges." *Indian Journal of Human Development*. Vol. 2 No. 1, 2008.

- Mahmud, Wahiduddin. 2008. "Social Development in Bangladesh: Pathways, Surprises and Challenges". *Indian Journal of Human Development*, Vol. 2 No. 1, 2008.
- Wirasenjaya, Ade M. "Strukturasi Norma : Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di negara Pasca-kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 15 No. 3, Maret 2012, 269-270.
- Wirasenjaya, Ade M. "Teori Pembangunan – Sustainable Development". *Bahan Kulaih*, 2013.
- Mc Kiyne & Corporate. "Apparel, Fashion & Luxury Practice". In *Bangladesh's ready-made garments landscape: The Challenge of growth*, 5.
- Mujeri, Mustafa K. 2002. *Bangladesh: Bringing Poverty Focus in Rural Infrastructure Development*. Geneva : International Labor office, Recovery and Reconstruction Department.
- Prema-chandra Athukorala, "Trends and Patterns of Foreign Direct Investments in Asia: A Comparative Perspective". *The Journal of Applied Economic Research*. Vol. 3 No.4, 2009 : 365-408
- Rahman, Afran. 2012. "Foreign Direct Investment in Bangladesh, Prospects and Challenges, and its Impact on Economy." A Project Submitted in Partial Fulfillment of the requirements for the degree of Professional Master in Banking and Finance. Asian Institute of Technology School of Management, Thailand.
- Roodman, David. 2010. "*Grameen Bank*, Which Pioneered Loans For the Poor, Has Hit a Repayment Snag." Center



for Global Development. (<http://www.cgdev.org>, diakses 31 Oktober 2014)

Statistic year book for Asia and the Pasific; Bangladesh 2012 – ESCAP Statistic Division. Dipublikasikan oleh Universi-tas ESCAP

Tanzimuddin Khan, Mohammad. “Working of Democracy in Bangladesh”. Paper prepared for the project on State of Democracy in South Asia as part of Qualitative Assessment of Democracy Lokniti, Center for Study of Developing Countries, Delhi, India.

The World Bank. 1999. “Foreign Direct Investment in Bangladesh.” The World Bank Bangladesh.

Uddin Haider, Shekh Kabir. 2013. “The Impacts of NGOs on the Socio-Economic Situation of the Poor : A Case Study in Rajshahi City, Bangladesh.” International Journal of Community Development. Vol. 1 No. 1, 2013, 35-43.

United Nations - International Chamber of Commerce. The World Business organization “An Investment Guide To Bangladesh – Opportunities and Conditions”. New York and Ganeva 2000.

Yunus, Muhammad – Bertrand Moingeon – Laurence Lehman-Ortega. 2010. “Building Social Business Models: Lessons from the *Grameen* Experience.” Long Range Planning 43. 308-325.

### **Daftar Website - Internet**

“Credit, Shared Human Right” Review by The Times, (<http://www.Grameen-info.org/index>, diakses 30 Oktober 2014.)

- “*Grameen Voices*” (<https://www.youtube.com> , diakses 22 Desember, 2014)
- “Microcredit and *Grameen Bank*” New Internationalist People, Ideas, and Action for Global Justice, (<http://newint.org>, diakses 30 Oktober 2014)
- “Muhammad Yunus on Capitalism” (<http://www.youtube.com/>, diakses pada 26 Oktober, 2014)
- “The Nobel Prize for 2006 to Muhammad Yunus and *Grameen Bank* – Press Release.” Nobel Media AB 2014, (<http://www.nobelprize.org>, diakses 24 Oktober 2014)
- “The Project”’s History” *Grameen* Danone Food Ltd, (<http://www.danonecommunities.com/>, diakses 30 Oktober 2014)
- Abdul Mottaleb, Khondoker. “An Inquiry into the Rapid Growth of the Garment Industry in Bangladesh”. Article DOI: 10.1086/661218 Tokyo, (<http://www.jstor.org/stable/10.1086/661218>, diakses 5 September 2014)
- Cesselin, Marlon. “The *Grameen* Veolia Water Social Business.” ESSEC Business School, (<http://lles.essec.edu>, diakses 30 Oktober 2014)
- Elkington, John. “Chairmen of strategy consultants sustain Ability by The Guardian” Review Business Social, (<http://www.Grameeninfo.org/>, diakses 30 Oktober 2014)
- Endang Kurniasih, Cut. “Pakistan dan Bangladesh”, (<http://www.slideshare.net/>, diakses 3 September 2014)
- Hungry Mind Review (<http://www.Grameen-info.org/index>, diakses 31 Oktober 2014).

- Pegu, Manorajan, “ “Development”, Capitalism, NGOs and People’s Movements in Bangladesh” an interview with Anu Muhammad. (<http://links.org.au/node/2075>, diakses 3 September 2014)
- Roodman, David “*Grameen Bank, Which Pioneered Loans for the Poor, Has Hit a Repayment Snag*” (<http://www.cgdev.org/>, diakses 30 Oktober 2014)
- Streubig, Andreas. “Factory of the Future” The Otto *Grameen* Textile Company, (<http://csr-manager.org/>, diakses 30 Oktober 2014)
- The World Bank. “GDP growth (annual %”, (<http://data.worldbank.org>, diakses 14 Oktober 2014)
- Trading World economy (<http://www.tradingeconomics.com/bangladesh/exports>, diakses 28 September 2014)
- Trully Erlynda, “Permintaan Kenaikan Upah Minimum Buruh Bangladesh oleh H&M: Analisis Hubungan Negara dan Perusahaan”, Hal. 2.
- Udin, Shahzad. “Privatisasi Di Bangladesh: Munculnya “Kapitalisme Keluarga”” (<https://www.academia.edu>, diakses 25 September 2014)

## **Daftar Berita**

- Erickson , Jo. “*India : The Exploitation Of Natural Resources For Economic Gain.*” Mint Press News, (<http://www.mintpressnews.com/india>, diakses pada 15 Oktober 2014)

- Kogure, Tetsuo. “*Manufacturer of Bangladeshi Capital is doing Fine*”, Board of Investment Bangladesh pada 5 November 2013, (<http://www.boi.gov.bd/> , diakses 1 Oktober 2014)
- Mudianingsih, Dwi. “*Pemberdayaan Masyarakat dan Wirausaha – Cara Kreatif Gali Potensi Bisnis*”, Republika pada 17 September 2014, (<http://www.republika.co.id/>, diakses 30 Oktober 2014)
- Staff Correspondent. “Bangladesh goes 21-notch up in latest WB”s Doing Business report”, The Daily Star pada 30 Oktober 2013, (<http://www.doingbusiness.org>, diakses 3 Oktober 2014)